



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA

LKIP
2023

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta, Kode Pos 55165
Telp. (0274) 555241, 515865, 515866, FAX (0274) 555241
WEBSITE : pmperizinan.jogjakota.go.id
EMAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 31 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Yogyakarta



BUDI SANTOSA, S. STP., M. SI.
NIP 19730414 199303 1 004

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Investasi

dengan indikator :

Nilai investasi (dalam rupiah)

Capaian kinerja tahun 2023 adalah Rp 862.424.406.597,00 atau sebesar 117,62% dari target. Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ke depan, sebagai berikut:

1. Pengembangan dan mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta melalui kerjasama dengan instansi, lembaga, BUMN, BUMD dan atau swasta yang memberikan pelayanan publik bagi masyarakat.
2. Penyusunan kajian akademik tentang peta potensi Kota Yogyakarta.
3. Penyusunan kajian akademik tentang Investment Project Ready to Offer (IPRO) Kota Yogyakarta.
4. Pembuatan e-katalog potensi investasi.
5. Penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur mengenai pengendalian pembangunan hotel.
6. Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, serta Kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.
7. Pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui temu investor, podcast, pameran, siaran radio, pembuatan video dan pembuatan leaflet.
8. Mengoptimalkan pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Digital.
9. Penyusunan Keputusan Wali Kota Yogyakarta tentang Tim Verifikasi dan Penilaian

Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.

10. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Mal Pelayanan Publik Digital Nasional.
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara terintegrasi dengan melibatkan OPD Teknis dalam melakukan proses verifikasi perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan dan hambatan penanaman modal melalui kegiatan Kunjungan Identifikasi Permasalahan Penanaman Modal dan Forum Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal.
13. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Inspeksi Pengawasan Perizinan Berusaha secara terintegrasi dengan melibatkan OPD Teknis untuk meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan penanaman modal dalam bentuk pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi perizinan berusaha berbasis risiko untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal.
15. Pemantauan pelaporan LKPM bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
16. Peningkatan kualitas SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat.
17. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terintegrasi dengan melibatkan OPD Teknis untuk meningkatkan proses perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Adanya alih Media Arsip Fisik IMB menjadi Arsip Digital.
19. Pengembangan Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan.
20. Optimalisasi sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang telah berjalan agar memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
21. Koordinasi teknis dan pembagian kerja dengan Diskominfo selaku penyedia layanan aplikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Permasalahan Kelembagaan DPMPTSP :

- Belum sesuainya peraturan perundang-undangan di daerah yang mengatur tentang kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Permasalahan pada proses perizinan dan non perizinan:

- Adanya perubahan kebijakan dan regulasi dalam hal kewenangan pembangunan, pengembangan dan perbaikan sistem informasi perizinan dan non perizinan.
- Sistem *perizinanonline* yang masih memerlukan maintenance karena harus menyesuaikan dengan regulasi peraturan yang baru.
- Adanya aplikasi MPP Digital yang belum siap dan perlu maintenance yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Permasalahan pelaporan:

- Penyusunan laporan atas kegiatan pemberian insentif dan kemudahan berusaha belum terlaksana karena dasar hukumnya yang berupa Peraturan Wali Kota masih belum terbit.
- Terlalu banyak penyusunan evaluasi penyelenggaraan kinerja DPMPTSP yang diselenggarakan oleh Kementerian maupun Lembaga terkait.
- Masih banyaknya Pelaku usaha yang belum mengetahui kewajiban pelaporan dan tata cara penyampaian LKPM.
- Masih banyaknya Pelaku usaha yang tidak patuh terkait kewajiban pelaporan LKPM.
- Laporan capaian realisasi investasi di Daerah tidak tepat waktu karena rilis data realisasi investasi dari Kementerian Investasi/BKPM yang mundur dari jadwal.
- Belum tersedianya sistem pelaporan penggunaan Aplikasi MPP Digital yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Permasalahan Informasi Investasi:

- Belum terbitnya Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.
- Belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.
- Masih kurang optimalnya kegiatan promosi investasi.
- Belum tersedianya dokumen potensi investasi terbaru.
- Belum tersedianya dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) Kota Yogyakarta.
- Dengan ditetapkannya Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia mengakibatkan berkurangnya potensi masuknya investasi baru.
- Belum ditetapkannya Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Pengendalian Hotel.

Permasalahan Infrastruktur :

- Mall Pelayanan Publik tidak dapat dikembangkan karena keterbatasan luas bangunan gedung yang disebabkan masih adanya unit kerja dari OPD lain yang menempati sebagian gedung DPMPTSP.

Permasalahan Mal Pelayanan Publik:

- Terdapat beberapa instansi vertikal dan/atau lembaga yang belum optimal dalam menyelenggarakan pelayanan di Mal Pelayanan Publik.
- Belum optimalnya sistem Mal Pelayanan Publik Digital sehingga menghambat masyarakat khususnya tenaga kesehatan dalam mendapatkan izin.

Permasalahan pada proses Perizinan Berusaha OSS Berbasis Risiko:

- Sistem OSS yang sering dalam keadaan maintenance dan down sehingga menghambat pelaku usaha untuk memperoleh perizinan berusaha melalui OSS.
- Pada sistem OSS masih ada kendala terkait dengan sinkronisasi KBLI OSS dengan Gistaru/RDTR Kota Yogyakarta sehingga menghambat terbitnya izin dasar KKKPR (Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) OSS, yang mengakibatkan pelaku usaha tidak mendapatkan perizinan berusahanya.
- Adanya ketidaksinkronan antara Standar Operasional Prosedur OSS (diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) dengan penyelenggaraan Sistem OSS.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas dan Fungsi	5
1.3 Isu-isu Strategis	5
1.4 Keadaan Pegawai	5
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	7
1.6 Keuangan	27
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	27
BAB 2 PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	29
2.1 Perencanaan Strategis	29
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	29
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan	31
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan	31
2.1.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	32
2.2 Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2023	34
2.2.1 Target Belanja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	34
2.2.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	34
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	36
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	39
3.2.1 Sasaran Perangkat Daerah	39
Tabel 3.10 Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2023	42
3.2.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan	42
3.2.3 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023	48
3.2.4 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan Capaian Kinerja tahun 2019-2022	49
3.2.5 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target terakhir rencana strategis	50
3.2.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional	51
3.2.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	52
3.2.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	53
3.2.9 Analisa faktor-faktor penghambat dan pendorong peningkatan/penurunan kinerja	54
3.3 Realisasi Anggaran	57
3.3.1 Analisis Efisiensi	64
3.4 Inovasi	66
3.5 Kolaborasi lintas sektor	74
BAB 4 PENUTUP	76
LAMPIRAN	78

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi	3
Gambar 1.2 Pohon Kinerja	4
Gambar 1.3 Loker Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7
Gambar 1.4 Loker <i>Front Office</i>	8
Gambar 1.5 Loker Samsat -Yogyakarta.....	8
Gambar 1.6 Loker Kantor Imigrasi.....	9
Gambar 1.7 Gerai UMKM.....	9
Gambar 1.8 Loker Layanan PPID	9
Gambar 1.9 Loker Layanan JSS	10
Gambar 1.10 Bank BPD DIY	10
Gambar 1.11 Bank BPD Syariah.....	11
Gambar 1.12 Bank Jogja	11
Gambar 1.13 Pojok Baca	12
Gambar 1.14 Pojok Baca Digital	12
Gambar 1.15 Tempat Bermain Anak	12
Gambar 1.16 Ruang Laktasi.....	13
Gambar 1.17 Kotak Pengaduan.....	13
Gambar 1.18 <i>Fotocopy</i> Wiwara	14
Gambar 1.19 Toko Wiwara.....	14
Gambar 1.20 Papan Penunjuk Arah	15
Gambar 1.21 Kursi Roda.....	15
Gambar 1.22 Alat Cetak Mandiri	16
Gambar 1.23 <i>Terminal Charger</i>	16
Gambar 1.24 Monitor Antrian.....	17
Gambar 1.25 Monitor Informasi Perizinan	17
Gambar 1.26 Ruang Tunggu <i>Front Office</i>	18
Gambar 1.27 Ruang Tunggu Sisi Selatan	18
Gambar 1.28 Ruang Tunggu Sisi Utara	18
Gambar 1.29 <i>Coffee Shop</i> Baznaz.....	19
Gambar 1.30 Taman <i>Coffee Shop</i> Baznas	19
Gambar 1.31 Mushola.....	19
Gambar 1.32 Ruang Inklusi	20
Gambar 1.33 Ruang Akad Nikah.....	20
Gambar 1.34 Ruang Akad Nikah.....	20
Gambar 1.35 Kamar Mandi	21
Gambar 1.36 Wastafel	21
Gambar 1.37 Kamar Mandi Difabel	21
Gambar 1.38 Toilet Difabel	22
Gambar 1.39 Lemari Es untuk Pemohon	22
Gambar 1.40 Tempat Parkir Motor	22
Gambar 1.41 Tempat Parkir Mobil.....	23
Gambar 1.42 Loker Konsultasi OSS RBA	23
Gambar 1.43 Ruang Rapat Wahyu Tumurun.....	24
Gambar 1.44 Ruang Rapat Tim Teknis.....	24
Gambar 1.45 Ruang Arsip.....	24
Gambar 1.46 Ruang Arsip.....	25
Gambar 1.47 <i>Sensor Gate</i>	25
Gambar 1.48 <i>Alat Penilaian SKM</i>	26
Gambar 1.49 <i>Alat SIPADI</i>	27
Gambar 3.1 Print From Home	68
Gambar 3.2 Cek Poin Jogja	69
Gambar 3.3 Alat Cetak Mandiri	70
Gambar 3.4 SIADI	71
Gambar 3.5 Alur SIM DOK IMB.....	72
Gambar 3.6 SIM DOK IMB	72
Gambar 3.7 Kopi Joss	74

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Rincian Jumlah Pegawai	6
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	6
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	30
Tabel 2.2 Sasaran Strategis	31
Tabel 2.3 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan	32
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	33
Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	33
Tabel 2.6 Target Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34
Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	34
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	36
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2023	37
Tabel 3.3 Investasi PT XL AXIATA	37
Tabel 3.4 Realisasi Investasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 dengan pengecualian	38
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tahun 2023	38
Tabel 3.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	40
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	40
Tabel 3.8 Akumulasi Realisasi Investasi OMA dan PMDN	41
Tabel 3.9 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2023	42
Tabel 3.10 Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2023	42
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Belanja	42
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	43
Tabel 3.13 Realisasi Capaian Indikator Program	45
Tabel 3.14 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023	48
Tabel 3.15 Perbandingan Capaian kinerja 2023 dengan Capaian Kinerja tahun 2019-2022	49
Tabel 3.16 Realisasi Kinerja 2023 dengan target terakhir Renstra	50
Tabel 3.17 Perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional	51
Tabel 3.18 Perbandingan realisasi Kinerja dengan realisasi Provinsi dan Nasional	52
Tabel 3.19 Prosentase Realisasi Investasi terhadap capaian Provinsi dan Nasional	52
Tabel 3.20 Capaian Program	53
Tabel 3.21 Capaian Kegiatan	53
Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN DPMPTSP Tahun 2023	58
Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Belanja Non Gaji DPMPTSP Tahun 2023	58
Tabel 3.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023	64
Tabel 3.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023	64
Tabel 3.26 Analisis Efisiensi	65

BAB 1

Bab 1 Berisi :

1. Struktur Organisasi
2. Fungsi dan Tugas
3. Isu Strategis
4. Keadaan Pegawai
5. Keadaan Sarana dan Prasarana
6. Keuangan
7. Sistematika LKJIP

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
2. Mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

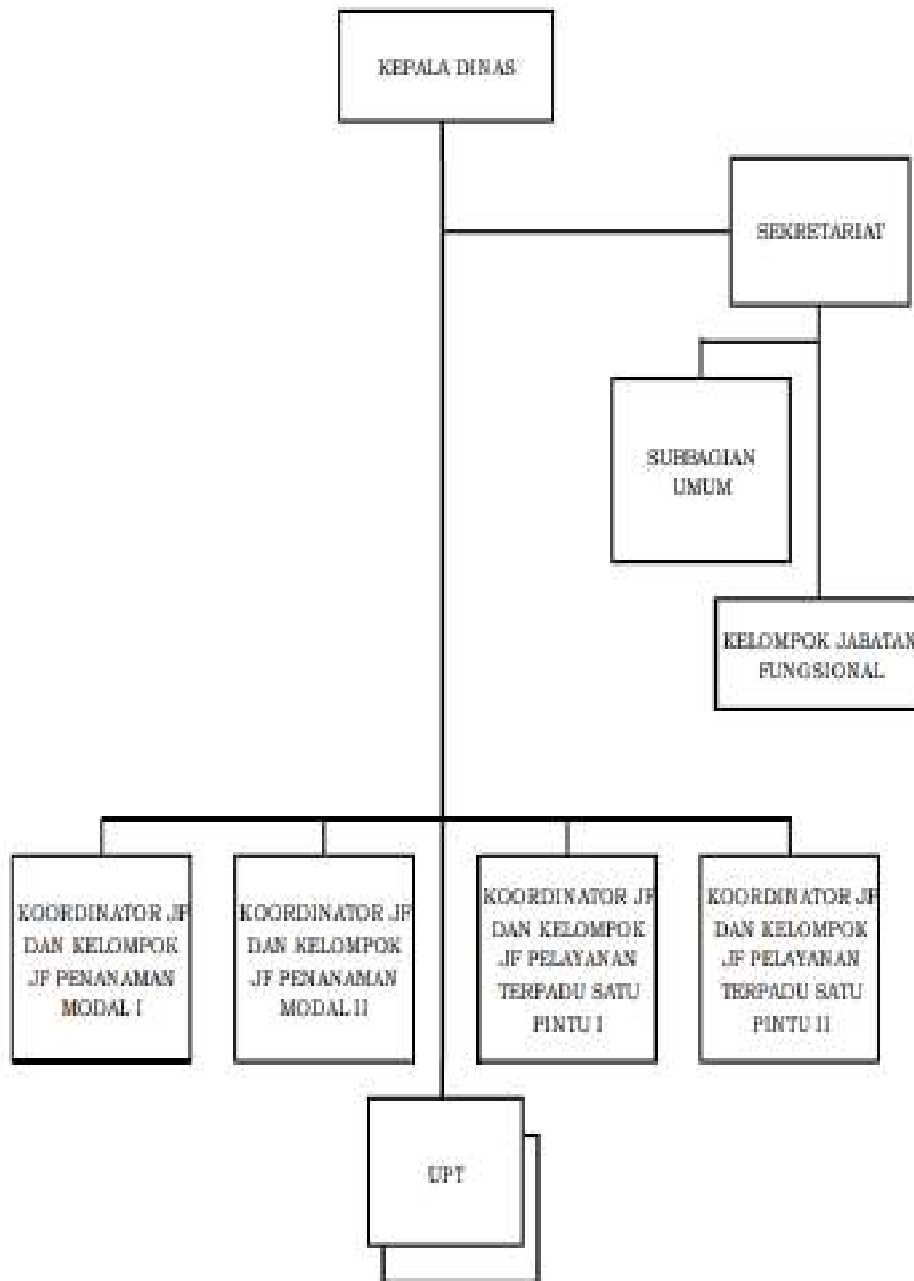
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dicabut dan diubah melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Dinas Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Koordinator JF Dan Kelompok JF Penanaman Modal I
- d. Koordinator JF Dan Kelompok JF Penanaman Modal II
- e. Koordinator JF Dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu I
- f. Koordinator JF Dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu II; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Walikota No. 37 Tahun 2023

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah menetapkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kepada masyarakat di Kota Yogyakarta;
2. Meningkatkan upaya pemberian informasi serta penanganan konsultasi dan pengaduan terhadap izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
3. Melakukan kajian terhadap dasar hukum atau regulasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, sehingga diharapkan semua izin sudah ada regulasinya dan untuk memacu perkembangan potensi investasi melalui kemudahan berusaha;
4. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait promosi kegiatan festival, kultural dan sebagainya yang berlokasi di Kota Yogyakarta, dan dapat berpartisipasi ikut pameran di suatu Kota atau Negara dengan menampilkan produk- produk khas Kota Yogyakarta.

1.4 Keadaan Pegawai

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dari hasil analisis jabatan sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 455 tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu idealnya kebutuhan Sumber

Daya Manusia (SDM) berjumlah 106 orang pegawai, Namun untuk saat ini kebutuhan SDM baru terpenuhi sejumlah 66 orang pegawai yang terdiri dari (32 orang PNS dan 34 orang TT) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rincian Jumlah Pegawai

No.	Uraian	Jumlah	S.2	S.1	Diploma	SMA
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	1	-	-
3	Koordinator Substansi	4	2	2	-	-
4	Kepala Sub Bagian	1	1	-	-	-
5	Staf	29	-	18	2	9
6	PJLOP	33	-	18	8	7
	JUMLAH	69	4	39	10	16

*data per 31 Desember 2023

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	Eselon II	1 orang	Kepala Dinas
2.	Eselon III	5 orang	Koordinator & Sekretaris Ka. Sub Bag
3.	Eselon IV	1 orang	
4.	Staf PNS	29 orang	
5.	PJLOP	33 orang	

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Golongan IV	7 orang	
2.	Golongan III	25 orang	
3.	Golongan II	4 orang	
4.	Golongan I	0 orang	
5.	PJLOP	33 orang	
	Jumlah	69 orang	

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laki-laki	30 orang	10 PJLOP
2.	Perempuan	39 orang	23 PJLOP
	Jumlah	69 orang	

* data Nominatif Pegawai per 31 Desember 2023

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana (Sarpras) kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini secara kuantitatif sudah sebanding dengan beban pekerjaan. Namun secara kualitas ada beberapa sarpras yang masih butuh diperbaiki dan peremajaan seperti: perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan prima. Adapun Sarpras kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta untuk menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut:

– Loker Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta didesain dengan ruang pelayanan yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang pelayanan berada di ruangan yang cukup luas di lantai satu berdampingan dengan Mall Pelayanan Publik (MPP), yang didukung dengan fasilitas lengkap yang memadai, proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel. Lantai yang selalu terlihat bersih, hawa ruangan yang terasa sejuk dan ruangan tertata rapi.



Gambar 1.3 Loker Pelayanan Terpadu Satu Pintu

– Loker *Front Office*:

Di loket *Front Office*, petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan serta berbagai pelayanan lain yang tersedia di Mall Pelayanan Publik dengan penuh keramahan, berpakaian seragam yang berbeda dengan pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya, menghilangkan kesan birokrasi dalam proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Yogyakarta.



Gambar 1.4 Loker *Front Office*

– **Prasarana Layanan Pendukung Perizinan:**

Di Mall Pelayanan Publik tersedia beberapa prasarana layanan pendukung perizinan yang diharapkan mampu membantu para masyarakat (pemohon) dalam mengurus perizinan dan nonperizinan.



Gambar 1.5 Loker Samsat -Yogyakarta



Gambar 1.6 Loker Kantor Imigrasi



Gambar 1.7 Gerai UMKM



Gambar 1.8 Loker Layanan PPID



Gambar 1.9 Loker Layanan JSS

– **Bank BPD DIY, Bank BPD Syariah dan Bank Jogja**

Prasarana pendukung lainnya seperti Bank BPD, Bank BPD Syariah dan Bank Jogja dalam dalam satu gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta memperkuat konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*one stop service*) yang memudahkan pemohon dalam pengurusan perizinan dari pengajuan permohonan, pembayaran retribusi izin sampai kegiatan investasi perbankan lain sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.



Gambar 1.10 Bank BPD DIY



Gambar 1.11 Bank BPD Syariah



Gambar 1.12 Bank Jogja

Prasarana lainnya yang mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah:

– **Perpustakaan/Pojok Baca**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta menyediakan perpustakaan mini, yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai, pemohon izin dan tamu untuk membaca berbagai macam buku yang tersedia dalam bentuk fisik maupun digital.



Gambar 1.13 Pojok Baca



Gambar 1.14 Pojok Baca Digital

– **Ruang Bermain Anak**

Ruang bermain anak disediakan untuk pemohon yang membawa putra putri kecilnya untuk mengurus izin agar anak tidak merasa bosan.



Gambar 1.15 Tempat Bermain Anak

- **Ruang Laktasi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyediakan Ruang Laktasi yang disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya. Ruang Laktasi juga dilengkapi dengan kulkas untuk menyimpan ASI yang dimanfaatkan oleh para pegawai dari Kompleks Balaikota Pemerintah Kota Yogyakarta.



Gambar 1.16 Ruang Laktasi

- **Kotak Pengaduan**

Kotak Pengaduan merupakan salah satu sarana atau fasilitas pengaduan yang dapat digunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.



Gambar 1.17 Kotak Pengaduan

- **Fotocopy**

Fotocopy disediakan untuk memudahkan pemohon dalam proses melengkapi data perizinan agar pemohon dapat lebih menghemat waktu dan tenaga jika ada dokumen atau

berkas yang harus digandakan.



Gambar 1.18 Fotocopy Wiwara

- **Toko Wiwara**

Toko Wiwara menyediakan fasilitas mulai dari makan minum hingga kebutuhan lain yang bisa dibeli di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar pemohon nyaman dan terbantu dalam proses permohonan pelayanan perizinan.



Gambar 1.19 Toko Wiwara

- **Papan Petunjuk Arah**

Papan Petunjuk Arah disediakan untuk memudahkan pemohon untuk mengetahui letak loket dan berbagai fasilitas saat berada di Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.



Gambar 1.20 Papan Penunjuk Arah

- **Aksesibilitas**

Aksesibilitas disediakan untuk memudahkan penyandang *disabilitas* atau lansia yang menggunakan kursi roda atau tongkat.



Gambar 1.21 Kursi Roda

- **Alat Cetak Mandiri**

Alat cetak mandiri dapat digunakan untuk membantu pemohon dalam memproses dan mencetak dokumen perizinan dan dokumen kependudukan secara mandiri.



Gambar 1.22 Alat Cetak Mandiri

- **Terminal Charger**

Terminal charger tersedia di beberapa titik di dalam gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk para pemohon yang membutuhkan pengisian daya bila saat menunggu *handphone* mengalami kurang daya. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan pemohon.



Gambar 1.23 Terminal Charger

- **Monitor Loket Antrian**

Monitor yang digunakan untuk memantau antrian yang dipanggil ke meja pelayanan disediakan di beberapa titik di lantai satu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta untuk memudahkan pemohon mengetahui nomor antrian yang sudah atau sedang dipanggil.



Gambar 1.24 Monitor Antrian

- **Monitor Informasi Perizinan**

Monitor Informasi Perizinan terletak di lantai satu Gedung DPMPTSP yang menampilkan Izin IMB yang telah terbit dan hasil Survey Kepuasan Masyarakat, serta beberapa informasi perizinan lainnya



Gambar 1.25 Monitor Informasi Perizinan

- **Ruang Tunggu Antrian**

Ruang Tunggu Antrian terdapat di beberapa titik di lantai satu Mall Pelayanan Publik. Ruang Tunggu Antrian digunakan untuk memfasilitasi pemohon agar dapat duduk dengan nyaman ketika menunggu nomor antriannya dipanggil.



Gambar 1.26 Ruang Tunggu *Front Office*



Gambar 1.27 Ruang Tunggu Sisi Selatan



Gambar 1.28 Ruang Tunggu Sisi Utara

- **Coffee Shop Baznaz**

Coffee Shop Baznaz terletak di lantai satu gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh pemohon, pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dan tamu yang mengurus perizinan untuk menghilangkan rasa bosan, haus dan lapar. *Coffee Shop* ini dikelola oleh kaum difabel tunarungu sebagai upaya pemberdayaan dengan zakat produktif yang diharapkan mampu mengentaskan dari kekurangan yang dimiliki.



Gambar 1.29 *Coffee Shop* Baznaz



Gambar 1.30 Taman *Coffee Shop* Baznas

- **Mushola**

Mushola merupakan salah satu sarana yang disediakan untuk pegawai, pemohon izin, tamu yang ingin menjalankan ibadah sholat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.



Gambar 1.31 Mushola

- **Ruang Inklusi**

Ruang Inklusi merupakan fasilitas yang disediakan untuk mempermudah penyandang

disabilitas yang menggunakan layanan dari Pemerintah Kota Yogyakarta maupun mengurus perizinan dan nonperizinan di Mall Pelayanan Publik (MPP).



Gambar 1.32 Ruang Inklusi

- **Ruang Akad Nikah**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta menyediakan fasilitas ruang akad nikah yang ruangnya menyatu dengan ruang rapat wahyu tumurun yang bisa difungsikan selain untuk ruang rapat juga dapat menjadi tempat akad nikah yang menggunakan pintu pemisah antara ruang rapat dan ruang akad nikah. Ruang akad nikah dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Yogyakarta yang menginginkan akad nikah diselenggarakan di Mal Pelayanan Publik (MPP.)



Gambar 1.33 Ruang Akad Nikah



Gambar 1.34 Ruang Akad Nikah

- **Kamar Mandi / WC**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta memiliki Kamar Mandi/ WC, yang berada di 2 (dua) sisi, sebelah utara sisi timur, dan sebelah selatan sisi barat. Khusus disediakan fasilitas untuk penyandang *disabilitas* di sebelah utara sisi barat.



Gambar 1.35 Kamar Mandi



Gambar 1.36 Wastafel



Gambar 1.37 Kamar Mandi Difabel



Gambar 1.38 Toilet Difabel

- **Almari Es**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta juga menyediakan almari es/kulkas untuk para pemohon/pengunjung yang mengurus izin.



Gambar 1.39 Lemari Es untuk Pemohon

- **Tempat Parkir**

Lahan parkir disediakan untuk para pemohon di sebelah barat gedung untuk lahan parkir roda empat dan sebelah timur gedung untuk parkir kendaraan roda dua.



Gambar 1.40 Tempat Parkir Motor



Gambar 1.41 Tempat Parkir Mobil

- **Loket Konsultasi OSS RBA**

Loket Konsultasi OSS RBA merupakan Loket yang berada di Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk membantu pemohon mendapatkan informasi, konsultasi dan pendaftaran perizinan berusaha melalui OSS.



Gambar 1.42 Loket Konsultasi OSS RBA

- **Ruang Rapat Wahyu Tumurun**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memiliki 3 (tiga) Ruang Rapat yaitu Ruang Rapat Wahyu Tumurun sebagai ruang rapat utama dan 2 (dua) ruang rapat Teknis untuk menunjang pelaksanaan kegiatan administrasi, pelayanan perizinan dan nonperizinan. Ruang Rapat Utama yaitu Ruang Rapat Wahyu Tumurun. Ruang tersebut dapat digunakan untuk melakukan Koordinasi Internal maupun Koordinasi Eksternal dengan Perangkat Daerah Teknis terkait pengawasan atau pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan.



Gambar 1.43 Ruang Rapat Wahyu Tumurun



Gambar 1.44 Ruang Rapat Tim Teknis

- **Ruang Arsip**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memiliki Ruang Arsip Wahyu Tumurun. Ruangan ini digunakan untuk menyimpan Arsip Berkas Perizinan yang masih berbentuk fisik. Terdapat sebuah inovasi Arsip Digital yang dapat digunakan untuk mempermudah pencarian arsip yang berada diantara ribuan arsip.



Gambar 1.45 Ruang Arsip



Gambar 1.46 Ruang Arsip

- **Sensor Gate**

Sensor Gate ini berfungsi untuk mencegah hilangnya atau dibawanya alat SIPADI (Sistem Panggilan Digital) keluar gedung DPMPTSP. Alat SIPADI digunakan sebagai alternatif dari panggilan melalui speaker. *Sensor Gate* ini terletak di Pintu Utama sisi Barat dan sisi Timur.



Gambar 1.47 *Sensor Gate*

– **Alat Penilaian SKM**



Gambar 1.48 Alat Penilaian SKM

Penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan cara untuk tercapainya penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien dalam rangka penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi. Dalam penyelenggaraan MPP perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Oleh karena itu, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang di dalamnya mengatur tentang penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Implementasi teknologi informasi dalam pelayanan publik diwujudkan dengan tersedianya *Tablet SKM MPP* sebagai bentuk inovasi yang dihadirkan di Mal Pelayanan Publik. *Tablet SKM MPP* merupakan suatu alat penilaian kinerja pelayanan yang dilakukan melalui perangkat digital layar sentuh secara dinamis dan menarik. Penggunaan *Tablet SKM MPP* turut serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Adapun pada *Tablet SKM MPP* akan menampilkan 5 (lima) unsur yang menjadi bahan penilaian masyarakat terhadap layanan di MPP, diantaranya kemudahan persyaratan dan prosedur pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, kesesuaian biaya/tarif yang dibayarkan, kemampuan dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan, kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan ruang tunggu.

Dengan adanya *Tablet SKM MPP*, akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diterima. Selain itu, hasil rekap SKM dapat dengan mudah ditarik tanpa harus memakan waktu lama. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kemudahan dan efisiensi masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap layanan yang diberikan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan *Tablet SKM MPP*.

– **SIPADI**

SIPADI yaitu sistem Panggilan Digital adalah suatu sistem menggunakan alat panggilan yg terintegrasi dg sistem SIMPPONI dimana alat panggil dibawa oleh pemohon dan apabila pemohon dipanggil maka alat tersebut akan berbunyi dan bergetar. Bunyi itu akan mati

apabila pemohon sudah ke loket utk mendapatkan layanan.



Gambar 1.49 Alat SIPADI

- **Kendaraan Dinas**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta juga memiliki kendaraan dinas yang terdiri dari Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) sejumlah 6 unit dan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sejumlah 16 unit.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta pada tahun 2023 berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Perubahan APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 12.963.306.683,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 11.758.774.633,00 dan belanja modal sebesar Rp 1.204.532.050,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung yang didukung oleh 5 program dan 13 kegiatan.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2023*

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta merupakan manifestasi komitmen Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023 – 2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2017-2022). RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode empat tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan telah direview melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta 2023-2026 adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”.

Misi Pembangunan Kota Yogyakarta 2023-2026:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan;

2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan;
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa;
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya;
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum;
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai;
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas;
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

Dengan mengacu pada RPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, prioritas pembangunan yang disasar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta adalah pada misi yang ke 3, yakni **“Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa”**.

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPD Kota Yogyakarta 2023-2026

Visi: Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan				
No.	Misi dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: 3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa			
	Sasaran Misi: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Kurangnya kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal, kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan penanaman modal dan perizinan	Kualitas internet masih belum optimal, Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara online (<i>Online Single Submission</i>) terkendala oleh sistem OSS yang belum stabil	Adanya komitmen dari semua pejabat struktural di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dengan visi **“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”** dan misi **“Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa”**, maka misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta selama 4 tahun anggaran adalah **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi”** dengan sasaran **“Investasi di Kota Yogyakarta meningkat”**.

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target tahunan				
				CAPAIAN AWAL TAHUN 2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	Dalam rupiah	308.015.205.801	318.966.195.786 s/d 733.200.000.000	323.380.884.182 s/d 733.200.000.000	345.277.262.488 s/d 733.200.000.000	358.674.020.272 s/d 733.200.000.000
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	poin	81,13	81,75	82,25	82,75	83,25

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Dalam upaya tercapainya sasaran perangkat daerah, maka disusun 4 (empat) strategi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 antarlain peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan, peningkatan pengawasan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan, penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan serta pengembangan penanaman modal.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.1.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	Dalam Rupiah	319.966.195.786
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Poin	81,75

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.562.359.356,00	APBD TA 2023
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 1.237.998.770,00	APBD TA 2023
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 759.430.750,00	APBD TA 2023
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 600.504.000,00	APBD TA 2023
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 199.219.750,00	APBD TA 2023

Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena ada perubahan program dan anggaran. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	Dalam Rupiah	318.966.195.786 s/d 733.200.000.000
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Poin	B

Catatan: 1.Target Kinerja dari Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.121.701.413,00	Perubahan APBD TA 2023
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 1.248.698.770,00	Perubahan APBD TA 2023
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 787.182.750,00	Perubahan APBD TA 2023
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 606.504.000,00	Perubahan APBD TA 2023
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 199.219.750,00	Perubahan APBD TA 2023

2.2 Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 12.359.512.626,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp 11.350.064.926,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 1.009.447.700,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp 12.963.306.683,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp 11.758.774.633,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 1.204.532.050,00.

2.2.1 Target Belanja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Tabel 2.6 Target Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Operasi	Rp 11.758.774.633,00	100 %
Belanja Modal	Rp 1.204.532.050,00	100 %
Jumlah	Rp 12.963.306.683,00	100 %

2.2.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Rp 2.841.605.270,00	21,92%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal,

				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 10.121.701.413,00	78,08%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB 3

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2022*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Realisasi Anggaran*
4. *Inovasi*

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2023

REALISASI INVESTASI KOTA YOGYAKARTA PER TRIWULAN BERDASARKAN RILIS KEMENTERIAN INVESTASI TW III DAN ANGKA FORECAST TW IV					
PERIODE PENYAM- PAIAN LKPM	REALISASI INVESTASI	AKUMULASI	TARGET REALISASI INVESTASI TAHUN 2023	% REALISASI INVESTASI DARI TARGET RANGE TERTINGGI	CAPAIAN TARGET REALISASI INVESTASI 2023
TW I	354.486.231.2 50,74	354.486.231.2 50,74	318.966.195.786 - 733.200.000.000	48,35%	TERCAPAI
TW II	159.597.469.9 79,75	514.083.701.2 30,49		70,12%	TERCAPAI
TW III	219.088.377.2 69,18	733.172.078.4 99,67		99,996%	TERCAPAI
TW IV	193.306.673.5 84,00	926.478.752.0 84,00		126,36%	TERCAPAI

Sumber data : Data rilis realisasi investasi dari Kementerian Investasi/BKPM

Nilai Realisasi Investasi di Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp 193.306.673.584,00 sehingga total investasi dalam satu tahun di tahun 2023 sebesar Rp 926.478.752.084,00 dengan prosentase 126,36%. Berdasarkan hasil identifikasi ada penambahan realisasi investasi yang pada kenyataannya lokasi usaha saat ini telah berpindah dari Kota Yogyakarta ke Kabupaten Sleman yakni PT XL AXIATA sehingga nilai realisasi investasi Perusahaan tersebut dikeluarkan dari capaian realisasi investasi Kota Yogyakarta sebesar Rp 64.054.345.486,71. Hasil identifikasi didapat sebagai berikut:

Tabel 3.3 Investasi PT XL AXIATA

Nama Perusahaan	Status	Negara	Tahun	Triwulan	Alamat Perusahaan	Provinsi	Kabupaten	Lokasi Proyek	Email	Referensi Izin	Desk. KBLI 2 DIGIT	Kategori Sektor	Nilai Investasi (Rp/bi)
XL AXIATA Tbk.	PMA	Malaysia	2023	1	XL Axio Tower J. HR Resuna Said Blok X-5 Kav 11-12 RT, 007RW, 002, Kel. Nuringan Timur, Kec. Setiabudi	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta	corpsec@xl.co.id	8120001981607	(61)- Telekomunikasi	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp0,00
XL AXIATA	PMA	Malaysia	2023	2	XL Axio Tower J. HR Resuna Said Blok X-5 Kav 11-12 RT, 007RW, 002, Kel. Nuringan Timur, Kec. Setiabudi	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta	corpsec@xl.co.id	8120001981607	(61)- Telekomunikasi	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp19.257.741.548,82
XL AXIATA	PMA	Malaysia	2023	3	XL Axio Tower J. HR Resuna Said Blok X-5 Kav 11-12 RT, 007RW, 002, Kel. Nuringan Timur, Kec. Setiabudi	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta	CORPSEC@xl.co.id	8120001981607	(61)- Telekomunikasi	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp24.436.255.614,00
XL AXIATA	PMA	Malaysia	2023	4	XL Axio Tower J. HR Resuna Said Blok X-5 Kav 11-12 RT, 007RW, 002, Kel. Nuringan Timur, Kec. Setiabudi	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta	corpsec@xl.co.id	8120001981607	(61)- Telekomunikasi	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp28.361.340.337,79
Total Realisasi XL AXIATA													Rp 64.054.345.486,71

Oleh karena itu, perhitungan nilai realisasi investasi untuk triwulan IV yang didasarkan dengan perhitungan rilis realisasi investasi dari BKPM dengan mengecualikan realisasi investasi dari PT XL AXIATA sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Investasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 dengan pengecualian

REALISASI INVESTASI KOTA YOGYAKARTA PER TRIWULAN BERDASARKAN RILIS KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM					
PERIODE PENYAMPAIAN LKPM	REALISASI INVESTASI	AKUMULASI	TARGET REALISASI INVESTASI TAHUN 2023	% REALISASI INVESTASI DARI TARGET RANGE TERTINGGI	CAPAIAN TARGET REALISASI INVESTASI 2023
TW I	354.486.231. 250,74	354.486.231.2 50,74	318.966.195.786 – 733.200.000.000	48,35%	TERCAPAI
TW II	159.597.469. 979,75	514.083.701.2 30,49		70,12%	TERCAPAI
TW III	219.088.377. 269,18	733.172.078.4 99,67		99,996%	TERCAPAI
TW IV	35.063.751.3 57,00	768.235.829.8 56,67		117,62%	TERCAPAI
REALISASI INVESTASI YANG DIKELUARKAN DARI DATA REALISASI INVESTASI KOTA YOGYAKARTA	64.054.345.4 87,00	862.424.406.5 97,00			
<i>Sumber data : Data rilis realisasi investasi dari Kementerian Investasi/BKPM</i>					

Dilihat dari hasil perhitungan dengan mengecualikan PT XL AXIATA dapat diketahui bahwa nilai realisasi investasi Kota Yogyakarta tahun 2023 sudah tercapai sebesar Rp 862.424.406.597,00. Angka realisasi ini melebihi *range* target yang telah ditentukan di tahun 2023 yaitu sebesar Rp 318.966.195.786,00 s/d Rp 733.200.000.000 dengan capaian sebesar 117,62%.

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI INVESTASI DARI TARGET RANGE TERTINGGI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	Dalam Rupiah	318.966.195.786 – 733.200.000.000	862.424.406.597,00	117,62%	TERCAPAI
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektora t	Huruf	B	AA	135,8%	TERCAPAI

Catatan:

1. Target Kinerja dari Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

2. Sumber data data rilis realisasi investasi Kementerian Investasi/BKPM di OSS , nilai prosentase realisasi didapat dengan menggunakan range tertinggi sebagai pembanding.
3. Range tertinggi dari target realisasi investasi setiap tahunnya kemungkinan akan berubah sesuai dengan target yang ditentukan DPMPTSP DIY setiap tahun, sedangkan range bawah dari target realisasi telah ditentukan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dari tabel di atas, pencapaian target sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun 2023 untuk **“Nilai Investasi Meningkat”** dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp 428.457.147.957 naik menjadi Rp 724.541.834.701 ditahun 2023. Jika disandingkan dengan target investasi di tahun 2023, sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun 2023 untuk **“Nilai Investasi Meningkat”** dengan target batas minimal Rp 318.966.195.786 sampai dengan batas maksimal Rp 733.200.000.000 telah terealisasi sebesar 98,82% (dibandingkan dengan batas maksimalnya) atau sebesar Rp 724.541.834.701.

Sedangkan untuk target sasaran **“Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”** dengan metadata hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat penilaian baru sampai Triwulan III dengan perolehan hasil evaluasi RB General Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah 95,10% atau setara dengan perolehan poin sebesar AA. Berdasarkan kesepakatan dari Bagian Organisasi bahwa nilai Reformasi Birokrasi dengan kategori >90 (diatas 90) maka akan mendapatkan poin AA dengan capaian 135,8% yang dihitung melalui capaian nilai di triwulan III dibagi dengan nilai batas atas target, dikali seratus persen $((95,10\%:70) \times 100\%)$. Hasil ini masih bersifat sementara karena penilaian baru sampai Triwulan III, namun dapat dilihat hingga triwulan III, sasaran **“Meningkatnya Reformasi Birokrasi”** telah tercapai hingga 135,8% dengan poin AA.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Perangkat Daerah

Tolok ukur capaian sasaran **“Meningkatnya Nilai Investasi”** diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator tersebut adalah indikator Nilai investasi sedangkan tolok ukur capaian sasaran **“Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”** diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator tersebut adalah Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi	Nilai Investasi Dalam Rupiah
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Huruf

Kinerja sasaran Meningkatkan Nilai Investasi dengan indikator Nilai Investasi pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir Renstra 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Investasi	428.457.147.957	318.966.195.786 s/d 733.200.000.000	862.424.406.597,00	117,62%	358.674.020.272 s/d 733.200.000.000	117,62%*
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60,68	B	AA	135,8%	AA	135,8%

Catatan:

1. Target Kinerja dari Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Sumber data data rilis realisasi investasi Kementerian Investasi/BKPM di OSS , nilai prosentase realisasi didapat dengan menggunakan range tertinggi sebagai pembanding.
3. Range tertinggi dari target realisasi investasi setiap tahunnya kemungkinan akan berubah sesuai dengan target yang ditentukan DPMPSTSP DIY setiap tahun, sedangkan range bawah dari target realisasi telah ditentukan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Capaian realisasi investasi tahun 2023 terdiri dari capaian realisasi investasi dari beberapa sektor, antara lain:

Tabel 3.8 Akumulasi Realisasi Investasi OMA dan PMDN

Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah Realisasi Tenaga Kerja Indonesia
Rp 862.424.406.597,00	2134
Nama Sektor	Jumlah Realisasi Investasi
Hotel dan Restoran	Rp 417.835.701.510,40
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp 154.261.503.688,78
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp 90.068.539.995,74
Perdagangan dan Reparasi	Rp 85.877.772.235,25
Jasa Lainnya	Rp 40.695.569.070,12
Industri Makanan	Rp 36.511.314.788,90
Industri Kertas dan Percetakan	Rp 20.770.867.266,84
Konstruksi	Rp 14.280.600.000,00
Industri Lainnya	Rp 1.998.338.040,96
Listrik, Gas dan Air	Rp 104,200,000.00
Industri Tekstil	Rp 20.000.000.000,00
Grand Total	Rp 862.424.406.597,00

Catatan:

1. Target Kinerja dari Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Sumber data data rilis realisasi investasi Kementerian Investasi/BKPM di OSS, nilai prosentase realisasi didapat dengan menggunakan range tertinggi sebagai pembandingan.
3. Range tertinggi dari target realisasi investasi setiap tahunnya kemungkinan akan berubah sesuai dengan target yang ditentukan DPMPTSP DIY setiap tahun, sedangkan range bawah dari target realisasi telah ditentukan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dari tabel 3.6 dapat dilihat bahwa capaian realisasi investasi terbesar di Kota tahun 2023 ada di sektor hotel dan restoran dengan realisasi investasi per sektor sebesar Rp 417.835.701.510,40 atau sebesar 48,45% dari total realisasi investasi Kota Yogyakarta, disusul sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan realisasi investasi per sektor sebesar Rp 154.261.503.688,78 atau sebesar 17,89% dari total realisasi investasi Kota Yogyakarta dan diposisi ketiga ada sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan realisasi investasi per sektor sebesar Rp 90.068.539.995,74 atau sebesar 10,44% dari total realisasi investasi Kota Yogyakarta. Dari akumulasi tersebut dapat diidentifikasi besarnya penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 655.606.400.000,00 dengan jumlah realisasi tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.497 tenaga kerja dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 206.818.006.597,00 dengan jumlah realisasi tenaga kerja Indonesia sebanyak 637 tenaga kerja dengan rincian per sektor sebagai berikut:

PMDN

Jumlah Realisasi Investasi		Jumlah Realisasi Tenaga Kerja Indonesia
Rp655,606,400,000.00		1497
Nama Sektor	Jumlah Realisasi Investasi	
Hotel dan Restoran	Rp352,979,200,000.00	
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp90,064,100,000.00	
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp80,390,300,000.00	
Perdagangan dan Reparasi	Rp79,046,100,000.00	
Jasa Lainnya	Rp31,769,700,000.00	
Konstruksi	Rp14,280,600,000.00	
Industri Makanan	Rp6,218,700,000.00	
Industri Kertas dan Percetakan	Rp537,800,000.00	
Industri Lainnya	Rp195,700,000.00	
Listrik, Gas dan Air	Rp104,200,000.00	
Industri Tekstil	Rp20,000,000.00	
Grand Total	Rp655,606,400,000.00	

Tabel 3.9 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2023

PMA

Jumlah Realisasi Investasi		Jumlah Realisasi Tenaga Kerja Indonesia
Rp206,818,006,597.00		637
Nama Sektor	Jumlah Realisasi Investasi	
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp73,871,203,688.78	
Hotel dan Restoran	Rp64,856,501,510.40	
Industri Makanan	Rp30,292,614,788.90	
Industri Kertas dan Percetakan	Rp20,233,067,266.84	
Jasa Lainnya	Rp8,925,869,070.12	
Perdagangan dan Reparasi	Rp6,831,672,235.25	
Industri Lainnya	Rp1,802,638,040.96	
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp4,439,995.74	
Grand Total	Rp206,818,006,597.00	

Tabel 3.10 Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2023

3.2.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan

Realisasi anggaran Belanja Daerah tercapai 96%, belanja operasi sebesar 96,10% dan belanja modal sebesar 98,89% yang terdiri dari 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan. Adapun data selengkapnya dapat di lihat pada kolom dibawah ini:

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Jenis Belanja	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
1	Belanja Operasi	11.758.774.633,00	11.300.164.235,00	96,10%
2	Belanja Modal	1.204.532.050,00	1.191.132.050,00	98,89%

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program dan Kegiatan	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.121.701.413,00	9.670.526.900,00	96%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.739.500,00	47.739.500,00	100,00%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	4.950.951.500,00	4.588.557.275,00	92,68%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.985.750,00	25.584.250,00	98,45%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.344.250,00	6.259.250,00	98,66%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.027.445.492,00	1.019.840.181,00	99,26%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.152.932.050,00	1.139.532.050,00	98,84%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.143.904.159,00	1.132.481.800,00	99,00%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.766.398.712,00	1.707.988.594,00	96,69%
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.248.698.770,00	1.236.430.985,00	99,02%
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang dan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	629.322.250,00	627.591.165,00	99,72%
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	619.376.520,00	608.839.820,00	98,30%
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	787.182.750,00	787.182.750,00	100,00%
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	787.182.750,00	787.182.750,00	100,00%
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	606.504.000,00	599.170.400,00	98,79%
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	606.504.000,00	599.170.400,00	98,79%

5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	199.219.750,00	197.519.750,00	99,15%
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.219.750,00	197.519.750,00	99,15%

Penjelasan Pencapaian Kinerja per kegiatan untuk:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terdiri dari 7 sub kegiatan, terealisasi sebesar Rp 47.739.500,00 atau sebesar 100% dari target, semua kegiatan terserap 100%.
- b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terdiri dari 7 sub kegiatan terealisasi sebesar Rp 4.588.557.275,00 atau 92,68% dari target dikarenakan pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp 4.576.300.775,00 (93% dari target) karena adanya 3 orang PNS yang pensiun, 1 pegawai mutasi ke instansi lain dan penambahan 1 pegawai PPPK masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp 1.707.988.594,00 atau 96,69% dari target, karena adanya selisih harga BBM antara perencanaan dengan realisasi harga BBM di pasaran, adanya penghematan BBM untuk kendaraan dinas dan adanya penyesuaian tarif retribusi STNK roda 2 dan roda 4.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang dan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp 627.591.165,00 atau 99,72% dari target, hal ini karena adanya sisa negosiasi dengan pihak penyedia.
- b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp 608.839.820,00 atau 98,30% dari target, hal ini karena adanya sisa negosiasi dengan pihak penyedia.

Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp 787.182.750,00 atau 100% dari target sehingga semua kegiatan terserap 100%.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan terealisasi sebesar Rp 599.170.400,00 atau 98,79% dari

target, adanya sisa DAK yang tidak terserap karena adanya narasumber DPRD yang tidak hadir pada saat sosialisasi dan harga BBM yang fluktuatif berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp 197.519.750,00 atau 99,15% dari target, hal ini karena ada sisa negosiasi dengan penyedia.

Sedangkan capaian program untuk masing-masing indikator dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13 Realisasi Capaian Indikator Program
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Nama Program	Indikator	Target	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	237 investor baru	237 investor baru
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur 2. Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	86% 95%	87.03% 100%
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	18.80%	61.63%
5	Program Pengelolaan	Persentase ketepatan		

	Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	dalam proses pemenuhan permohonan data	80%	100%
--	---	--	-----	------

Pada tabel 3.13 terkait capaian indikator pada setiap program dapat dijelaskan sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat berhasil meraih nilai A berdasarkan hasil penilaian atas SAKIP tahun 2022. Hasil penilaian SAKIP tahun 2021 sebesar 82,14 dengan predikat A meningkat di tahun 2022 dengan hasil penilaian SAKIP tahun 2022 sebesar 83,86 dengan predikat A. Peningkatan nilai ini didukung dengan adanya koordinasi dan evaluasi internal yang rutin dilaksanakan di tingkat dinas untuk dapat mengevaluasi dan mendorong penyerapan anggaran dan realisasi fisik agar dapat terealisasi sesuai dengan tatakala. Selain itu, adanya komitmen dari struktural terkait penyusunan LKIP tahun 2022 dengan adanya penyelenggaraan rapat finalisasi penyusunan LKIP tahun 2022 dapat membantu memberikan saran dan usulan dalam penyusunan LKIP tahun 2022. Koordinasi dan evaluasi terkait penyusunan LKIP Tahun 2023 semakin ditingkatkan dengan harapan nilai yang didapatkan bisa meningkat lebih baik lagi.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Jumlah Investor Baru dengan target 237 investor baru dapat dicapai dengan angka realisasi sebesar 237 investor baru. Hal ini disebabkan karena:

- a. Adanya peraturan yang mendorong kemudahan investasi antara lain:
 - 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha;
 - 3) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Yogyakarta;
 - 4) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - 5) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan.
- b. Adanya Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi.
- c. Adanya promosi investasi melalui beberapa wadah antara lain pameran

investasi, pengelolaan promosi melalui sosial media, pembuatan video dan foto promosi investasi, podcast serta sosialisasi Perizinan Berusaha, sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan, Sosialisasi Promosi Investasi, dan Sosialisasi Mal Pelayanan Publik.

- d. Adanya layanan Aplikasi Cek Poin Jogja (dapat memantau potensi investasi kota Yogyakarta).
- e. Adanya Sistem Mal Pelayanan Publik Digital dan sudah diresmikan pada tanggal 20 Juni 2023.
- f. Kemudahan proses perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS.

Program Pelayanan Penanaman Modal

Pada Program Pelayanan Penanaman Modal terdapat 2 indikator yaitu Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur dengan target 86% tercapai 87,03% dan Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti dengan target 95% tercapai 100%. Beberapa faktor yang mendorong tercapainya realisasi tersebut antarlain tersedianya layanan pendampingan secara tatap muka melalui loket DPMPTSP maupun melalui Helpdesk WA Perizinan DPMPTSP Kota Yogyakarta terkait proses perizinan dan non perizinan, adanya koordinasi antara internal bidang DPMPTSP dan petugas pengampu/OPD Teknis, tersedianya Forum Penyelesaian Permasalahan perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh pemohon, adanya Tim Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan, Pelaksanaan Proses permohonan Perizinan dan non Perizinan Terintegrasi melalui <https://perizinanonline.jogjakota.go.id> dan <https://jss.jogjakota.go.id>, adanya sarana konsultasi, informasi, dan pengaduan yang sudah disediakan melalui surat langsung ke OPD, email, WA, kotak pengaduan, aplikasi JSS dan Loker Pelayanan KIP DPMPTSP sehingga masyarakat/pemohon dapat melakukan konsultasi, informasi, dan pengaduan melalui berbagai sarana yang telah disediakan dan adanya koordinasi antara internal bidang DPMPTSP dan petugas pengampu/OPD Teknis dalam penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh pemohon yang diwadahi dalam RAKON TAKON.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat antarlain beberapa pengaduan yang masuk sering kali tentang OPD teknis karena masyarakat/pemohon belum banyak yang mengetahui harus kemana mereka saat mengajukan pertanyaan atau aduan sehingga pengaduan ditujukan ke DPMPTSP, namun oleh DPMPTSP dijembatani agar pengaduan bisa ditindaklanjuti oleh OPD teknis.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdapat indikator yaitu Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM dengan target 18,80% tercapai 61,63%. Capaian pada program ini lebih tinggi daripada target yang telah ditentukan. Hal ini didukung dengan tersedianya layanan pendampingan baik melalui tatap muka maupun melalui Helpdesk WA OSS DPMPTSP

Kota Yogyakarta terkait dengan proses perizinan berusaha dan kendala perizinan berusaha, tersedianya layanan pendampingan penyampaian LKPM (Laporan kegiatan Penanaman Modal) kepada Pelaku Usaha, tersedianya Forum Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal, adanya kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dan Bimbingan Teknis penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diselenggarakan DPMPTSP kepada pelaku usaha, adanya tim koordinasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dengan Keputusan Walikota Nomor 187 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, adanya Tim Koordinasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Keputusan Walikota Nomor 147 Tahun 2023, pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi melalui sistem OSS, adanya koordinasi rutin internal bersama dengan perangkat daerah teknis di Pemerintah Kota Yogyakarta, provinsi maupun kementerian, sudah diberlakukannya sanksi otomatis pada sistem oss rba kepada pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya menyampaikan LKPM 2 periode pelaporan dan didapatkannya DAK non fisik fasilitasi penanaman modal untuk program pengendalian pelaksanaan PM.

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdapat indikator Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data dengan target 80% tercapai 100%. Hal ini didukung tersedianya sarana, prasana dan pengelompokan data informasi yang lengkap.

3.2.3 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 3.14 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Dibandingkan dengan batas maksimal capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	318.966.195.786 s/d 733.200.000.000	862.424.406.597,00	117,62%*

Catatan:

1. Target Kinerja dari Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Sumber data data rilis realisasi investasi Kementerian Investasi/BKPM di OSS , nilai prosentase realisasi didapat dengan menggunakan range tertinggi sebagai pembanding.
3. Range tertinggi dari target realisasi investasi setiap tahunnya kemungkinan akan berubah sesuai dengan target yang ditentukan DPMPTSP DIY setiap tahun, sedangkan range bawah dari target realisasi telah ditentukan melalui Keputusan Sasaran Strategis Perangkat Daerah meningkatnya nilai investasi dengan indikator sasaran nilai investasi di targetkan sebesar Rp 318.966.195.786 s/d Rp 733.200.000.000 (Target Kinerja dari Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang

Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta) dan Realisasi investasi Tahun 2023 mencapai Rp 862.424.406.597,00 (menggunakan sumber data rilis realisasi investasi dari Kementerian Investasi/BKPM yang telah dirilis di OSS) atau sebesar 117,62% jika diprosentasekan dengan nilai target batas atas nilai realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp 733.200.000.000,00. Dilihat dari range target realisasi investasi sebesar Rp 318.966.195.786 s/d Rp 733.200.000.000 capaian DPMPTSP sebesar Rp 862.424.406.597,00 yang artinya **telah tercapai** karena lebih tinggi dari batas maksimal *range* target.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2022), realisasi investasi tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini terjadi karena adanya penambahan personil dalam menjalankan tupoksi pendampingan, pembinaan dan pengawasan serta adanya sosialisasi dengan mengundang para pelaku usaha di Kota Yogyakarta, sehingga banyak pelaku usaha yang wajib LKPM mulai mentaati kewajibannya untuk menjalankan kewajiban lapor LKPM yang ditahun sebelumnya belum dijalankan serta adanya peningkatan kapasitas pelayanan investasi dengan didukung semua program penunjang capaian sasaran investasi. Selain itu, dukungan promosi investasi melalui pameran investasi dan promosi investasi melalui publikasi diberbagai media sosial turut menunjang kenaikan investasi di Kota Yogyakarta.

3.2.4 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan Capaian Kinerja tahun 2019-2022

Sedangkan untuk sasaran strategi dan indikator sasaran ditahun 2019-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian kinerja 2023 dengan Capaian Kinerja tahun 2019-2022

Tahun	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)
2019	Nilai Investasi Meningkat	Nilai Investasi	297.219.308.847	306.219.082.711	103,03%
2020	Nilai Investasi Meningkat	Nilai Investasi	302.272.037.097	243.232.320.000	80,46%
2021	Nilai Investasi Meningkat	Nilai Investasi	288.151.242.774	248.673.816.754	86,30%
2022	Nilai Investasi Meningkat	Nilai Investasi	308.015.205.801	428.457.147.957	139,10%
2023	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	318.966.195.786 s/d 733.200.000.000	862.424.406.597,00	117,62%

Catatan:

1. Target Kinerja dari Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Sumber data data rilis realisasi investasi Kementerian Investasi/BKPM di OSS , nilai prosentase realisasi didapat dengan menggunakan range tertinggi sebagai pembanding.
3. Range tertinggi dari target realisasi investasi setiap tahunnya kemungkinan akan berubah sesuai dengan target yang ditentukan DPMPTSP DIY setiap tahun, sedangkan range bawah dari target realisasi telah ditentukan melalui Keputusan

3.2.5 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target terakhir rencana strategis

Tabel 3.16 Realisasi Kinerja 2023 dengan target terakhir Renstra

Indikator Sasaran	Target Tahun 2023	Target akhir Rencana strategis	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai Investasi	318.966.195.786 s/d 733.200.000.000	358.674.020.272 s/d 733.200.000.000	862.424.406.597,00	Sasaran Strategi meningkatnya nilai investasi dengan indikator sasaran nilai investasi di targetkan sebesar 318.966.195.786 s/d 733.200.000.000 (berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta) dan terealisasi sebesar Rp 862.424.406.597,00 (data rilis realisasi dari Kementerian Investasi/BKPM di OSS) atau 117,62% (nilai prosentase realisasi didapat dengan menggunakan range tertinggi sebagai pembanding) adanya penambahan personil dalam menjalankan tupoksi pendampingan, pembinaan dan

				pengawasan serta adanya sosialisasi dengan mengundang para pelaku usaha di Kota Yogyakarta, sehingga banyak pelaku usaha yang wajib LKPM mulai mentaati kewajibannya untuk menjalankan kewajiban lapor LKPM yang ditahun sebelumnya belum dijalankan serta adanya peningkatan kapasitas pelayanan investasi dengan didukung semua program penunjang capaian sasaran investasi.
--	--	--	--	--

3.2.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Tabel 3.17 Perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional

Indikator Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Standar Nasional	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai Investasi	318.966.195.786 s/d 733.200.000.000	862.424.406.597,00	-	-

Perbandingan realisasi kinerja terkait realisasi investasi tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional. Hal ini disebabkan karena tidak adanya target investasi yang dibuat Nasional untuk ditujukan kepada Kota Yogyakarta. Target investasi diberikan oleh Presiden kepada Kementrian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp 1.400 T. Oleh Kementrian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) target investasi *breakdown* ke masing-masing Direktorat Wilayah yang ada di Indonesia. Mengutip dari Materi Konsolidasi perkembangan data realisasi penanaman modal wilayah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Seluruh Kalimantan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dijelaskan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam Direktorat Wilayah II dengan target Rp 2.820.000.000.000,00 terhadap total Target Nasional (Rp 1.400T). Oleh karena itu, perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dapat kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 3.18 Perbandingan realisasi Kinerja dengan realisasi Provinsi dan Nasional

Indikator Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi DIY Tahun 2023	Realisasi Nasional Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai Investasi	318.966.195.786 s/d 733.200.000.000	862.424. 406.597,00	5.291.599. 968.885,00	1.418.900.000. 000.000,00

Catatan:

1. Kolom (2) Target Kinerja dari Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Kolom (3) Sumber data data rilis realisasi investasi dari Kementerian Investasi/BKPM dari OSS
3. Kolom (4) Realisasi dari Kementerian Investasi/BKPM dari OSS
4. Kolom (5) Realisasi Nasional.

Tabel 3.19 Prosentase Realisasi Investasi terhadap capaian Provinsi dan Nasional

Indikator Sasaran	Target Renstra	Realisasi terhadap Target Renstra	% terhadap Realisasi Renstra	% terhadap Realisasi DIY	% terhadap Realisasi Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Investasi	318.966.195.786 s/d 733.200.000.000	862.424. 406.597,00	117,62%	16,30%	0,061%

Catatan:

1. Kolom (2) Target Kinerja dari Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Kolom (3) Sumber data data rilis realisasi investasi dari Kementerian Investasi/BKPM dari OSS
3. Kolom (4) Prosentase terhadap realisasi renstra diprosentasekan dari realisasi investasi Kota Yogyakarta tahun 2023 TW III dibagi target investasi pada renstra tahun 2023-2026
4. Kolom (5) Prosentase Realisasi Investasi Kota Yogyakarta terhadap Realisasi Investasi DIY diprosentasekan dari realisasi investasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 dibagi realisasi investasi DIY Tahun 2023
5. Kolom (6) Prosentase Realisasi Investasi Kota Yogyakarta terhadap Realisasi Nasional diprosentasekan dari realisasi investasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 dibagi realisasi investasi Nasional

Pada tabel 3.18 dan tabel 3.19 dapat kita lihat besarnya capaian realisasi investasi Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2023 mencapai Rp 5.291.599.968.885,00,00 atau sebesar 187,65% dari target Rp 2.820.000.000.000,00 (target yang diberikan Nasional). Pada besarnya capaian realisasi tersebut, Kota Yogyakarta mengambil bagian sebesar Rp 862.424.406.597,00 di tahun 2023 atau sebesar 16,30% dari capaian realisasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan capaian realisasi investasi nasional mampu mencapai Rp 1.418.900.000.000.000,00 di tahun 2023 dimana Kota Yogyakarta mengambil bagian sebesar Rp 862.424.406.597,00 di tahun 2023 atau sebesar 0,061% jika dibandingkan dengan tahun 2023 Nasional.

3.2.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- a. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja, dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan;
- c. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;

- d. Beberapa kegiatan surat menyurat dilaksanakan melalui e-office (*paperless*).
- e. SOP dan SPP yang telah siap dipublikasikan tidak lagi dicetak melainkan dibagikan melalui file PDF dan disebarluaskan ke OPD Teknis dan Kemantren.
- f. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin dan yang benar-benar perlu pemeliharaan/penggantian suku cadang.

3.2.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian:

- Capaian masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Capaian Program

No.	Program	Capaian Kinerja	
		fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	96%
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%	99,02%
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	100%	100%
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	98,79%
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	99,15%

(sumber: SIM Pelaporan Bulan Desember 2023 dan laporan keuangan Tahun 2023)

Dari ke 5 (lima) program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023 jika dilihat dari realisasi fisik, seluruh program telah tercapai 100%, sedangkan untuk realisasi keuangan semua program yang capaiannya di atas 90%. Salah satu penyebab realisasi keuangan tidak dapat terserap seluruhnya karena adanya selisih harga dengan harga pasar dan sisa nego dengan penyedia.

b. Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian:

- Capaian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21 Capaian Kegiatan

No.	Kegiatan	Capaian Kinerja	
		Fisik	Keuangan
1	2	3	4
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	100%	92,68%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	98,45%

4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	98,66%
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	99,26%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	98,84%
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	99,00%
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	96,69%
9.	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang dan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,72%
10.	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100%	98,30%
11.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%
12.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	98,79%
13.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,15%

(sumber: SIM Pelaporan Bulan Desember 2023 dan laporan keuangan Tahun 2023)

Dari uraian diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa 13 (tiga belas) kegiatan semuanya mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja. Capaian kinerja dari program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi tolak ukur untuk pemberian reward dan punishment yang untuk saat ini sudah diberikan dalam bentuk TPP.

Lebih lengkapnya dapat dilihat pada hasil Evaluasi Rencana Kerja tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir.

3.2.9 Analisa faktor-faktor penghambat dan pendorong peningkatan/penurunan kinerja

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan yang dihadapi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Penyebab Keberhasilan:

- a. Optimalisasi penggunaan Anggaran Tahun 2023 dengan penyerapan anggaran

- mencapai 96% dengan predikat Kinerja Sangat Tinggi;
- b. Adanya komitmen dari semua pejabat struktural dan fungsional di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
 - c. Optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
 - d. Terbentuknya Mal Pelayanan Publik sebagai pusat pelayanan administrasi publik di Kota Yogyakarta.
 - e. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kewajiban Penyampaian LKPM oleh pelaku usaha.
 - f. Berlakunya Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
 - g. Berlakunya Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Nonperizinan.
 - h. Koordinasi dan evaluasi rutin yang dilaksanakan setiap bulan dan triwulan sebagai upaya pemantauan realisasi kegiatan.
 - i. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.
 - j. Dibentuknya tim pengawasan berdasarkan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - k. Dibentuknya tim verifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - l. Dilakukan kunjungan identifikasi permasalahan dan pendampingan kepada pelaku usaha yang mengalami permasalahan perizinan berusaha OSS berbasis risiko.
 - m. Dihadirkannya Narasumber yang kompeten dalam Forum Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal untuk membantu menyelesaikan permasalahan pelaku usaha mengenai perizinan berusaha
 - n. Adanya sarana konsultasi, informasi dan pengaduan melalui surat langsung ke Perangkat Daerah, email, WA, Kotak Pengaduan, Aplikasi JSS dan Loker Pengaduan.
 - o. Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan melalui aplikasi *perizinanonline*.
 - p. Penyelenggaraan kearsipan menggunakan sistem digital.
 - q. Tersedianya data dan informasi investasi di aplikasi Cek Poin Jogja.
 - r. Optimalisasi Loker PTSP sebagai upaya pelayanan konsultasi, informasi dan pengaduan perizinan dan non perizinan bagi seluruh masyarakat Kota Yogyakarta

yang membutuhkan.

- s. Adanya penambahan sarana prasarana yang tersedia sebagai upaya optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- t. Optimalisasi penggunaan aplikasi *Print From Home* (PFH) untuk kemudahan dalam mengurus perizinan dan non perizinan.
- u. Melakukan pengembangan pengintegrasian pelayanan online (PFH) dengan sistem pelayanan yang lain.
- v. Adanya penambahan personil pranata komputer di Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.
- w. Pelimpahan aplikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian sehingga membantu dalam proses koordinasi dengan pihak ketiga.

Penyebab Kegagalan:

- a. Masih terdapat pelaku usaha yang masih belum memahami tata cara penyampaian LKPM melalui OSS.
- b. Admin LKPM dari pelaku usaha/perusahaan yang sering berganti personil tanpa dibekali informasi tentang pelaporan LKPM oleh admin sebelumnya.
- c. Beragam permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memproses perizinan berusaha di OSS.
- d. Pelaku usaha khususnya skala UMK yang sudah memiliki NIB tapi belum melakukan migrasi/update data usaha.
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pengawasan sehingga BAP hasil pengawasan tidak dapat disampaikan langsung kepada pelaku usaha.
- f. Beberapa Pelaku usaha belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
- g. Pada saat kunjungan identifikasi penyelesaian permasalahan, pelaku usaha belum mengetahui update regulasi terbaru mengenai perizinan berusaha OSS berbasis risiko.
- h. Ada beberapa permasalahan yang dialami pelaku usaha yang tidak dapat diselesaikan dalam forum tersebut disebabkan adanya faktor lainnya, misal pelaku usaha belum melakukan pembaharuan legalitas perusahaan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga/stakeholder terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di MPP;

- b. Melakukan koordinasi secara intens dengan Perangkat Daerah teknis terkait perizinan dan non perizinan, Untuk kelancaran pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Melakukan sosialisasi, konsultasi publik, pendampingan, dan konsinyering dengan mengundang calon investor/pelaku usaha terkait kemudahan perizinan berusaha;
- d. Melakukan sosialisasi dan pendampingan dengan para calon investor/pelaku usaha terkait dengan kewajiban pelaporan LKPM;
- e. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi data dengan OPD Teknis di daerah dan Kementerian yang berwenang terkait izin dasar;
- f. Penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Loker Pelayanan dan RAKON TAKON;
- g. Membuka loket khusus layanan konsultasi dan pendampingan OSS (*Online Single Submission*) di Mall Pelayanan Publik;
- h. Meningkatkan kualitas SDM dengan *workshop*, bimtek, dan diikuti diklat teknis terkait pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- i. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana penunjang fasilitas inklusi;
- j. Mengusulkan penambahan SDM sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- k. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada.

3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar Rp 12.490.830.785,00 atau 96% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran tersebut didalamnya sudah termasuk realisasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN.

Anggaran belanja apabila di rinci antara belanja gaji dan non gaji yaitu anggaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 4.936.151.000,00 sedangkan anggaran non gaji sebesar Rp 8.027.155.683,00. Realisasi anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 4.576.300.775,00 dari total anggaran sebesar Rp 4.936.151.000,00 atau sebesar 93% dari total anggaran gaji sedangkan realisasi anggaran non gaji sebesar Rp 7.914.530.010,00 tau sebesar 98,60% dari total anggaran sebesar Rp 8.027.155.683,00.

Anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp 2.841.605.270,00 yang terdiri dari program pengembangan iklim penanaman modal, program pelayanan penanaman modal, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan program pengelolaan data dan sistem informasi dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 2.820.303.885,00 atau sebesar 99,25%, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar Rp 10.121.701.413,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.670.526.900,00 atau sebesar 95,54% dari anggaran. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan (100%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

(98,79%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN DPMPTSP Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	Prosentase
1	Gaji dan Tunjangan ASN	4.936.151.000,00	4.576.300.775,00	92,70%

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Belanja Non Gaji DPMPTSP Tahun 2023

No	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.185.550.413	5.094.226.125	98,24%
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.739.500	47.739.500	100,00%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.258.000	2.258.000	100,00%
2	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	2.860.000	2.860.000	100,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2.798.750	2.798.750	100,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	32.520.750	32.520.750	100,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	2.798.750	2.798.750	100,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2.425.250	2.425.250	100,00%

	SKPD			
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.078.000	2.078.000	100,00%
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.800.500	14.800.500	100,00%
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.506.500	2.506.500	100,00%
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.267.000	3.267.000	100,00%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.753.000	1.753.000	100,00%
11	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.836.000	1.836.000	100,00%
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	2.894.000	2.894.000	100,00%
13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.544.000	2.544.000	100,00%
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.985.750	25.584.250	98,45%
14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.793.500	5.791.500	99,97%
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.854.750	5.783.250	98,78%
16	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3.546.000	3.470.000	97,86%
17	Rekonsiliasi dan	3.729.750	3.695.500	99,08%

	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.525.750	3.477.000	98,62%
19	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3.536.000	3.367.000	95,22%
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.344.250	6.259.250	98,66%
20	Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	6.344.250	6.259.250	98,66%
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.027.445.492	1.019.840.181	99,26%
21	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.059.000	52.969.000	99,83%
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	397.411.236	394.360.785	99,23%
23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	127.536.700	125.625.923	98,50%
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	115.729.450	115.580.350	99,87%
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.240.106	2.980.000	91,97%
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.469.000	328.297.123	99,34%
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.152.932.050	1.139.532.050	98,84%
27	Pengadaan Mebel	355.749.700	351.924.700	98,92%
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	797.182.350	787.607.350	98,80%
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1.143.904.159	1.132.481.800	99,00%

	Pemerintahan Daerah			
29	Penyediaan Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	100,00%
30	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listirk	16.500.000	16.500.000	100,00%
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.123.404.159	1.111.981.800	98,98%
I.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.766.398.712	1.707.988.594	96,69%
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	245.253.000	216.062.750	88,10%
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.000.000	6.995.800	99,94%
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	190.766.500	189.101.400	99,13%
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.323.379.212	1.295.828.644	97,92%
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.248.698.770	1.236.430.985	99,02%
36	Penetapan Pemberian Fasilitas/instensif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	629.322.250	627.591.165	99,72%

37	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Penanaman Modal	629.322.250	627.591.165	99,72%
II.9	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	619.376.520	608.839.820	98,30%
38	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	619.376.520	608.839.820	98,30%
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	787.182.750	787.182.750	100,00%
III.10	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	787.182.750	787.182.750	100,00%
39	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	560.456.750	560.456.750	100,00%
40	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	124.088.000	124.088.000	100,00%
41	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	102.638.000	102.638.000	100,00%
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	606.504.000	599.170.400	98,79%

IV.11	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	606.504.000	599.170.400	98,79%
42	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan PM	430.130.000	423.784.400	98,52%
43	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	176.374.000	175.386.000	99,44%
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	199.219.750	197.519.750	99,15%
V.12	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.219.750	197.519.750	99,15%
44	Pengelolaan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	199.219.750	197.519.750	99,15%

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	318.966.195.786 s/d 733.200.000.000	862.424.406.597,00	117,62%	2.841.605.270,00	2.820.303.885,00	99,25%

Catatan:

- 1.Target Kinerja dari Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Sumber data: data rilis realisasi investasi dari Kementerian Investasi/BKPM di OSS, nilai prosentase realisasi didapat dengan menggunakan range tertinggi sebagai pembandingan.
3. Range tertinggi dari target realisasi investasi setiap tahunnya kemungkinan akan berubah sesuai dengan target yang ditentukan DPMPSTSP DIY setiap tahun, sedangkan range bawah dari target realisasi telah ditentukan melalui Keputusan

Tabel 3.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	318.966.195.786 s/d 733.200.000.000	862.424.406.597,00	117,62%	2.841.605.270,00	2.820.303.885,00	99,25%
Total Belanja Langsung	Nilai Investasi	318.966.195.786 s/d 733.200.000.000	862.424.406.597,00	117,62%	2.841.605.270,00	2.820.303.885,00	99,25%

Catatan : 1. Anggaran adalah anggaran per sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta

- 2.Target Kinerja dari Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Sumber data: data rilis realisasi investasi TW 1 dari Kementerian Investasi/BKPM di OSS, nilai prosentase realisasi didapat dengan menggunakan range tertinggi sebagai pembandingan.
4. Range tertinggi dari target realisasi investasi setiap tahunnya kemungkinan akan berubah sesuai dengan target yang ditentukan DPMPSTSP DIY setiap tahun, sedangkan range bawah dari target realisasi telah ditentukan melalui Keputusan

3.3.1 Analisis Efisiensi

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik sebesar 117,62% dengan penyerapan anggaran kurang dari dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi dan ada efisiensi.

Apabila dicermati secara lebih dalam pada realisasi belanja masing-masing

program, maka dapat dicermati sebagai berikut:

Tabel 3.26 Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	117,62%	99,25%	18,37%
-	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru		99,02%	18,60%
-	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur		100%	17,62%
		Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti			
-	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM		98,79%	18,83%
-	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data		99,15%	18,47%

Pada tabel 3.26 menampilkan realisasi masing-masing program utama dan pendukung capaian kinerja. Seluruh program utama dan pendukung memiliki realisasi anggaran yang baik. Meskipun anggaran tidak terserap 100%, namun kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan.

Efisiensi anggaran pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar 18,60% karena terdapat efisiensi pada belanja makan minum rapat dan sisa negosiasi dengan pihak ketiga terkait belanja sewa bangunan gedung kantor untuk pameran

investasi.

Efisiensi anggaran pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 18,83% karena terdapat efisiensi atas harga bahan bakar dan pelumas disebabkan harga BBM yang fluktuatif serta adanya penyesuaian honor narasumber yang hadir pada sosialisasi.

Efisiensi anggaran pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar 18,47% karena terdapat efisiensi atas sisa hasil negosiasi pada jasa fumigasi dan alih media scan.

Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi yaitu pelayanan perizinan secara *online* sehingga menghemat biaya telekomunikasi, beberapa kegiatan surat menyurat menggunakan *e-office* dan penghematan penggunaan sarana prasarana.

3.4 Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2023 ini, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:

1. Inovasi *Print From Home* (PFH)

Print From Home adalah layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta secara online (aplikasi digital) dengan proses mulai dari pembuatan akun sampai dengan pencetakan produk layanan dilakukan secara mandiri oleh pemohon melalui Portal Perizinan Online atau Jogja Smart Service (JSS) dengan tidak terbatas ruang dan waktu sehingga pemohon tidak perlu melakukan kunjungan ke Gerai Pelayanan Publik.

Layanan *Print From Home* diterapkan dalam rangka melaksanakan Inovasi Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. *Print From Home* diterapkan terutama sebagai kontribusi Pemerintah Daerah pada proses penyiapan tatanan kehidupan baru dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19).

Sasaran Layanan *Print From Home* adalah meningkatkan pelayanan publik serta mewujudkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. *Print From Home* sebagai inovasi daerah diharapkan mampu membentuk City Branding Kota Yogyakarta dan meningkatkan marwah inovasi di Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Untuk menyertai Layanan *Print From Home*, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta menerapkan protokol kerja melalui Surat Edaran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Yogyakarta Nomor 440/1485 tentang Himbauan Dalam Rangka Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Kunjungan Gerai Pelayanan Publik (Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19) Nomor 15/KEP/DPMP/2020.

Layanan *Print From Home* dapat diakses melalui Portal Perizinan Online di alamat <https://www.perizinanonline.jogjakota.go.id> dan melalui Portal Jogja Smart Service (JSS) di alamat <https://www.jss.jogjakota.go.id> yang juga dapat diakses melalui Aplikasi JSS berbasis Android.

Adapun prosedur penggunaan Layanan *Print From Home* adalah pembuatan akun, pendaftaran layanan, proses verifikasi layanan, hasil produk layanan terbit yang dapat dicetak sendiri secara mandiri oleh pengguna Layanan *Print From Home*.

Tujuan dari Layanan *Print From Home* adalah:

- Proses Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang efektif dan efisien.

Layanan *Print From Home* menjadikan proses layanan Perizinan dan Non Perizinan tidak perlu dilakukan dengan tatap muka dan datang ke Gerai Pelayanan Publik. Konsultasi terkait Layanan *Print From Home* juga dapat dilakukan secara jarak jauh dan secara online melalui media e-mail, aplikasi Whatsapp, dan telepon. Merealisasikan tahapan tatanan normal baru dalam rangka pencegahan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam COVID-19 dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 270 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Coronavirus Disease (COVID-19) di Kota Yogyakarta, Layanan *Print From Home* berkontribusi dalam pelaksanaan tatanan kehidupan baru melalui efektivitas dan efisiensi proses Perizinan dan Non Perizinan yang dilakukan pemohon tanpa perlu datang langsung ke Gerai Pelayanan Publik sehingga pencegahan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) dapat dilakukan.

Manfaat dari Layanan *Print From Home* adalah:

- Proses Perizinan dan Non Perizinan dapat dilakukan oleh pemohon kapanpun dan dari manapun.

Layanan *Print From Home* secara online melalui media digital menjadikan proses Perizinan dan Non Perizinan dapat dilakukan oleh pemohon kapanpun dan dari manapun tanpa harus melakukan kunjungan tatap muka ke Gerai Pelayanan Publik.

- Berkurangnya pemohon yang datang ke Gerai Pelayanan Publik.

Layanan *Print From Home* yang dapat dilakukan dari manapun dan kapanpun oleh pemohon secara otomatis menjadikan pemohon yang datang ke Gerai Pelayanan Publik menjadi berkurang.



Gambar 3.1 Print From Home

2. Inovasi Cek Poin Jogja

Bahwa saat ini keterbukaan informasi publik yang terintegrasi di sektor investasi di Kota Yogyakarta dalam memutuskan untuk berinvestasi di Kota Yogyakarta sangat membutuhkan referensi terkait potensi investasi di Kota Yogyakarta. Untuk menyediakan bahan referensi potensi investasi di Kota Yogyakarta tersebut, dirancanglah suatu aplikasi informasi potensi investasi yang menyediakan data investasi yang interaktif, komprehensif dan mudah diakses oleh para calon investor yang bermanfaat bagi calon investor.

Saat ini keterbukaan informasi publik yang terintegrasi di sektor investasi sangat diperlukan. Pada saat ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta belum tersedia sistem informasi investasi yang mudah, interaktif dan komprehensif yang berbasis *android dan IOS* yang terintegrasi dengan *Jogja Smart Service (JSS)*. Kondisi yang diharapkan adalah adanya aplikasi *android dan IOS* yang terintegrasi dengan *Jogja Smart Service (JSS)* yang berisi informasi investasi daerah yang komprehensif dan mudah. Untuk mewujudkan hal tersebut, **Inovasi** yang dilakukan adalah membuat aplikasi *android dan IOS* tentang informasi potensi investasi yang terintegrasi dengan *Jogja Smart Service (JSS)* yang interaktif dan komprehensif dan mudah.

Tujuan yang ingin dicapai adalah menyediakan media informasi terkait potensi investasi yang komprehensif, terpadu dan mudah diakses. Sedangkan **manfaat** yang ingin didapat adalah para calon investor dapat secara cepat memutuskan untuk berinvestasi di Kota Yogyakarta sehingga dapat meningkatkan nilai investasi di Kota Yogyakarta.



Gambar 3.2 Cek Poin Jogja

3. Inovasi ACM

Salah satu kemudahan pelayanan perizinan yang ada di DPMPTSP adalah Layanan *Print From Home (PFH)*. *Print From Home (PFH)* adalah layanan pengurusan perizinan dan non perizinan yang produknya bisa dicetak secara mandiri oleh pemohon. Bagi pemohon yang tidak memiliki print sendiri bisa mencetak di Anjungan Cetak Mandiri yang berada di lingkungan Mal Pelayanan Publik (MPP) di DPMPTSP.

Mekanisme penggunaan ACM:

- a. Melakukan pengurusan perizinan sesuai prosedur jenis layanan yang ada di DPMPTSP.
- b. Pemohon akan mendapatkan QR Code / Nomor Daftar yang dapat digunakan untuk mencetak dokumen perizinan yang sudah selesai diproses di Anjungan Cetak Mandiri di lingkungan DPMPTSP. Pemohon hanya perlu memasukkan nomor daftar atau scan QR Code maka dokumen perizinan akan tercetak.
- c. Dokumen perizinan yang sudah pernah dicetak di Anjungan Mandiri tidak bisa di cetak kembali di lain waktu.



Gambar 3.3 Alat Cetak Mandiri

4. SIADI (Sistem Arsip Digital)

Sistem Arsip Digital (SIADI) merupakan system yang digunakan untuk mempermudah pengguna untuk mencari berkas arsip yang dibutuhkan. Saat ini SIADI baru digunakan untuk berkas Izin Membangun Bangunan (IMB) yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Alat yang digunakan untuk menunjang SIADI diantaranya kartu, alat yang ada dilemari, gun (alat untuk mencari/ menscan berkas), handphone yang sudah didukung NFC.

Cara kerjanya adalah pencari berkas memasukan Nomor SK IMB yang akan dicari ke website smart arsip (SIADI) <https://smartarsip.jogja.kotapintar.id/> . Kemudian system akan mencari lemari letak arsip tersebut berada. Kemudian alat yang menempel di lemari akan bunyi untuk menandakan arsip tersebut berada. Selanjutnya gunakan gun atau handphone yang sudah dibekali NFC untuk menscan berkas yang berada di lemari yang berbunyi.



Gambar 3.4 SIADI

5. SIM DOK

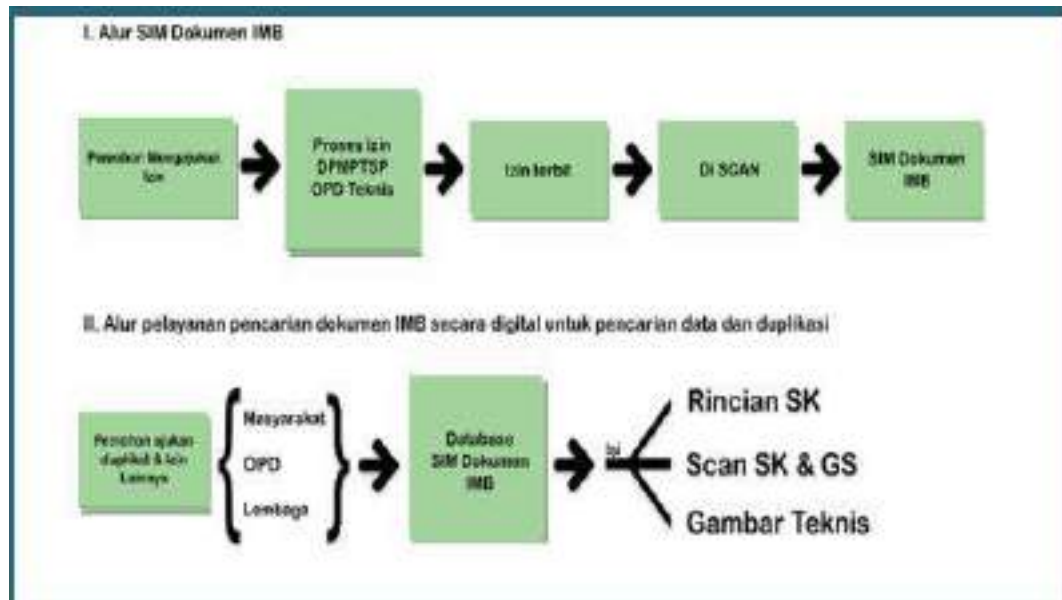
Kebutuhan untuk memperoleh informasi yang cepat, akurat dan tepat waktu merupakan hal yang tidak dapat dihindari sehingga salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta adalah meningkatkan efektivitas dan kemudahan dalam penemuan kembali data perizinan. Permasalahan yang dihadapi adalah semakin banyaknya berkas arsip data perizinan yang secara fisik harus ditata secara manual dalam ruang arsip perizinan dan secara elektronik didokumentasikan melalui proses Scan Dokumen Gambar Pada Berkas IMB sehingga data Izin terpenuhi secara lengkap dalam Aplikasi secara Digital. Oleh sebab itu, Sistem Informasi Manajemen Dokumen IMB (SIM DOK IMB) hadir untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

SIM DOK IMB adalah Sistem Informasi Manajemen Dokumen IMB. Sistem ini di buat dengan tujuan untuk memindahkan atau mengalihmediakan arsip IMB yang telah terbit menjadi suatu data digital yang dapat diolah dan dipergunakan dengan mudah. SIM DOK IMB ini berisi informasi yang meliputi : Data Nomor SK, Tanggal SK Nama Pemohon, Lokasi Pemohon, Nilai Sertifikat, Nilai Retribusi, Keluasan Peruntukan Izin.

Tujuan Di luncurkan SIM DOK IMB antara lain menyediakan informasi IMB secara digital, terbangunnya kumpulan data dalam satu aplikasi, menciptakan arsip SK IMB dan arsip penting lainnya dalam bentuk soft file dan mempermudah dan mempercepat pelayanan data masyarakat.

Manfaat SIM DOK IMB antara lain meningkatkan pelayanan masyarakat dan instansi pemerintah, memudahkan dalam pencarian data dan informasi izin, memudahkan dalam pengecekan arsip SK, mempermudah pengelolaan data dan mempercepat layanan duplikat.

Alur SIM DOK IMB



Gambar 3.5 Alur SIM DOK IMB



Gambar 3.6 SIM DOK IMB

6. KOPI JOSS

KOPI JOSS merupakan ide inovatif berbasis konsultasi tatap muka dan konsultasi online melalui whatsapp chatbot yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, untuk optimalisasi layanan Informasi dan konsultasi Perizinan Berusaha OSS RBA. Inovasi tersebut merupakan layanan informasi dan konsultasi melalui Online dan Offline (tatap muka). Adapun layanan konsultasi online dalam bentuk chatbot, atau layanan informasi yang secara otomatis direspon oleh sistem. Untuk mengakses layanan ini, pengguna layanan bisa menghubungi Whatsapp Customer Service OSS Kota Yogyakarta di nomor 0811 3050 1443. Sedangkan layanan offline dalam bentuk loket informasi dan konsultasi mengenai perizinan berusaha berbasis risiko di Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta.

Inovasi ini berdampak signifikan terutama dengan adanya KOPI JOSS sebagai media informasi dan konsultasi, pelaku usaha dapat mendapatkan informasi perizinan

berusaha berbasis risiko secara mudah, cepat, dimanapun dan kapanpun. Karena sebelumnya, dalam memperoleh informasi mengenai panduan perizinan berusaha berbasis risiko pelaku usaha dapat menghubungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta melalui telepon atau datang langsung. Namun, petugas belum mampu memberikan respon secara cepat karena petugas tersebut memiliki banyak ketugasan yang lain. Hal ini secara tidak langsung menghambat pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha berbasis risiko sehingga pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memiliki legalitas.

KOPI JOSS merupakan jawaban dari kebingungan dan keluhan masyarakat seiring berlakunya konsep perizinan berusaha yang terbaru yakni penetapan jenis Perizinan Berusaha berdasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Sebab pada dasarnya, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelah persyaratan terpenuhi). Untuk mengimplementasikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut, tentu saja perlu langkah strategis dari Pemerintah agar masyarakat dapat mudah memahami perizinan berusaha.

Pada awalnya layanan konsultasi dilayani melalui telepon dan kegiatan sosialisasi, namun sejalan dengan waktu, pelayanan dikembangkan menggunakan aplikasi Whatsapp Chatbot dan Layanan Konsultasi Tatap Muka melalui Loker OSS.

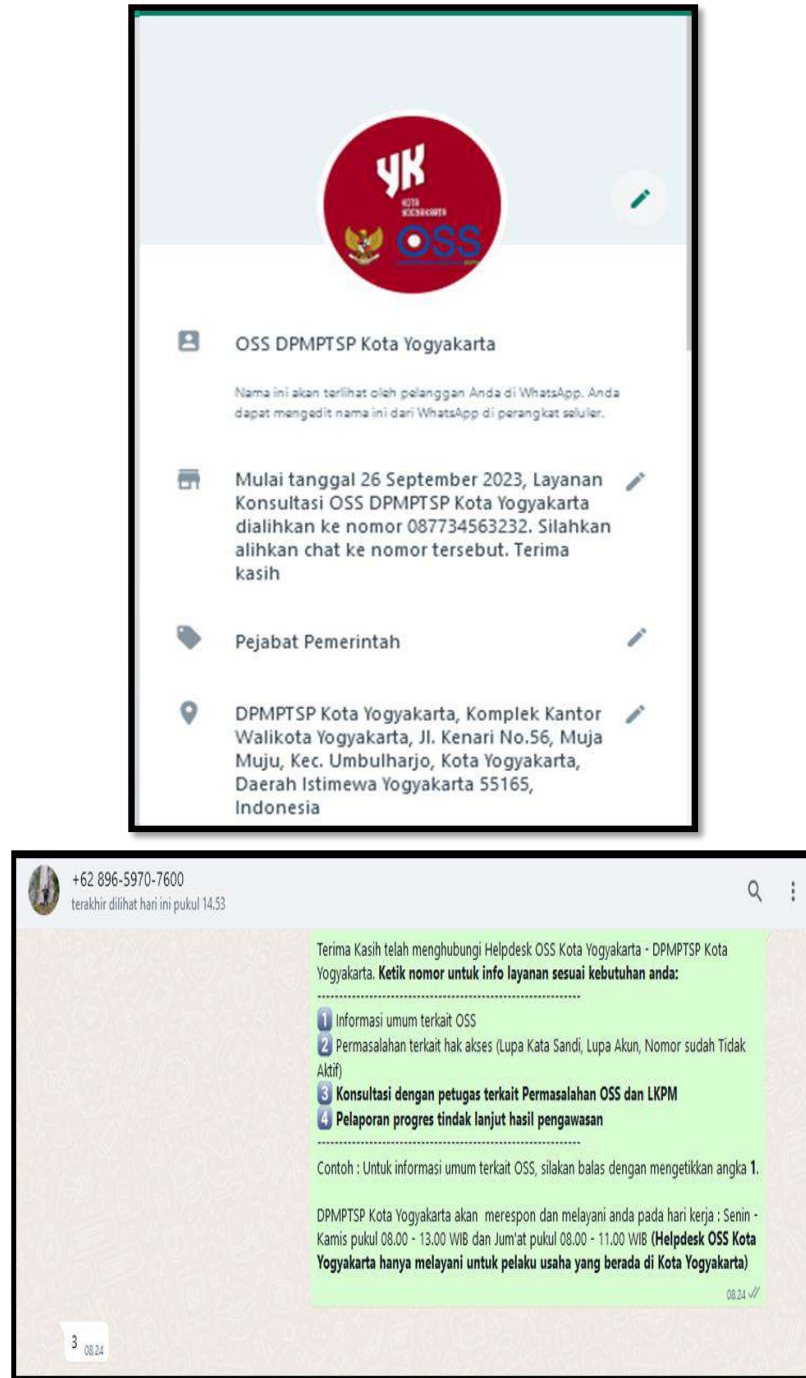
Adapun menu layanan yang tersedia pada layanan KOPI JOSS antara lain :

- a. Layanan Online melalui Whatsapp Chatbot
 - 1) Informasi umum terkait OSS
 - a) Cara pendaftaran Hak Akses, Panduan Migrasi Data OSS 1.1 ke OSS RBA, dan Penggantian Hak Akses
 - b) Informasi terkait kegiatan usaha/kode KBLI
 - c) Informasi terkait PB UMKU
 - d) Informasi pembuatan peta polygon
 - 2) Permasalahan terkait OSS dan LKPM
 - a) Permasalahan lupa kata sandi, lupa akun, email sudah tidak aktif, nomor sudah tidak aktif
 - b) Konsultasi dengan petugas terkait permasalahan lainnya terkait OSS dan LKPM
- b. Layanan Offline melalui Tatap Muka Loker OSS
Konsultasi dengan petugas terkait permasalahan terkait OSS dan LKPM

Adapun tujuan inovasi KOPI JOSS yaitu terwujudnya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang praktis, cepat dan responsif, terwujudnya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan memperkuat hubungan antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat

Kesesuaian dengan kategori :

Ide utama dari layanan KOPI JOSS adalah menjadikan akses pelayanan konsultasi dan informasi perizinan berusaha OSS Berbasis Risiko menjadi lebih cepat, aktual dan mudah dijangkau bagi pelaku usaha.



Gambar 3.7 Kopi Joss

3.5 Kolaborasi lintas sektor

Sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik maka diperlukan adanya kolaborasi lintas sektor dan lembaga. Mal Pelayanan Publik (MPP) dirancang oleh KEMENPAN RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, penyederhaan dan prosedur serta integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik.

Seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Swasta, Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ swasta yang bergabung dalam Mal Pelayanan Publik berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Yogyakarta yang mempunyai kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan mendukung dan sepakat untuk melaksanakan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Mal Pelayanan Publik. Kewenangan yang menyelenggarakan MPP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta. Beberapa mitra kerjasama dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) antarlain:

1. Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta
2. Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Yogyakarta
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA
6. Kepolisian Resor Yogyakarta
7. Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta
8. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja
9. PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
10. PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
11. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Yogyakarta

BAB 4

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Rencana Tindak Lanjut

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke-1 dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target- target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya Nilai Investasi”, dengan indikator Nilai Investasi tahun n, realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah Rp 862.424.406.597,00 sebesar 117,62%.
2. Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 862.424.406.597,00 dengan efisiensi anggaran sebesar 18,37%.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik melalui kerjasama dengan instansi/lembaga yang memberikan layanan publik;
- b. Koordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta terkait permasalahan Update mapping RDTR OSS, Koordinasi dengan Kementerian Investasi /BKPM terkait permasalahan yang dihadapi pelaku usaha;
- c. Meningkatkan promosi investasi melalui Kerjasama UMK serta melakukan promosi investasi melalui Podcast, Sosialisasi, dan Pameran;
- d. Melaksanakan kajian untuk penyusunan naskah akademik dan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha;
- e. Melaksanakan kajian untuk penyusunan kajian akademik dan Peraturan Walikota tentang perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan serta RUPM;
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan penanaman modal berupa Sosialisasi Perizinan Berusaha, Bimbingan Teknis LKPM, dan Pendampingan untuk pelaku usaha;
- g. Melaksanakan kegiatan pengawasan penanaman modal yaitu Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan inspeksi lapangan;
- h. Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman

modal dan penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan;

- i. Peningkatan pelayanan konsultasi informasi dan pengaduan secara terintegrasi;
- j. Upgrade aplikasi *Print From Home* secara terintegrasi;
- k. Optimalisasi digitalisasi arsip dan aplikasi SIADI (Sistem Arsip Digital);
- l. Perlu adanya penyederhanaan pelaporan dan pengiriman laporan secara terpadu;
- m. Perlu dilakukan inspeksi pengawasan secara terintegrasi untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha;
- n. Proses dokumen pemenuhan komitmen perlu koordinasi dengan Instansi Teknis terkait pelimpahan izin (alur, form, pengesahan rekomendasi, integrasi jika Instansi tersebut telah memiliki sistem);
- o. Peningkatan kapasitas pelayanan investasi dengan didukung semua program penunjang capaian sasaran investasi;

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi
- Lampiran 2. Realisasi Investasi
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Lampiran 4. Pengukuran Kinerja 2023
- Lampiran 5. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJIP Tahun Sebelumnya
- Lampiran 6. Lampiran SK Penghargaan dan Reward
- Lampiran 7. Realisasi APBD TA 2023
- Lampiran 8. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun Anggaran 2023
- Lampiran 9. Penghargaan yang diterima
- Lampiran 10. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Lampiran 1

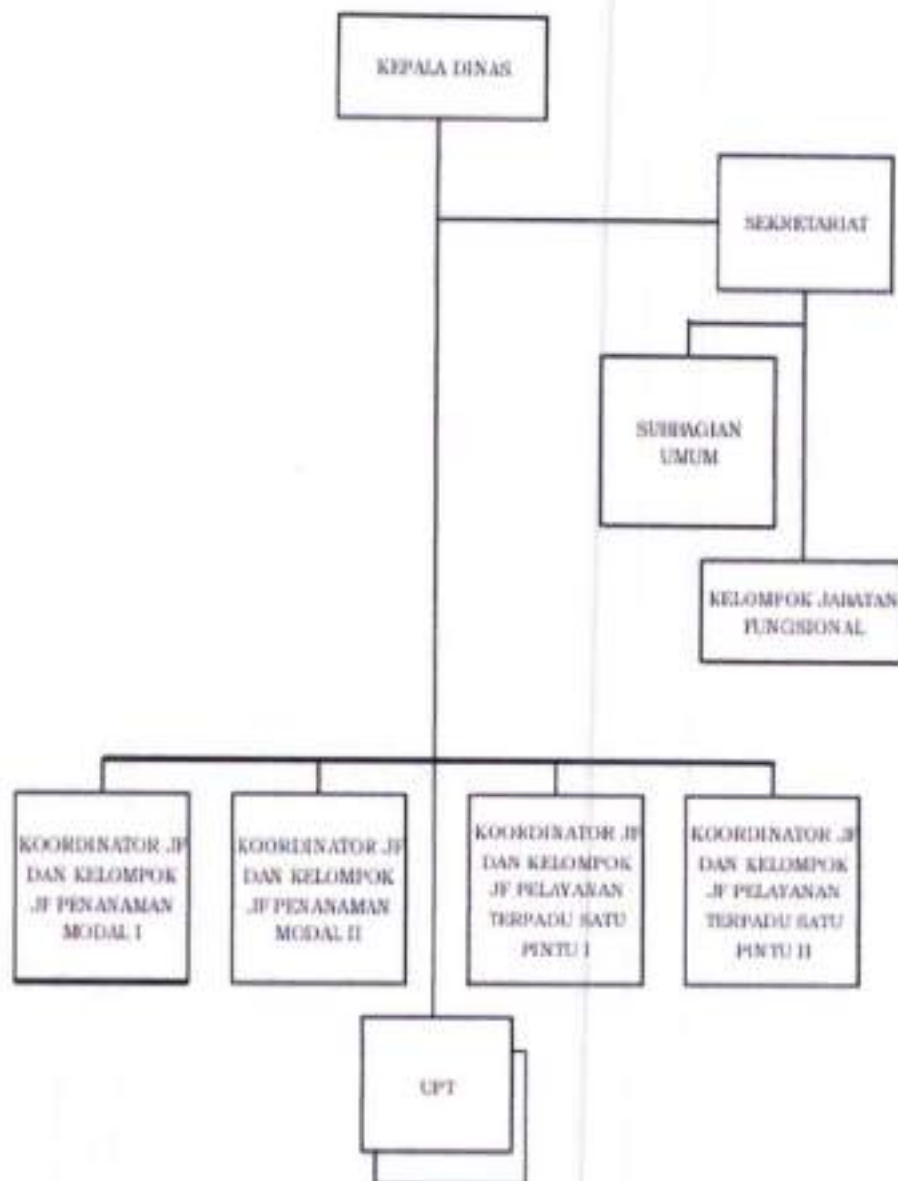
Struktur Organisasi

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Walikota No. 37 Tahun 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

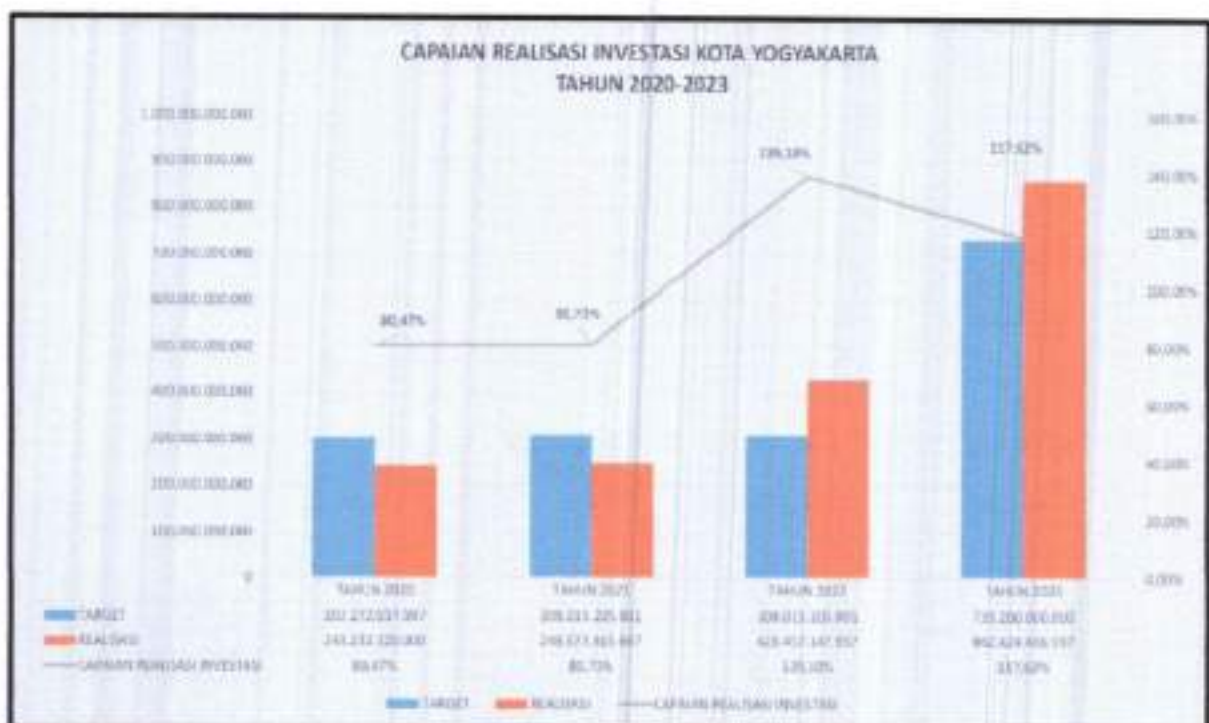


Lampiran 2
Realisasi Investasi Tahun 2023

Lampiran 2. Realisasi Investasi

REALISASI INVESTASI KOTA YOGYAKARTA PER TRIWULAN BERDASARKAN RILIS KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM					
PERIODE PENYAMPAIAN LKPM	REALISASI INVESTASI	AKUMULASI	TARGET REALISASI INVESTASI TAHUN 2023	% REALISASI INVESTASI DARI TARGET RANGE TERTINGGI	CAPAIAN TARGET REALISASI INVESTASI 2023
TW I	354.486.231.250,74	354.486.231.250,74	318.966.195.786 - 733.200.000.000	48,35%	TERCAPAI
TW II	159.597.469.979,75	514.083.701.230,49		70,12%	TERCAPAI
TW III	219.088.377.269,18	733.172.078.499,67		99,996%	TERCAPAI
TW IV	35.063.751.357,00	768.235.829.856,67		117,62%	TERCAPAI
REALISASI INVESTASI YANG DIKELUARKAN DARI DATA REALISASI INVESTASI KOTA YOGYAKARTA	64.054.345.487,00	862.424.406.597,00			

Sumber data : Data rilis realisasi investasi dari Kementerian Investasi/BKPM



Lampiran 3

Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦏꦺꦴꦪꦒꦏꦂꦠꦏꦤ꧀ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦤꦤꦠꦩꦺꦢꦏꦤ꧀ꦥꦼꦭꦪꦤꦠꦺꦫꦠꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
E-MAIL: gsmp@gsmp.yogyakarta.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: gsmp@yogamotd.go.id
WEBSITE: www.yogamotd.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI SANTOSA, S.STP, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SUMADI, S.H., M.H.

Jabatan : Pj. Walikota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, 09 JAN 2023

Pihak Kedua

SUMADI, S.H., M.H.
NIP. 197308261989031007

Pihak Pertama

BUDI SANTOSA, S.STP, M.Si
NIP. 197209141993031004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA**


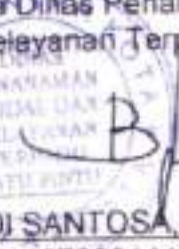
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi	319.966.195.786 Rupiah
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	81,75

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 9.562.359.356	APBD TA 2023
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 1.237.998.770	APBD TA 2023
3.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 759.430.750	APBD TA 2023
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 600.504.000	APBD TA 2023
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 199.219.750	APBD TA 2023
Jumlah Anggaran		Rp 12.359.512.626	APBD TA 2023

Yogyakarta, 09 JAN 2023


 Pj. Walikota Yogyakarta

SUNADI, S.H., M.H.
 NIP. 196308261989031007

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu


BUDI SANTOSA, S.STP, M.Si
 NIP. 197209141993031004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

สำนักงาน投资管理和服务中心
สำนักงาน投資管理和服务中心

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 555241, 515885, 562682 Fax (0274) 555241
E-MAIL: dpmtspp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ADMINISTRATOR SETARA ESELON III
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R. PRABOWO AGUNG SAMODRO, S.H.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : BUDI SANTOSA, S. STP, M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama



BUDI SANTOSA, S. STP, M.Si.

NIP. 197209141993031004

R. PRABOWO AGUNG SAMODRO, S.H.

NIP. 196601191993031004

PERJANJIAN KINERJA ADMINISTRATOR SETARA ESELON III
TAHUN 2023
DPMPTSP KOTA YOGYAKARTA

NO	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program dan Kegiatan)	Target
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A
1	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selesai	12 Dokumen
2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selesai	51 Laporan
3	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Barang Milik Daerah Selesai	33 Dokumen
4	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Selesai	12 Laporan
5	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai	12 Laporan
6	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Selesai	2 Laporan
7	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Selesai	4 Laporan
8	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Selesai	124 Unit

No	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.562.359.356	APBD TA 2023
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.739.500	APBD TA 2023
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.258.000	APBD TA 2023
	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RK-SKPD	2.860.000	APBD TA 2023
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RK-SKPD	2.798.750	APBD TA 2023
	4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	32.520.750	APBD TA 2023
	5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.798.750	APBD TA 2023
	6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2.425.250	APBD TA 2023
	7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.078.000	APBD TA 2023
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.829.056.350	APBD TA 2023
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.814.255.850	APBD TA 2023
	2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuanagn SKPD	2.506.500	APBD TA 2023
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.267.000	APBD TA 2023
	4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.753.000	APBD TA 2023
	5. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.836.000	APBD TA 2023
	6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester SKPD	2.894.000	APBD TA 2023

	7. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.544.000	APBD TA 2023
c.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.985.750	APBD TA 2023
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.793.500	APBD TA 2023
	2. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.854.750	APBD TA 2023
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3.546.000	APBD TA 2023
	4. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.729.750	APBD TA 2023
	5. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.525.750	APBD TA 2023
	6. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3.536.000	APBD TA 2023
d.	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	6.344.250	APBD TA 2023
	1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.344.250	APBD TA 2023
e.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	984.922.292	APBD TA 2023
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	50.534.000	APBD TA 2023
	2. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	384.369.236	APBD TA 2023
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	121.596.700	APBD TA 2023
	4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.713.250	APBD TA 2023
	5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	3.240.106	APBD TA 2023
	6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	330.469.000	APBD TA 2023

	dan Konsultasi SKPD		
f.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	962.947.700	APBD TA 2023
	1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	312.492.700	APBD TA 2023
	2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	650.455.000	APBD TA 2023
g.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.155.904.159	APBD TA 2023
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.000.000	APBD TA 2023
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.500.000	APBD TA 2023
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.123.404.159	APBD TA 2023
h.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.549.459.355	APBD TA 2023
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	245.253.000	APBD TA 2023
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.500.000	APBD TA 2023
	3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184.566.500	APBD TA 2023
	4. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.112.139.855	APBD TA 2023
	Jumlah Anggaran	9.562.359.356	APBD TA 2023

Yogyakarta, 10 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BUDI SANTOSA, S. STP, M.Si.
NIP. 197209141993031004

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

R. PRABOWO AGUNG SAMODRO, S.H.
NIP. 196601191993031004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

สำนักงาน投资管理和服务窗口
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562662 Fax (0274) 555241
E-MAIL: dpmpstp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS SETARA ESELON IV TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T.,M.Eng

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak **pertama**

Nama : R. PRABOWO AGUNG SAMODRO, S.H

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua


R. PRABOWO AGUNG SAMODRO, S.H
NIP. 196601191993031004

Pihak Pertama


ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T., M.Eng
NIP. 197604072005011010

PERJANJIAN KINERJA PENGAWASAN SETARA ESELON IV**TAHUN 2023****DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen
2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen
3.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan
4.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
5.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
6.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik SKPD	2 Dokumen
7.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen
8.	Penyediaan Kompeten Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23 Paket
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	102 Paket
10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan

14.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit
15.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Unit
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Jenis
21.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123 Unit
22.	Pemeriharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	:	Rp 25.985.750	APBD TA 2023
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	:	Rp 5.793.500	APBD TA 2023
b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	:	Rp 5.854.750	APBD TA 2023

c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	: Rp	3.546.000	APBD TA 2023
d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	: Rp	3.729.750	APBD TA 2023
e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	: Rp	3.525.750	APBD TA 2023
f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	: Rp	3.536.00	APBD TA 2023
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	: Rp	6.344.250	APBD TA 2023
a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	: Rp	6.344.250	APBD TA 2023
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	: Rp	984.922.292	APBD TA 2023
a. Penyediaan Kompeten Instalansi Listrik/Pencerangan Bangunan Kantor	: Rp	50.534.000	APBD TA 2023
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	: Rp	384.369.236	APBD TA 2023
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	: Rp	121.596.700	APBD TA 2023
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	: Rp	94.713.250	APBD TA 2023
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	: Rp	3.240.106	APBD TA 2023
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	: Rp	330.469.000	APBD TA 2023
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	: Rp	962.947.700	APBD TA 2023
a. Pengadaan Mebel	: Rp	312.492.700	APBD TA 2023
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	: Rp	650.455.000	APBD TA 2023
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	: Rp	1.155.904.159	APBD TA 2023
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	: Rp	16.000.000	APBD TA 2023

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	: Rp	16.500.000	APBD TA 2023
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	: Rp	1.123.404.159	APBD TA 2023
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	: Rp	1.549.459.355	APBD TA 2023
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	: Rp	245.253.000	APBD TA 2023
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	: Rp	7.500.000	APBD TA 2023
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	: Rp	184.566.500	APBD TA 2023
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	: Rp	1.112.139.855	APBD TA 2023
Jumlah Anggaran	: Rp	4.685.563.506	APBD TA 2023

Yogyakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua



R PRABOWO AGUNG SAMODRO, S.H
NIP. 196601191993031004

Pihak Pertama



ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T., M.Eng
NIP. 197604072005011010



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Wibawa Dan Keramahan Yogyakarta

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
E-MAIL: dpmpfts@yogyakarta.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: ppk@yogyakarta.go.id
WEBSITE: www.yogyakarta.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI SANTOSA, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SINGGIH RAHARJO, S.H,M.Ed.
Jabatan : Pj. Wali Kota Yogyakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, 01 NOV 2023

Pihak Kedua

SINGGIH RAHARJO, S.H,M.Ed.

Pihak Pertama

BUDI SANTOSA, S.STP, M.Si
NIP. 197209141993031004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi	318.966.195.786 - 733.200.000.000 Rupiah
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	B

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 10.121.701.413	PERUBAHAN APBD TA 2023
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 1.248.698.770	PERUBAHAN APBD TA 2023
3.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 787.182.750	PERUBAHAN APBD TA 2023
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 606.504.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 199.219.750	PERUBAHAN APBD TA 2023
Jumlah Anggaran		Rp 12.963.306.683	PERUBAHAN APBD TA 2023

Yogyakarta, 01 NOV 2023

Pj. Wali Kota Yogyakarta


SINGGIH RAHARJO, S.H.M.Ed.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu


BUDI SANTOSA, S.STP, M.Si
NIP. 197209141993031004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ADMINISTRATOR
SETARA ESELON III
TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA**

NO	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program dan Kegiatan)	Target
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A
1	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selesai	12 Dokumen
2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selesai	51 Laporan
3	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Barang Milik Daerah Selesai	33 Dokumen
4	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Selesai	12 Laporan
5	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai	12 Laporan
6	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Selesai	2 Laporan
7	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Selesai	4 Laporan
8	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Selesai	124 Unit

Pemerintah Daerah yang selesai tepat waktu		
--	--	--

No	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.121.701.413	PERUBAHAN APBD TA 2023
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.739.500	PERUBAHAN APBD TA 2023
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.258.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RK-SKPD	2.860.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RK-SKPD	2.798.750	PERUBAHAN APBD TA 2023
	4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.520.750	PERUBAHAN APBD TA 2023
	5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.798.750	PERUBAHAN APBD TA 2023
	6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2.425.250	PERUBAHAN APBD TA 2023
	7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.078.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.950.951.500	PERUBAHAN APBD TA 2023
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.936.151.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
	2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuanagn SKPD	2.506.500	PERUBAHAN APBD TA 2023
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.267.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
	4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.753.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
	5. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.836.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
	6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester SKPD	2.894.000	PERUBAHAN APBD TA 2023

	7. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.544.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
c.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.985.750	PERUBAHAN APBD TA 2023
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.793.500	PERUBAHAN APBD TA 2023
	2. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.854.750	PERUBAHAN APBD TA 2023
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3.546.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
	4. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.729.750	PERUBAHAN APBD TA 2023
	5. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.525.750	PERUBAHAN APBD TA 2023
	6. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3.536.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
d.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.344.250	PERUBAHAN APBD TA 2023
	1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.344.250	PERUBAHAN APBD TA 2023
e.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.027.445.492	PERUBAHAN APBD TA 2023
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	53.059.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
	2. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	397.411.236	PERUBAHAN APBD TA 2023
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	127.536.700	PERUBAHAN APBD TA 2023
	4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	115.729.450	PERUBAHAN APBD TA 2023
	5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	3.240.106	PERUBAHAN APBD TA 2023
	6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rangat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.469.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
f.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1.152.932.050	PERUBAHAN APBD TA 2023
	1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	355.749.700	PERUBAHAN APBD TA 2023

	2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	797.182.350	PERUBAHAN APBD TA 2023
g.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.143.904.159	PERUBAHAN APBD TA 2023
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.500.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.123.404.159	PERUBAHAN APBD TA 2023
h.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.766.398.712	PERUBAHAN APBD TA 2023
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	245.253.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.000.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
	3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.766.500	PERUBAHAN APBD TA 2023
	4. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.323.379.212	PERUBAHAN APBD TA 2023
Jumlah Anggaran		10.121.701.413	PERUBAHAN APBD TA 2023

Yogyakarta, 2 November 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

R. PRABOWO AGUNG SAMODRO, S.H.
NIP. 196601191993031004

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BUDI SANTOSA, S. STP, M.Si.
NIP. 197209141993031004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦤ꧀ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦥꦺꦤꦤꦩꦠꦏꦤ꧀ꦥꦼꦭꦪꦤꦠꦺꦫꦠꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241

E-MAIL: dpmptsp@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS SETARA ESELON IV TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T.,M.Eng

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak **pertama**

Nama : R. PRABOWO AGUNG SAMODRO, S.H

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 2 November 2023

Pihak Pertama

ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T., M.Eng
NIP. 197604072005011010

Pihak Kedua

R.PRABOWO AGUNG SAMODRO, S.H
NIP. 196601191993031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PENGAWASAN SETARA ESELON IV**TAHUN 2023****DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen
2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen
3.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan
4.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
5.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
6.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik SKPD	2 Dokumen
7.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen
8.	Penyediaan Kompeten Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25 Paket
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	112 Paket
10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	26 Paket
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan

14.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit
15.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Unit
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Jenis
21.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 Unit
22.	Pemeriharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	: Rp	25.985.750	PERUBAHAN APBD TA 2023
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	: Rp	5.793.500	PERUBAHAN APBD TA 2023
b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	: Rp	5.854.750	PERUBAHAN APBD TA 2023
c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	: Rp	3.546.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	: Rp	3.729.750	PERUBAHAN APBD TA 2023
e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	: Rp	3.525.750	PERUBAHAN APBD TA 2023
f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	: Rp	3.536.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	: Rp	6.344.250	PERUBAHAN APBD TA 2023
a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	: Rp	6.344.250	PERUBAHAN APBD TA 2023
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	: Rp	1.027.445.492	PERUBAHAN APBD TA 2023
a. Penyediaan Kompeten Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	: Rp	53.059.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	: Rp	397.411.236	PERUBAHAN APBD TA 2023
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	: Rp	127.536.700	PERUBAHAN APBD TA 2023
d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	: Rp	115.729.450	PERUBAHAN APBD TA 2023

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	: Rp	3.240.106	PERUBAHAN APBD TA 2023
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	: Rp	330.469.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	: Rp	1.152.932.050	PERUBAHAN APBD TA 2023
a. Pengadaan Mebel	: Rp	355.749.700	PERUBAHAN APBD TA 2023
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	: Rp	797.182.350	PERUBAHAN APBD TA 2023
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	: Rp	1.143.904.159	PERUBAHAN APBD TA 2023
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	: Rp	4.000.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	: Rp	16.500.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	: Rp	1.123.404.159	PERUBAHAN APBD TA 2023
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	: Rp	1.766.398.712	PERUBAHAN APBD TA 2023
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	: Rp	245.253.000	PERUBAHAN APBD TA 2023
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	: Rp	7.000.000	PERUBAHAN APBD TA 2023

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	: Rp	190.766.500	PERUBAHAN APBD TA 2023
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	: Rp	1.323.379.212	PERUBAHAN APBD TA 2023
Jumlah Anggaran	: Rp	5.123.010.413	PERUBAHAN APBD TA 2023

Pihak Kedua



R. PRABOWO AGUNG SAMODRO, S.H
NIP. 196601191993031004

Yogyakarta, 2 November 2023
Pihak Pertama



ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T., M.Eng
NIP. 197604072005011010

Lampiran 4

Pengukuran Kinerja 2023

**PENGUKURAN KINERJA
ADMINISTRATOR SETARA ESELON III
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Sekretaris

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan I		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan I		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	100		PROGRAM PENUNJANG LIBUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penylopan Bahan Tanggapan Pemeriksaan f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.562.359.356,00	1.531.434.072,00	15,89	

-Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b. Sub Kegiatan Pengamatan Barang Milik Daerah SKPD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
d. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
e. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
f. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

-Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

-Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

-Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perisnahan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Faktor Pendorong:

- Adanya tim penyusun LKP yang rutin berkoordinasi dan melakukan evaluasi tentang perbaikan data yang akan disajikan di LKP
- Adanya rapat koordinasi dan evaluasi yang rutin dilaksanakan oleh petinggi urusan, PPTK dan pejabat struktural
- Dibentuknya Tim Penyimpanan Database dan Media Sosial yang berkontribusi terhadap penyimpanan bank data yang disediakan untuk LKP dan publikasi dinas di website serta media sosial lainnya.
- Laporan tindak lanjut penyusunan skrip sudah dikirimkan ke inspektorat.

Uraian Permasalahan:

- Atas rekomendasi "Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" dari DPMPTSP masih menunggu informasi lebih lanjut dari Inspektorat terkait pedoman pelaksanaannya. Sehingga belum dilaksanakan tindakan lanjut terhadap LHE tersebut.
- Awal penyusunan LKIP Tahun 2022 telah disepakati menggunakan angka forecasting untuk pencantuman angka realisasi investasi namun oleh Inspektorat disarankan untuk melaksanakan perbaikan realisasi investasi menggunakan angka real yang telah dirilis oleh BKPM di bulan Februari 2022.

Rencana Tindak Lanjut:

- Pemenuhan Road Map Reformasi Birokrasi Unit Kerja sesuai dengan Road Map DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026
- Pemenuhan Road Map Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi sesuai dengan Road Map Tematik Unit Kerja Tahun 2023-2024
- Penjadwalan evaluasi sesuai dengan tematik
- Persiapan data pendukung RB yang dilaksanakan penlawan tiap Triwulan
- Meningkatkan penyajian capaian kinerja program pada LKIP berdasarkan pada data kinerja akumulasi dalam satu tahun evaluasi

Yogyakarta, 29 Desember 2023

Seorang Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Agung Setiawan, S.H.
NIP. 19660119199031004

**PENGUKURAN KINERJA
ADMINISTRATOR SETARA ESELON III
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Sekretaris

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan II		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan II		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	100		<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</p> <p>- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja</p> <p>a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD</p> <p>c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD</p> <p>d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</p> <p>e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</p> <p>f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Rptlnar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</p> <p>d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan</p> <p>f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p> <p>g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p> <p>- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>b. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>d. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>e. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD</p> <p>f. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>- Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai</p>	9.562.359.356,00	4.560.056.504,00	47,69	

						<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintah Daerah a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 				
						<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 				

Faktor Pendorong:

- Adanya tim penyusun LKP yang rutin berkoordinasi dan melakukan evaluasi tentang perbaikan data yang akan disajikan di LKP
- Adanya rapat koordinasi dan evaluasi yang rutin dilaksanakan oleh petugas urusan, PPTK dan pejabat struktural

Urutan Permasalahan:

- Awal penyusunan LKP Tahun 2022 telah disepakati menggunakan angka forecasting untuk pencantuman angka realisasi investasi namun oleh Inspektorat disarankan untuk melaksanakan perbaikan realisasi investasi menggunakan angka real yang telah di Re oleh BKPM di bulan Februari 2023
- Belum melakukan publikasi terkait dengan dokumen rencana perubahan tahun 2022

Rencana Tindak Lanjut:

- Pemenuhan Road Map Reformasi Birokrasi Unit Kerja sesuai dengan Road Map DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026
- Pemenuhan Road Map Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi sesuai dengan Road Map Tematik Unit Kerja Tahun 2023-2024
- Penjadwalan evaluasi sesuai dengan tematik
- Persiapan data pendukung KB yang dilaksanakan penilaian tiap Tribulan

Yogyakarta, 29 Desember 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Satu Pintu



**PENGUKURAN KINERJA
ADMINISTRATOR SETARA ESELON III
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Sekretaris

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan III		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan III		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	100		<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</p> <p>- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja</p> <p>a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD</p> <p>c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD</p> <p>d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</p> <p>e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</p> <p>f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>a. Sub Kegiatan Penyediaan Baji dan Tunjangan ASN</p> <p>b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</p> <p>d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemertiksaan</p> <p>f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p> <p>g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p> <p>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>a. Sub Kegiatan Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>b. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>d. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>e. Sub Kegiatan Pelelaksanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD</p> <p>f. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai</p>	9.562.359.356,00	6.542.465.213,00	68,42	

Faktor Pendorong:

- Adanya tim penyusun LKIP yang rutin berkoordinasi dan melakukan evaluasi tentang pertalkan data yang akan disajikan di LKIP
- Adanya rapat koordinasi dan evaluasi yang rutin dilaksanakan oleh petugas urusan, PPTK dan pejabat struktural
- Dibentuknya Tim Penyimpanan Database dan Media Sosial yang berkontribusi terhadap penyimpanan bank data yang disediakan untuk LKIP dan publikasi dinas di website serta media sosial lainnya.
- Laporan tindak lanjut penyusunan sapip sudah dikirimkan ke Inspektorat.

Urutan Permasalahan:

- Atas rekomendasi "Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" dan DPMPSTP masih menunggu informasi lebih lanjut dari Inspektorat terkait pedoman pelaksanaannya. Sehingga belum dilaksanakan tindakan lanjut terhadap LHE tersebut
- Awal penyusunan LKIP Tahun 2022 telah disepakati menggunakan angka forecasting untuk pencantuman angka realisasi investasi namun oleh Inspektorat disarankan untuk melaksanakan pertalkan realisasi investasi menggunakan angka real yang telah dirilis oleh BKPM di Bulan Februari 2023.

Rencana Tindak Lanjut:

- Pemenuhan Road Map Reformasi Birokrasi Unit Kerja sesuai dengan Road Map DPMPSTP Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026
- Pemenuhan Road Map Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi sesuai dengan Road Map Tematik Unit Kerja Tahun 2023-2024
- Penjadwalan evaluasi sesuai dengan tematik
- Persiapan data pendukung R8 yang dilaksanakan penilaian tiap Tri-bulan
- Meningkatkan penyajian capaian kinerja program pada LKIP berdasarkan pada data kinerja akumulasi dalam satu tahun evaluasi

Yogyakarta, 20 Desember 2023

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Agus Rohando, S.H.
NIP. 19620711198031004

**PENGUKURAN KINERJA
ADMINISTRATOR SETARA ESELON III
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Sekretaris

No	Seseran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan IV		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	100		<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran -Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD b. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD d. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD e. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD f. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD -Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 	30.121.701.413,00	9.670.526.900,00	95,543	

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Kompones Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Perawatan Rumah Tangga
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

-Kegiatan Pengadaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Faktor Pendukung:

- Adanya tim penyusun LKIP yang rutin berkoordinasi dan melakukan evaluasi tentang perbaikan data yang akan disajikan di LKIP
- Adanya rapat koordinasi dan evaluasi yang rutin dilaksanakan oleh perogan urusan, PPTK dan pejabat struktural
- Dibentuknya Tim Penyusunan Database dan Media Sosial yang berkontribusi terhadap penyempurnaan bank data yang disediakan untuk LKIP dan publikasi dinas di website serta media sosial lainnya
- Laporan tindak lanjut penyusunan talip sudah ditunjukkan ke Inspektorat.

Urutan Permasalahan:

- Atas rekomendasi "Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" dari DPMPTSP masih menunggu informasi lebih lanjut dari Inspektorat terkait pedoman pelaksanaannya. Sehingga belum dilaksanakan tindak lanjut terhadap LHE tersebut. Pada Sosialisasi Penyusunan LKIP Perangkat Daerah TA 2023 tgl 3 Januari 2023 dijelaskan bahwa tidak perlu merindakanjuti LHE ini karena pengisian SIMONEVA dan desk timbal balik di setiap triwulan merupakan bagian dari koordinasi dan evaluasi tingkat internal.
- Awal penyusunan LKIP Tahun 2022 telah disepakati menggunakan angka forecasting untuk pencantuman angka realisasi investasi namun oleh Inspektorat disarankan untuk melaksanakan perbaikan realisasi investasi menggunakan angka real yang telah dirilis oleh BAPM di bulan Februari 2023. Untuk tahun 2023, berdasarkan hasil desk timbal balik TW III disepakati menggunakan angka forecasting untuk realisasi investasi.

Rencana Tindak Lanjut:

- Pemenuhan Road Map Reformasi Birokrasi Unit Kerja sesuai dengan Road Map DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026
- Pemenuhan Road Map Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi sesuai dengan Road Map Tematik Unit Kerja Tahun 2023-2024
- Penjadwalan evaluasi sesuai dengan tematik
- Persiapan data pendukung RB yang dilaksanakan penilaian tiap Triwulan
- Nilai realisasi investasi dalam LKIP Tahun 2023 akan menggunakan angka forecasting sementara terlebih dahulu
- Akan mengeluarkan nilai investasi perusahaan XL dari nilai investasi kota Yogyakarta dalam LKIP karena secara riil telah berpindah daerah namun belum mengubah KBU.
- Menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung LKIP 2023 baik dokumen perencanaan, pengurusan maupun evaluasi serta memperhatikan hasil evaluasi LKIP tahun sebelumnya

Yogyakarta, 29 Desember 2023
Sekretaris Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan



**PENGUKURAN KINERJA
KOORDINATOR
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal I

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan I		Keterangan	Program	RAGU	Tahunan I		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Investor Baru Meningkat	Jumlah Investor Baru	257 Investor baru	Jumlah Investor Baru berdasarkan Laporan OSS (ditinjau dr NIB)	45 investor baru	27,83		PROGRAM PENDEMBANGSAAN IKLIM PENANAMAN MODAL - Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal - Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1.237.998.770,00	108.981.000,00	8,8	
<p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya peraturan yang mendorong kemudahan investasi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Yogyakarta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Adanya Mal Pelayanan Publik yang Terintegrasi Promosi investasi melalui: <ol style="list-style-type: none"> pameran investasi sosialisasi Perizinan Berusaha, sosialisasi Perizinan dan Non-Perizinan, Sosialisasi Promosi Investasi, dan Sosialisasi Mal Pelayanan Publik pengelolaan promosi melalui sosial media, pembuatan video dan foto promosi investasi Adanya layanan Aplikasi Cek Poin Jaga (dapat memeriksa potensi investasi kota Yogyakarta) <p>Urutan Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum adanya Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha Belum adanya Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perizinan dan Non-Perizinan yang menggantikan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sehingga Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan dianggap masih quit oleh masyarakat dan investor Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Sistem SibPPOM yang belum optimal Misalnya Informasi investasi sehingga masyarakat khususnya investor sulit mengembangkan usahanya <p>Rencana Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Akan dilakukan kajian Potensi Investasi dan IPRO di tahun 2024 Dalam rangka keberagaman perkembangan pelaksanaan baik agar lebih jelas dan sinkron dengan realisasi RAGU 												



**PENGUKURAN KINERJA
KOORDINATOR
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan I		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan II		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Investor Baru Meningkat	Jumlah Investor Baru	237 Investor baru	Jumlah Investor Baru berdasarkan laporan OSS (minal dan NIB)	117 investor baru	49,37		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 4.1. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal - Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 4.2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 4.3. Sub Kegiatan Penyelidikan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1.217.988.770,00	428.582.750,00	34,67	

Faktor Pendukung:

- Adanya peraturan yang mendorong kemudahan investasi, yaitu:
 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha
 - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Yogyakarta
 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
 - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
 - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan
- Adanya Mal Pelayanan Publik yang Terintegrasi
- Promosi Investasi melalui:
 - pameran investasi
 - sosialisasi Perizinan Berusaha, sosialisasi Perizinan dan Non-Perizinan, Sosialisasi Promosi Investasi, dan Sosialisasi Mal Pelayanan Publik
 - pengelolaan promosi melalui social media,
 - penyiaran video dan foto promosi investasi
 - podcast
 - Adanya layanan Aplikasi Cek Poti-Jogja (dapat memantau potensi investasi kota Yogyakarta)
 - SIMPPONI sudah dilaksanakan dan diberi nama MPP digital dan sudah di-launching tgl 18 Juni 2023

Daftar Permasalahan:

- Belum adanya Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha
- Belum adanya Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perizinan dan Non-Perizinan yang menggantikan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sehingga Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan dianggap masih sulit oleh masyarakat dan investor
- Masihnya informasi investasi sehingga masyarakat khususnya investor sulit mengembangkan usahanya

Rencana Tindak Lanjut:
- Akan dilakukan kajian Potensi Investasi dan IPRO di tahun 2024
- Dalam mengisi keterbatasan pelaksanaan trik agar lebih jelas dan terukur dengan realisasi baik

Yogyakarta, 29 Desember 2023

Koordinator Kelompok Substansi
Penanaman Modal



**PENGUKURAN KINERJA
KOORDINATOR
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan III		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan III		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Investor Baru Meningkat	Jumlah Investor Baru	237 investor baru	Jumlah Investor Baru berdasarkan Laporan OSS (Jurnal or NBB)	181 investor baru	76,37		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal - Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1.287.998.770,00	812.784.170,00	63,15	
<p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya peraturan yang mendorong kemudahan investasi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Yogyakarta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyalenggaraan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Adanya Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi Promosi Investasi melalui: <ol style="list-style-type: none"> pameran investasi socialisasi Perizinan Berusaha, socialisasi Perizinan dan Non Perizinan, Socialisasi Promosi Investasi, dan Socialisasi Mal Pelayanan Publik pengelolaan promosi melalui social media pembuatan video dan foto promosi investasi podcast Adanya layanan Aplikasi Cek Poin juga dapat memantau potensi investasi kota Yogyakarta SIMPON sudah dilaksanakan dan diberi nama MPP Digital dan sudah di launching tanggal 19 Juni 2023 Potensi unggulan investor baru (melalui perizinan OSS RBA) di kota Yogyakarta adalah sektor pariwisata, sehingga menjadi selaras dengan potensi investasi yang sedang dikembangkan oleh kota Yogyakarta. <p>Urutan Pemaksimalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> DPMPTSP dalam proses pembuatan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha Sempitnya lahan peronkiran di area wisata kota Yogyakarta. Akan dilakukan kajian Potensi Investasi dan IPRO di tahun 2024 <p>Rencana Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Akan dilakukan kajian Potensi Investasi dan IPRO di tahun 2024 Mensosialisasikan klinik rumah seadanya dan menindaklanjuti progress SOP perizinan dan non perizinan 												



**PENGUKURAN KINERJA
KOORDINATOR
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan IV		Ketercapaian	Program	Pagu	Triwulan IV		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
					6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah Investor Baru Meningkat	Jumlah Investor Baru	137 investor baru	Jumlah Investor Baru berdasarkan Laporan OSS (seluruh di NIB)	137 investor baru	100,00		PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM FINANSIAMAAN MODAL - Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal - Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1.248.488.170,00	1.236.430.980,00	99,02	

Faktor Pendorong:

1. Adanya peraturan yang mendorong kemudahan investasi, yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha
 - b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Yogyakarta
 - c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
 - d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
 - e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan
2. Adanya Mal Pelayanan Publik yang Terintegrasi
3. Promosi Investasi melalui:
 - a. pameran investasi
 - b. sosialisasi Perizinan Berusaha, sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan, Sosialisasi Promosi Investasi, dan Sosialisasi Mal Pelayanan Publik
 - c. pengelolaan promosi melalui sosial media,
 - d. pembuatan video dan foto promosi investasi
 - e. poster
4. Adanya layanan Aplikasi Cek Poin Iqqa (lapat memantau potensi investasi kota Yogyakarta)
5. SIMPPONI sudah dilaksanakan dan diberi nama MPP Digital dan sudah diluncurkan tgl 19 Juni 2023
6. Potensi unggulan investor baru (melalui perizinan OSS RBA) di kota Yogyakarta adalah sektor pariwisata, sehingga menjadi selaras dengan potensi investasi yang sedang dikembangkan oleh kota Yogyakarta

Urutan Permasalahan:

1. DPMPTSP dalam proses penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha
2. Sempitnya lahan parkir di area wisata kota Yogyakarta

Rencana Tindak Lanjut:

- Akan dilakukan kajian Potensi Investasi dan IPRO di tahun 2024
- Menindaklanjuti progress SOP perizinan dan non perizinan

Yogyakarta, 29 Desember 2023



**PENGUKURAN KINERJA
KOORDINATOR
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal II

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan I		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan I		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
					6	7		9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	18,8%	(jumlah investor dengan modal berkembang berdasarkan LKPM pada tahun n/ jumlah investor wajib LKPM yang telah lapor LKPM pada tahun n) x 100%	14,80%	89,36		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	800.504.000,00	68.280.650,00	11,371	

Faktor Pendorong:

- Tersedianya layanan pendampingan baik melalui tatap muka maupun melalui Helpdesk WA OSS DPMPTSP Kota Yogyakarta terkait dengan proses perizinan berusaha dan kendala perizinan berusaha.
- Tersedianya layanan pendampingan penyempalan LKPM (Laporan kegiatan Penanaman Modal) kepada Pelaku Usaha.
- Tersedianya Forum Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal.
- Adanya kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dan Bimbingan Teknis penyempalan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diselenggarakan DPMPTSP kepada Pelaku Usaha.
- Adanya Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Keputusan Walikota Nomor 146 Tahun 2023.
- Adanya Tim Koordinasi Verifikasi Pemenuhan Peryaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Keputusan Walikota Nomor 147 Tahun 2023.
- Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi melalui sistem OSS.
- Adanya koordinasi rutin internal bersama dengan Perangkat Daerah Teknis di Pemerintah Kota Yogyakarta, Provinsi maupun Kementerian.
- Mendapatkan DAK Non Fiskal Fasilitas Penanaman Modal untuk program pengendalian pelaksanaan PM.
- Inovasi Kopi Joss (Konsultasi Online Perizinan Investasi Jajga Online Single Submission) media konsultasi bagi investor terkait OSS.

Uraian Permasalahan:

- Rilis data dari BKPM yang mundur dari jadwal menjadi penghambat untuk perhitungan capaian karena tidak semua data LKPM dapat diolah melalui tampilan LKPM jika belum rilis resmi oleh BKPM sehingga angka yang ditampilkan adalah angka sementara di Bulan Maret 2023 sebelum rilis resmi oleh BKPM.
- Kegiatan usaha di Kota Yogyakarta lebih banyak yang sudah existing sehingga untuk pelaporan lebih banyak dengan nilai nihil (0) karena tidak ada penambahan modal.
- Pelaporan LKPM melalui sistem OSS sampai saat ini masih sering terdapat kendala sistem (sistem maintenance) sehingga menghambat Pelaku usaha.
- Ketidakefektifan pelaku usaha berkaitan dengan kewajiban penyempalan LKPM.
- Kurang patuhnya pelaku usaha berkaitan dengan kewajiban penyempalan LKPM.

Rencana Tindak Lanjut:

- Peningkatan kapasitas pelayanan investasi dengan didukung semua program pemunjang capaian sasaran investasi.
- Menggunakan angka yang disetujui BKPM unrealistic
- Melakukan koordinasi secara intensif terkait updating OSS RBA.

Yogyakarta, 29 Desember 2023



**PENGUKURAN KINERJA
KOORDINATOR
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Koordinator Kelompok Subtansi Penanaman Modal II

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan II		Keterangan	Program	Ragu	Triwulan II		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
					6	7			10	11	12	13
1	Meningkatkan Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	18,8%	(Jumlah investor dengan modal berkembang berdasarkan LKPM pada tahun n/ Jumlah investor wajib LKPM yang telah lapor LKPM pada tahun n) x 100%	51,68%	274,79		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	600.504.000,00	214.595.800,00	35,737	
<p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya layanan pendampingan baik melalui tatap muka maupun melalui helpdesk WA OSS DPMP1SP Kota Yogyakarta terkait dengan proses perizinan berusaha dan kendala perizinan berusaha. Tersedianya layanan pendampingan penyampaian LKPM (Laporan kegiatan Penanaman Modal) kepada Pelaku Usaha. Tersedianya Forum Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal. Adanya kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dan Bimbingan Teknik penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diselenggarakan DPMP1SP kepada Pelaku Usaha. Adanya Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Keputusan Walikota Nomor 183 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Adanya Tim Koordinasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Keputusan Walikota Nomor 147 Tahun 2023. Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi melalui sistem OSS. Adanya koordinasi rutin internal bersama dengan Perangkat Daerah Teknik di Pemerintah Kota Yogyakarta, Provinsi maupun Kementerian. Sudah diberlakukannya Sanksi Otomatis pada sistem OSS RBA kepada pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya menyampaikan LKPM 2 periode pelaporan. Mendapatkan DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal untuk program pengendalian pelaksanaan PM. Novasi Kopi Jess (Konsultasi Online Perizinan Investasi Jogja Online Single Submission) media konsultasi bagi investor terkait OSS. <p>Uraian Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rilis data realisasi investasi dari BKPM yang mundur dari jadwal menjadi penghambat untuk perhitungan capaian karena tidak semua data LKPM dapat dilihat melalui tampilan LKPM user Daerah jika belum rilis resmi oleh BKPM sehingga angka yang ditampilkan adalah angka rdb realisasi investasi BKPM. <p>Triwulan I Tahun 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaporan LKPM melalui sistem OSS sampai saat ini masih sering terdapat kendala sistem (sistem maintenance) sehingga menghambat Pelaku usaha. Ketidakhadiran pelaku usaha berkaitan dengan kewajiban penyampaian LKPM. Kurang patuhnya pelaku usaha berkaitan dengan kewajiban penyampaian LKPM. <p>Rencana Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas pelayanan investasi dengan didukung semua program penunjang capaian sasaran investasi Menggunakan angka yang diresmi BKPM unrealise Melakukan koordinasi secara intensif terkait updating OSS RBA. 												



**PENGUKURAN KINERJA
KOORDINATOR
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal II

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan II		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan III		Keberangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
					6	7		9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	18,8%	(Jumlah investor dengan modal berkembang berdasarkan LKPM pada tahun n/ Jumlah investor wajib LKPM yang telah lapor LKPM pada tahun n) x 100%	57,62%	307,50		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kawangmas Daerah Kabupaten / Kota a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	800.504.000,00	426.520.200,00	71,027	

Faktor Pendorong:

1. Tersedianya layanan pendampingan baik melalui tatap muka maupun melalui helpdesk WA OSS DPMPPTSP Kota Yogyakarta terkait dengan proses perizinan berusaha dan kendala perizinan berusaha.

2. Tersedianya layanan pendampingan penyampaian LKPM (Laporan kegiatan Penanaman Modal) kepada Pelaku Usaha.

3. Tersedianya Forum Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal.

4. Adanya kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dan Bimbingan Teknis penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diselenggarakan DPMPPTSP kepada Pelaku Usaha.

5. Adanya Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Keputusan Walikota Nomor 187 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

6. Adanya Tim Koordinasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Keputusan Walikota Nomor 147 Tahun 2023.

7. Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi melalui sistem OSS.

8. Adanya koordinasi rutin internal bersama dengan Perangkat Daerah Teknis di Pemerintah Kota Yogyakarta, Provinsi maupun Kementerian.

9. Sudah diberlakukannya Sanksi Otomatis pada sistem OSS RBA kepada pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya menyampaikan LKPM 2 periode pelaporan.

10. Mendapatkan DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal untuk program pengendalian pelaksanaan PM.

11. Inovasi kopi Joss (Konsultasi Online Perizinan Investasi juga Online Single Submission) media konsultasi bagi investor terkait OSS.

Graian Permasalahan:

1. Rilis data realisasi investasi dan BKPM yang mundur dari jadwal menjadi penghambat untuk perhitungan capaian karena tidak semua data LKPM dapat dilihat melalui tampilan LKPM user Daerah (jika belum rilis resmi oleh BKPM sehingga angka yang ditampilkan adalah angka rilis realisasi investasi BKPM).

Triwulan I Tahun 2023:

1. Pelaporan LKPM melalui sistem OSS sampai saat ini masih sering terdapat kendala sistem (sistem maintenance) sehingga menghambat Pelaku usaha.

2. Ketidakhahaman pelaku usaha berkaitan dengan kewajiban penyampaian LKPM.

4. Kurang patuhnya pelaku usaha berkaitan dengan kewajiban penyampaian LKPM.

Rencana Tindak Lanjut:

- Peningkatan kapasitas pelayanan investasi dengan dukungan semua program penunjang capaian sasaran investasi.

- Menggunakan angka yang disetujui BKPM unrealise.

- Melakukan koordinasi secara intensif terkait updating OSS RBA.

Yogyakarta, 29 Desember 2023



**PENGUKURAN KINERJA
KOORDINATOR
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal II

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan IV		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Persentase Investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	Persentase Investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	18,8%	(Jumlah investor dengan modal berkembang berdasarkan LKPM pada tahun n/ Jumlah investor wajib LKPM yang telah lapor LKPM pada tahun n) x 100%	61,63%	327,82		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	906.504.000,00	599.635.900,00	9K,868	

Faktor Pendorong:

- Tersedianya layanan pendampingan baik melalui tatap muka maupun melalui Helpdesk WA OSS DPMPSTP Kota Yogyakarta terkait dengan proses perizinan berusaha dan kendala perizinan berusaha.
- Tersedianya layanan pendampingan penyampaian LKPM (Laporan kegiatan Penanaman Modal) kepada Pelaku Usaha.
- Tersedianya Forum Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal.
- Adanya kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dan Bimbingan Teknis penyampaian laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diselenggarakan DPMPSTP kepada Pelaku Usaha.
- Adanya Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Keputusan Walikota Nomor 187 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Adanya Tim Koordinasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Keputusan Walikota Nomor 147 Tahun 2023.
- Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi melalui sistem OSS.
- Adanya koordinasi rutin internal bersama dengan Perangkat Daerah Teknis di Pemerintah Kota Yogyakarta, Provinsi maupun Kementerian.
- Sudah diberlakukannya Sanksi Otomatis pada sistem OSS RBA kepada pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya menyampaikan LKPM 2 periode pelaporan. Sudah ada tindakan ut kunjangan kepada perusahaan yang mendapatkan sanksi otomatis.
- Mendapatkan DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal untuk program pengendalian pelaksanaan PM.
- Integrasi Kapi Jobs (Konsultasi Online Perizinan Investasi juga Online Single Submission) media konsultasi bagi investor terkait OSS.

Uraian Permasalahan:

- Rilis data realisasi investasi dari BKPM yang mundur dan jadwal menjadi penghambat untuk perhitungan capaian karena tidak semua data LKPM dapat dilihat melalui tampilan LKPM user Daerah (jika belum rilis resmi oleh BKPM) sehingga angka yang ditampilkan adalah angka riil realisasi investasi BKPM
- Pelaporan LKPM melalui sistem OSS sampai saat ini masih sering terdapat kendala sistem (sistem maintenance) sehingga menghambat Pelaku usaha.
- Ketidakhahaman pelaku usaha berkaitan dengan kewajiban penyampaian LKPM.
- Kurang patuhnya pelaku usaha berkaitan dengan kewajiban penyampaian LKPM.

Rencana Tindak Lanjut:

- Peningkatan kapasitas pelayanan investasi dengan dilukung semua program penunjang capaian sasaran investasi.
- Menggunakan angka yang ditetapkan BKPM unreaksi.
- Melakukan koordinasi secara intensif terkait updating OSS RBA.

Yogyakarta, 29 Desember 2023
 Kepala Kelompok Substansi
 Penanaman Modal II



M. M.
 NIP. 2091200911004

**PENGUKURAN KINERJA
KOORDINATOR
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan I		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan I		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur	Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur	80%	(Jumlah perizinan masuk yang sesuai prosedur / jumlah perizinan yang masuk) x 100%	91,34%	106,21		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenunan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	759.410.750,00	175.327.750,00	23,087	
2	Meningkatnya Persentase tindak lanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Persentase tindak lanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	95%	(Jumlah konsultasi, informasi, dan pengaduan yang ditindaklanjuti / jumlah konsultasi, informasi, dan pengaduan yang masuk) x 100%	100%	105,26						

Faktor Pendorong

- Tersedianya loket pelayanan konsultasi on dan non on.
- Adanya koordinasi antara internal bidang dan petugas pengampu/OPD Teknis.
- Tersedianya hotline layanan konsultasi on dan nonperizinan.
- Adanya rapat koordinasi terpadu dengan OPD teknis.
- Sarana konsultasi, informasi, dan pengaduan sudah disediakan melalui surat langsung ke OPD, email, WA, kotak pengaduan, aplikasi JSS dan Loket Pelayanan KIP DPMP1SP sehingga masyarakat/pemohon dapat melakukan konsultasi, informasi, dan pengaduan melalui berbagai sarana yang telah disediakan.
- Adanya sistem routing yang memberikan informasi kepada pemohon terkait proses perizinan yang diajukan.
- Adanya inovasi rapat koordinasi terpadu untuk konsultasi dan informasi.

Urutan Pemecahan

- Proses pengajuan izin tidak bisa selesai dalam satu hari sehingga pengajuan izin di bulan Maret masih belum bisa terbit di bulan yang sama karena perlunya pemeriksaan berkas dan melengkapi berkas.
- Pengaduan yang masuk berkaitan dengan OPD teknis karena masyarakat/pemohon belum banyak yang tau harus kemana mereka mengajukan keluhan sehingga pengaduan ditujukan ke DPMP1SP, namun oleh DPMP1SP ditentani agar pengaduan bisa ditindaklanjuti oleh OPD teknis.

Rencana Tindak Lanjut

- Dalam mengisi keterangan perkembangan pelaksanaan fisik agar lebih jelas dan sinkron dengan realisasi fisik.



**PENGUKURAN KINERJA
KOORDINATOR
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan III		Keterangan	Program	Page	Triwulan III		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur	Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur	85%	(Jumlah perizinan masuk yang sesuai prosedur / Jumlah perizinan yang masuk) x 100%	84,46%	98,21	Telah dilakukan review capaian program pada anggaran perubahan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik b. Sub Kegiatan Pembantuan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengeloaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	755.436.750,00	550.184.750,00	66,37	
2	Meningkatnya Persentase tindak lanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Persentase tindak lanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	95%	(Jumlah konsultasi, informasi, dan pengaduan yang ditindaklanjuti / Jumlah konsultasi, informasi, dan pengaduan yang masuk) x 100%	100%	105,26						

Faktor Pendorong:

1. Tersedianya layanan pendampingan secara tatap muka melalui loket DPMPTSP maupun melalui Helpdesk WA Perizinan DPMPTSP Kota Yogyakarta terkait proses perizinan dan non perizinan.
2. Adanya koordinasi antara internal bidang DPMPTSP dan petugas pengampu/OPD Teknis.
3. Tersedianya Forum Penyelesaian Permasalahan perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh pemohon.
4. Adanya Tim Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan.
5. Pelaksanaan Proses permohonan Perizinan dan non Perizinan Terintegrasi melalui <https://perizinanonline.jogjakota.go.id> dan <https://isi.jogjakota.go.id>.
6. Adanya sarana konsultasi, informasi, dan pengaduan yang sudah disediakan melalui surat langsung ke OPD, email, WA, kotak pengaduan, aplikasi JSS dan Loket Pelayanan KIP DPMPTSP sehingga masyarakat/pemohon dapat melakukan konsultasi, informasi, dan pengaduan melalui berbagai sarana yang telah disediakan.
7. Adanya koordinasi antara internal bidang DPMPTSP dan petugas pengampu/OPD Teknis dalam penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh pemohon.
8. Selalu dilakukan evaluasi hasil kepuasan masyarakat yang dilakukan sebulan sekali.

Uraian Permasalahan:

1. Proses pengajuan izin tidak bisa selesai dalam satu hari sehingga pengajuan izin di bulan september masih belum bisa terbit di bulan yang sama karena perlunya pemeriksaan berkas dan melengkapi berkas.
2. Ketidakefektifan pemohon berkaitan dengan persyaratan perizinan dan non perizinan.
3. Pengaduan yang masuk berkaitan dengan OPD teknis karena masyarakat/pemohon belum banyak yang tau harus kemana mereka mengajukan keluhan sehingga pengaduan diujukan ke DPMPTSP, namun oleh DPMPTSP dijembatani agar pengaduan bisa ditindaklanjuti oleh OPD teknis.

Reencana Tindak Lanjut:

- Dalam menggi keterangan perkembangan pelaksanaan fiskal agar lebih jelas dan sinkron dengan realisasi fiskal.
- Sub kegiatan yang realisasi fiskal 100% tetapi realisasi keuangan kurang dari 100% agar dijadikan evaluasi dalam perhitungan anggaran untuk tahun berikutnya



**PENGUKURAN KINERJA
KOORDINATOR
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan IV		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur	Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur	86%	(jumlah perizinan masuk yang sesuai prosedur / jumlah perizinan yang masuk) x 100%	87,02%	101,20	Telah dilakukan review capaian program pada anggaran perubahan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik b. Sub Kegiatan Pemastaaan Pemenunan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	787.182.750,00	787.182.750,00	100,0	
2	Meningkatnya Persentase tindak lanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Persentase tindak lanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	95%	(jumlah konsultasi, informasi, dan pengaduan yang ditindaklanjuti / jumlah konsultasi, informasi, dan pengaduan yang masuk) x 100%	100%	105,26						

Faktor Pendorong:

- Tersedianya layanan pendampingan secara tatap muka melalui loket DPMPTSP maupun melalui Helpdesk WA Perizinan DPMPTSP Kota Yogyakarta terkait proses perizinan dan non perizinan.
- Adanya koordinasi antara internal bidang DPMPTSP dan petugas pengampu/OPD Teknis
- Tersedianya Forum Penyiclukan Permasalahan perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh pemohon.
- Adanya Tim Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan
- Pelaksanaan Proses permohonan Perizinan dan non Perizinan Terintegrasi melalui <https://perizinanonline.yogyakarta.go.id> dan <http://isi.yogyakarta.go.id>.
- Adanya sarana konsultasi, informasi, dan pengaduan yang sudah disediakan melalui surat langsung ke OPD, email, WA, kotak pengaduan, aplikasi JS dan Loket Pelayanan KIP DPMPTSP sehingga masyarakat/pemohon dapat melakukan konsultasi, informasi, dan pengaduan melalui berbagai sarana yang telah disediakan.
- Adanya koordinasi antara internal bidang DPMPTSP dan petugas pengampu/OPD Teknis dalam penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh pemohon.
- Selalu dilakukan evaluasi hasil kepuasan masyarakat yang dilakukan sebulan sekali.

Uraian Permasalahan:

- Proses pengajuan izin tidak bisa selesai dalam satu hari sehingga pengajuan izin di bulan september masih belum bisa terbit di bulan yang sama karena perlunya pemeriksaan berkas dan melengkapi berkas.
- Ketidapahaman pemohon berkaitan dengan dengan persyaratan perizinan dan non perizinan
- Kendala ruang untuk dua layanan yang direkomendasikan oleh Kementerian RB.
- KK sudah tidak di MPPI, namun di Dukrapil, sehingga kabarnya dengan KTP tidak tersentral.
- Pengaduan yang masuk berkaitan dengan OPD teknis karena masyarakat/pemohon belum banyak yang tau harus kemana mereka mengajukan keluhan sehingga pengaduan ditujukan ke DPMPTSP, namun oleh DPMPTSP diimbangi agar pengaduan bisa ditindaklanjuti oleh OPD teknis.

Rencana Tindak Lanjut:

- Dalam mengisi keterangan perkembangan pelaksanaan Rik agar lebih jelas dan sinkron dengan realisasi Rik
- Sub kegiatan yang realisasi Rik 100% tetapi realisasi keuangan kurang dari 100% agar dijadikan evaluasi dalam perhitungan anggaran untuk tahun berikutnya

Yogyakarta, 29 Desember 2023

Koordinator Kelompok Substansi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu I



**PENGUKURAN KINERJA
KOORDINATOR
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan I		Keterangan	Program	Ragu	Triwulan I		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya/Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	80%	Jumlah pemenuhan permohonan data yang diproses dan selesai di tahun n/Jumlah keseluruhan permohonan data yang masuk x 100%	100,00%	125		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	199.218.750,00	23.498.000,00	11,8	

Faktor Pendorong:

- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
- Sumber data dan informasi yang dibutuhkan dapat dipetakan dengan baik

Urutan Permasalahan:

- Permohonan data dari pemohon membutuhkan lebih dari 1 (satu) sumber data sehingga membutuhkan waktu dan proses pemenuhan data dengan koordinasi dengan bidang yang berkaitan dengan kebutuhan data
- Mulai tahun 2023 anggaran integrasi sistem dan pemeliharaan sistem telah dipindah ke Diskominfo dan atas rekomendasi KPK. Sehingga indikator integrasi sistem kurang tepat dijalankan oleh DPMP/ISP. Untuk saat ini, DPMP/ISP tidak lagi mengintegrasikan tetapi hanya sebagai pengelola sistem.

Rencana Tindak Lanjut:

- Melakukan koordinasi intensif dengan Kominfo apabila terdapat kendala sistem
- Pencermatan target pada cascading telah dilakukan mengingat perubahan ketugasan belanja modal aset yang dikembalikan ke Kominfo.

Yogyakarta, 29 Desember 2023

Koordinator Kelompok Substansi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu II



Yogyakarta, 29 Desember 2023
Nomor: 114/2998/2023/1003

**PENGUKURAN KINERJA
KOORDINATOR
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan II		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan II		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Efisiensi ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	80%	Jumlah pemenuhan permohonan data yang diproses dan selesai di tahun n/ jumlah keseluruhan permohonan data yang masuk x 100%	100,00%	125		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	199.219.750,00	55.128.000,00	20,49	
<p>Faktor Pendorong: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai Sumber data dan informasi yang dibutuhkan dapat dipetakan dengan baik</p> <p>Uraian Permasalahan: Permohonan data dari pemohon membutuhkan lebih dari 1 sumber data sehingga membutuhkan waktu dan proses pemenuhan data dengan koordinasi dengan bidang yang berkaitan dengan kebutuhan data. Mulai tahun 2023 anggaran integrasi sistem dan pemeliharaan sistem telah dipindah ke Diskominfo, atas rekomendasi KPK. Sehingga indikator integrasi sistem kurang tepat dijalankan oleh DPMPESP. Untuk saat ini, DPMPESP tidak lagi mengintegrasikan tetapi hanya sebagai pengelola sistemnya.</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: - Melakukan Koordinasi intensif dengan kominfo apabila terdapat kendala sistem. - Pemantauan target pada cascading telah dilakukan mengingat perubahan ketugasan belanjamodal aset yang dikembalikan ke Diskominfo. - Permohonan penambahan bandwidth server terkait dengan peningkatan pelayanan berbasis internet dikordinasikan dengan Diskominfo.</p>												

Yogyakarta, 29 Desember 2023
 Koordinator Kelompok Substansi
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu II



**PENGUKURAN KINERJA
KOORDINATOR
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan II		Keterangan	Program	Fagu	Triwulan III		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	80%	Jumlah pemenuhan permohonan data yang diproses dan selesai di tahun s/ jumlah keseluruhan permohonan data yang masuk x 100%	100,00%	125		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	199.219.750,00	113.446.054,00	33,45	
<p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai Sumber data dan informasi yang dibutuhkan dapat dipetakan dengan baik <p>Uraian Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemohonan data dari pemohon membutuhkan lebih dari 1 sumber data sehingga membutuhkan waktu dan proses pemenuhan data dengan koordinasi dengan bidang yang berkaitan dengan kebutuhan data. Mulai tahun 2023 anggaran integrasi sistem dan pemeliharaan sistem telah dipindah ke Diskominfo sebagai rekomendasi KPK. Sehingga indikator integrasi sistem kurang tepat dijalankan oleh DPMPPTSP. Untuk saat ini, DPMPPTSP tidak lagi mengintegrasikan tetapi hanya sebagai pengelola sistemnya. <p>Rencana Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan Koordinasi intensif dengan Kominfo apabila terdapat kendala sistem 												

Yogyakarta, 29 Desember 2023

Koordinator Kelompok Substansi

Yogyakarta, 29 Desember 2023



**PENGUKURAN KINERJA
KOORDINATOR
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Triwulan IV		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV		Keterangan	
					Realisasi	%				Realisasi	%		
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	80%	Jumlah pemenuhan permohonan data yang diproses dan selesai di tahun n/ Jumlah keseluruhan permohonan data yang masuk x 100%	100,00%	125		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	199.219.750,00	197.519.750,00	99,147		
<p>Faktor Pendorong: - tersedianya sarana, prasarana dan pengelompokan data informasi yang lengkap</p> <p>Uraian Permasalahan: Mulai tahun 2023 anggaran integrasi sistem dan pemeliharaan sistem telah dipindah ke Dikominfo dan atas rekomendasi KPE. Sehingga indikator integrasi sistem kurang tepat dijalankan oleh DPMPTSP. Untuk saat ini, DPMPTSP tidak lagi mengintegrasikan tetapi hanya sebagai pengelola sistemnya. Adanya kendala penundaan perbaikan sistem ketika ada permasalahan karena kebutuhan untuk berkoordinasi dengan kominfo selaku pengelola sistem informasi.</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: - Melakukan koordinasi intensif dengan kominfo apabila terdapat kendala sistem</p>													



**PENGUKURAN KINERJA
PENGAWAS SETARA ESelon IV
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Triwulan I		Keterangan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Triwulan I		Keterangan
				Realisasi	%				Realisasi	%	
				6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tertaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	30		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.793.500,00	1.980.000,00	28,82	
2	Tertaksananya Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD	12 Dokumen	4 Dokumen	30		-Kegiatan Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	5.854.750,00	1.360.000,00	23,23	
3	Tertaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah SKPD	2 Laporan	0 Laporan	10		b. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milk Daerah SKPD	3.546.000,00	0,00	0,00	
4	Tertaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	12 Laporan	1 Laporan	10		d. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD e. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milk Daerah Pada SKPD	3.729.750,00	0,00	0,00	
5	Tertaksananya Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	2 Laporan	0 Laporan	7,5		f. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milk Daerah SKPD	3.525.750,00	0,00	0,00	
6	Tertaksananya Pemanfaatan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milk Daerah SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	7,5		- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.536.000,00	0,00	0,00	
7	Tertaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	4 Dokumen	30		- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.344.250,00	1.262.750,00	19,90	
8	Tertaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket	12 Paket	60		b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.534.000,00	27.602.500,00	54,42	
9	Tertaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	102 Paket	74 Paket	73,49		d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	364.369.236,00	214.772.902,00	66,28	
10	Tertaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	21 Paket	14 Paket	67,3		f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	121.596.700,00	8.000.000,00	6,58	

11	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket	11 Paket	50	-Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor -Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.719.250,00	46.948.500,00	48,94	
12	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen	25		3.240.106,00	680.000,00	20,99	
13	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	2 Laporan	25,58		330.469.000,00	22.069.989,00	6,68	
14	Terlaksananya Pengadaan Mebel DPMPTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	16 Unit	32,64		312.452.700,00	32.888.700,00	10,52	
15	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	8 Unit	90		650.455.000,00	0,00	0,00	
16	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1 Laporan	65		16.000.000,00	4.000.000,00	25,00	
17	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8 Laporan	25		16.500.000,00	3.975.000,00	24,09	
18	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	25		1.123.404.159,00	188.332.000,00	16,76	
19	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	6 Unit	31,01		245.253.000,00	3.660.525,00	1,49	
20	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Jenis	1 Jenis	75		7.500.000,00	0,00	0,00	
21	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123 Unit	70 Unit	57,1		184.566.500,00	78.533.900,00	42,55	
22	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	1 Unit	13,89		1.112.139.855,00	0,00	0,00	

Faktor Pendorong:

- Adanya komitmen struktural melalui koordinasi dan evaluasi capaian setiap bulannya agar kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan tatakalanya kegiatan secara optimal.
- Melaksanakan koordinasi rutin setiap bulan dengan PPTK dan Petugas urusan untuk segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakalanya

Uraian Permasalahan:

- Beberapa pengadaan masih dalam proses pelaksanaan karena ada revisi dokumen
- Penyedia jasa belum memiliki akun LPSE sehingga membutuhkan proses pembuatan dari LPSE
- Penyedia jasa yang sudah ada di e-katalog belum ter-PPK
- Pada awal Februari ada edaran untuk e-katalog TKDN sebesar 30% sehingga ada kesulitan mencari barang yang TKDNnya diatas 30% padahal jaring anggaran sudah diploting di TW I mengakibatkan realisasi mundur dari tatakala dan saat barang sudah dipesan lewat e-katalog penyedia jasa tidak bisa langsung mengirim barang tersebut karena harus inden pabrik dengan estimasi 8-12 minggu sehingga menyebabkan realisasi keuangan mundur menunggu barang dikirim.

Rencana Tindak Lanjut:

- Koordinasi dengan penyedia jasa untuk dapat memenuhi persyaratan e-katalog
- Lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah disesuaikan dengan tata kala, mulai dari tahap pelaksanaan, peng-ujian dan pelaporan



**PENGUKURAN KINERJA
PENGAWAS SETARA ESELON IV
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Triwulan II		Keterangan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Triwulan II		Keterangan	
				Realisasi	%				Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	50		PROGRAM PENUNJANG LUBSAS PEMERINTAHAN DAERAH -Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.791.500,00	2.290.000,00	39,53		
2	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	6 Dokumen	50		a. Sub Kegiatan Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.854.750,00	2.463.000,00	42,07		
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	0 Laporan	20		b. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.546.000,00	605.000,00	17,06		
4	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6 Laporan	25		d. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD e. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1.723.750,00	460.000,00	12,33		
5	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1 Laporan	35		f. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.525.750,00	1.115.000,00	31,62		
6	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	35		- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.536.000,00	805.000	22,77		
7	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	6 Dokumen	50		- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.344.250,00	1.952.750	30,78		
8	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	12 Paket	60		c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.534.000,00	27.502.500	54,42		
9	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	102 Paket	82 Paket	82,25		f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	884.889.236,00	285.798.902	74,36		
10	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	11 Paket	18 Paket	85,91			121.596.700,00	74.213.080	61,03		

11	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket	12 Paket	53		- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.719.250,00	46.858.500	49,47
12	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen	50		- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.240.106,00	1.370.000	42,28
13	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	5 Laporan	50		- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	330.469.000,00	89.791.596	27,17
14	Terlaksananya Pengadaan Mebel DPMPTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	18 Unit	100			312.482.700,00	145.892.700	46,69
15	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	100			650.455.000,00	519.385.000	79,85
16	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1 Laporan	68			16.000.000,00	4.000.000	25,00
17	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50			16.500.000,00	7.950.000,00	48,18
18	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50			1.129.404.159,00	490.892.800,00	43,70
19	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	12 Unit	61,84			245.253.000,00	80.248.650	32,72
20	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Jenis	1 Jenis	75			7.500.000,00	0,00	0,00
21	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123 Unit	70 Unit	95			184.566.500,00	154.621.900	83,78
22	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	6 Unit	66,67			1.112.189.855,00	278.334.044,00	25,03

Faktor Pendorong:

- Adanya rapat koordinasi dan evaluasi yang rutin dilaksanakan oleh petugas urusan, PPTK dan pejabat struktural
- Adanya komitmen struktural melalui koordinasi dan evaluasi capaian setiap bulannya agar kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan tatakala kegiatan secara optimal

Urutan Permasalahan:

- Pelaksanaan ESI harus mundur dikarenakan konfigurasi antara scanner dengan jaringan dan sistem terhambat.
- Pekerjaan Penataan Kelistrikan Lt.1 masih dalam proses tender
- Adanya perkembangan penggunaan kelistrikan yang dinamis di MPP diakibatkan penambahan komputer, printer, AC, dll, menyebabkan kelebihan beban listrik pada MPP sehingga adanya revisi ulang dari produk perencanaan ketika produk sudah hampir jadi.
- Beberapa paket pekerjaan kurang tepat dalam penyusunan tatakala sehingga kurang memperhitungkan dengan tepat kompleksitas pekerjaan, sumber daya yang tersedia dan estimasi waktu yang dibutuhkan.

Rencana Tindak Lanjut:

- Segera melakukan pengataan yang bersifat rutin dan diutamakan dilakukan melalui e-katalog, serta dapat mengajukan pembuatan etalase agar dapat diproses BPPI
- Lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah disesuaikan dengan tata kala, mulai dari tahap pelaksanaan, peng-sojan dan pelaporan



**PENGURUSAN KINERJA
PENGAWAS SETARA ESELON IV
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Triwulan II		Keterangan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Triwulan III		Keterangan
				Realisasi	%				Realisasi	%	
				6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	75		PROGRAM PENUNJANG LURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH -Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.791.500,00	2.991.000	51,66	
2	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	9 Dokumen	75		a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.854.750,00	3.884.000	66,34	
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	1 Laporan	70		b. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3.546.000,00	1.676.000	47,26	
4	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9 Dokumen	75		d. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD e. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	3.729.750,00	2.495.000	66,89	
5	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1 Laporan	45		f. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3.525.750,00	2.540.000	72,04	
6	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1 Laporan	75		- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.536.000,00	1.490.000	42,14	
7	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	9 Dokumen	75		- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.344.250,00	3.237.750	51,03	
8	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket	23 Paket	100		b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.534.000,00	50.444.000	99,82	
9	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	102 Paket	100 Paket	96,37		c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	389.309.236,00	351.318.785	91,40	
10	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	21. Paket	21 Paket	100		e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	121.596.700,00	119.712.928	98,40	

11	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket	23 Paket	100	-Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor -Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.713.250,00	99.809.250	98,92	
12	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	75		3.240.106,00	3.060.000	63,58	
13	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	8 Laporan	81,84			330.469.000,00	340.809.982,00	48,66
14	Terlaksananya Pengadaan Mebel DPMPTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	18 Unit	100			312.482.700,00	298.292.700	95,46
15	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	100			650.455.000,00	641.435.000	98,61
16	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	70			16.000.000,00	4.000.000,00	25,00
17	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9 Laporan	75			16.500.000,00	11.925.000	72,27
18	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9 Laporan	75			1.123.404.159,00	757.079.800	67,39
19	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Unit	16 Unit	80,1			345.253.080,00	139.589.250	56,92
20	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	1 Jenis	1 Jenis	100			7.500.000,00	6.320.800	84,28
21	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123 Unit	121 Unit	98			184.566.500,00	159.781.400	86,57
22	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	12 Unit	6 Unit	67,48			1.112.139.855,00	952.611.244	81,71

Faktor Pendorong:

- Adanya rapat koordinasi dan evaluasi yang rutin dilaksanakan oleh petugas urusan, PPTK dan pejabat struktural
- Adanya komitmen struktural melalui koordinasi dan evaluasi capaian setiap bulannya agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tatakala kegiatan secara optimal

Urutan Permasalahan:

- Tender Penataan kalibrasi sempat mundur dari jadwal dikarenakan kurangnya minat dalam penyusunan tatakala dan pada saat tender pertama, tidak ditemukan pemenang tender karena persyaratan yang tidak dapat diingkasi oleh peserta tender sehingga ada tender ulang di TW II dan pemenang tender sesuai dengan persyaratan yang ada diumumkan di bulan Oktober 2023
- E-katalog terhambat sistem yang sering eror
- Beberapa paket pekerjaan kurang tepat dalam penyusunan tatakala sehingga kurang memperkungan dengan tepat kompleksitas pekerjaan, sumber daya yang tersedia dan estimasi waktu yang diperlukan

Rencana Tindak Lanjut:

- Segera melakukan pengadaan yang bersifat rutin dan diutamakan dilakukan melalui e-katalog, serta dapat mengajukan permohonan etalase agar dapat diawasi BPPB
- Lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah disesuaikan dengan tata cara, mulai dari tahap pelaksanaan, peng-ujian dan pelaporan



**PENGUJURAN KINERJA
PENGAWAS SETARA ESELON IV
TAHUN 2023**

Nama Jabatan: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Triwulan IV		Ketepatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Page	Triwulan IV		Keterangan
				Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	Tertelaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.793.500,00	5.793.500,00	100,00	
2	Tertelaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100		-Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.854.750,00	5.783.250,00	98,78	
3	Tertelaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100		b. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3.346.000,00	3.470.000,00	97,86	
4	Tertelaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100		d. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD e. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	3.729.750,00	3.895.000,00	99,07	
5	Tertelaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 Laporan	100		f. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3.523.750,00	3.477.000,00	98,82	
6	Tertelaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100		- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.536.000,00	3.367.000,00	95,22	
7	Tertelaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	100		- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.344.250,00	6.259.250,00	98,66	
8	Tertelaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DPMP1SP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket	23 Paket	100		b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.059.000,00	52.969.000,00	96,83	
9	Tertelaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPMP1SP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	102 Paket	102 Paket	100		c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	301.411.236,00	394.360.785,00	90,23	
10	Tertelaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	21 Paket	21 Paket	100		f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi -Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.536.700,00	125.652.926,00	98,52	

11	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket	23 Paket	100	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyediaan Jasa Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	115.720.450,00	115.580.350,00	99,87	
12	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	2 Dokumen	100			5.245.106,00	2.980.000,00	91,97
13	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	100			330.405.000,00	324.297.123,00	99,34
14	Terlaksananya Pengadaan Mebel DPMPTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	18 Unit	100			355.745.700,00	351.924.700,00	98,92
15	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	100			797.182.350,00	787.607.350,00	98,80
16	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	100			4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
17	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100			14.500.000,00	14.500.000,00	100,00
18	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100			1.121.404.150,00	1.111.981.800,00	98,98
19	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Unit	20 Unit	100			245.253.000,00	216.062.750,00	88,10
20	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Jenis	1 Jenis	100			7.000.000,00	6.995.800,00	99,94
21	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123 Unit	123 Unit	100			190.766.500,00	189.101.400,00	99,13
22	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	100			1.323.379.212,00	1.295.828.644,00	97,92

Faktor Pendorong:

- Adanya rapat koordinasi dan evaluasi yang rutin dilaksanakan oleh petugas urusan, PPTK dan pejabat struktural
- Adanya komitea struktural melalui koordinasi dan evaluasi capaian setiap bulannya agar kegiatan dapat terrealisasi sesuai dengan tatakala kegiatan secara optimal.

Urutan Permasalahan:

- Tender Penataan Keletrikan sempat mundur dari jadwal dikarenakan kurang tepat dalam penyusunan tatakala dan pada saat tender pertama, tidak ditemukan pemenang tender karena persyaratan yang tidak dapat dilengkapi oleh peserta tender sehingga ada tender ulang di TW III dan pemenang tender sesuai dengan persyaratan yang ada diumumkan di bulan Oktober 2023
- Anggaran belum bisa terserap 100% dikarenakan ada sisa negosiasi dan perbedaan standar harga yang berlaku di pasar

Rencana Tindak Lanjut:

- Segera melakukan pengadaan yang bersifat rutin dan diutamakan dilakukan melalui e-katalog, serta dapat mengajukan pembuatan etalase agar dapat diformasi SPBU
- Lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah disesuaikan dengan tata kala, mulai dari tahap pelaksanaan, pengisian dan pelaporan
- Melakukan perencanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 serta mengumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIKUP)

Yogyakarta, 29 Desember 2023

Di Tempat, Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian



Lampiran 5

Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJIP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274)555241,515865, 515866 FAX (0274) 555241

EMAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081227625000;08122780001 HOTLINE EMAIL: ugik@jogja.go.id

WEB SITE : www.pmpaerizinan@jogjakota.go.id : www.jogjakota.go.id

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJIP TAHUN SEBELUMNYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut	Keterangan Bukti Dukung
1		Melakukan publikasi terhadap dokume perencanaan kinerja baik murni maupun perubahan, dalam hal ini adalah Dokumen Renja Perubahan Tahun 2022	Publikasi terkait Dokumen Renja Perubahan Tahun 2022 telah dilaksanakan pada periode sebelumnya	Screenshoot website perizinan online
2		Meningkatkan penyajian capaian kinerja program pada LKIP berdasarkan pada data kinerja akumulasi dalam satu tahun evaluasi	Penyajian capaian kinerja program pada LKIP sudah dilaporkan berdasarkan pada data kinerja akumulasi dalam satu tahun evaluasi	Sreenshoot SIMONEVA
3		Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pada Sosialisasi Penyusunan LKIP Perangkat Daerah TA 2023 tgl 3 Januari 2023 dijelaskan bahwa tidak perlu menindaklanjuti LHE ini karena pengisian SIMONEVA dan desk timbal balik di setiap triwulan merupakan bagian dari koordinasi dan evaluasi tingkat internal	Berita Acara triwulanan pada SIMONEVA
4		Meningkatkan capaian capaian kinerja outcome sesuai target yang ditetapkan	Dilaksanakan koordinasi rutin setiap triwulan sebagai bentuk evaluasi atas capaian yang telah dicapai	Undangan dan notulen rapat koordinasi
5		Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada tahun berjalan	Dilaksanakan rapat koordinasi rutin setiap bulan yang mengundang masing-masing PPTK dan petugas urusan untuk melaksanakan koordinasi, evaluasi	Undangan dan notulen rapat koordinasi


			dan rencana pencapaian target setiap triwulan	
--	--	--	---	--

Yogyakarta, 30 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Yogyakarta



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP 19720914 199303 1 004

LHE Nomor 1 : Publikasi terkait Dokumen Renja Perubahan Tahun 2022 telah dilaksanakan pada periode sebelumnya



Beranda PPID Profil - Sekilas - Galeri - Hubungi Kami

Daftar page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Daftar Isi

No	Laporan	Lihat
1	DPA Tahun 2021	Lihat Laporan
2	DPA DPA/PTSP Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022	Lihat Laporan
3	DPA Perubahan Tahun 2021	Lihat Laporan
4	DPA DPA/PTSP Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021	Lihat Laporan
5	Revisi DPA TA 2021	Lihat Laporan
6	Anggaran Proporsi dan Kegiatan Tahun 2021	Lihat Laporan

Informasi Kegiatan Dinas

Jam Kegiatan
Selasa - Jumat 09:00 s.d 12:00

Kebijakan : "LAKAT DI PANGGUNG"

Jam Pelayanan

Hari	Jam Pelayanan
Senin - Kamis	08.00 - 14.00 WIB
Jumat	08.00 - 14.00 WIB

Selasa, Minggu dan Hari Besar Nasional Libur

Alamat Dinas

Jl. ...

Indikator Program Tahun 2023

Indikator Program Per Tahun

Tahun: 2023

Penyusun Data: DIBUKU PUSKASAMA BERKAS DOKUMEN TERBESKIP (DIBUKU PUSKASAMA BERKAS DOKUMEN TERBESKIP)

Program: PROGRAM PEMBANGUNAN KUALITAS PEMERIKSAAN

Tampilkan

No	Nama Program	Nama Indikator	Formulasi	Realisasi Indikator Tahun Lalu	Target Indikator	Target Indikator Tahun Depan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Status
1	PROGRAM PEMBANGUNAN KUALITAS PEMERIKSAAN BERKAS DOKUMEN TERBESKIP	Jumlah indikator	100 Persentase indikator yang tercapai tahun 2023 pada tahun 2023	-	227 indikator	227 indikator	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	2023

No	Nama Program	Nama Indikator	Formulasi	Realisasi Indikator Tahun Lalu	Target Indikator	Target Indikator Tahun Depan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Status
----	--------------	----------------	-----------	--------------------------------	------------------	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------

2023

Selamat Pagi, Dr. Heryanto
 Profile & Logout

Indikator Program Tahun 2023

Indikator Program Per Tahun

 Tahun: 2023
 Peringkat Organisasi: DINDAS PERUMBAH MEDAL DAN RELAYOLLA TERPADU (DPTU)
 Program: PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN PERUMBAH MEDAL

Tampilkan Indikator

No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Saldo
				Real The Last	Year	The Depart	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN PERUMBAH MEDAL	Pembinaan instruktur yang berpengalaman dalam pelayanan kepada peserta didik untuk memberikan layanan kepada peserta didik yang berkemampuan intelektual rendah	jumlah instruktur dengan masa keprofesionalan terakreditasi LKPP pada tahun ini adalah minimal 100% yang akan terakreditasi pada tahun ini 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300
No Nama Program Nama Indikator Formula Realisasi Real The Last Target Year Target The Depart Realisasi TW 1 Realisasi TW 2 Realisasi TW 3 Realisasi TW 4 Saldo				300							

- PENGURUM
- KINERJA TI
- Indikator Kinerja TI
- Indikator Program TI
- Sasaran Program TI
- Ex-RERA Per TI
- Sasaran Sub Kegiatan TI

Papan Pengantar Berbasis
 & Profile & Laporan

Indikator Program Tahun 2023

Indikator Program Per Tahun

Tahun: 2023

Throught Search: DANA PERALIHAN MEDIA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program: PROGRAM PENGELOLAAN DAN DAU SISTEM INFORMASI PERALIHAN MEDIA

Tampilkan Indikator

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fakt The Last	Target Fakt	Target Fakt The Depan	Realisasi TB 1	Realisasi TB 2	Realisasi TB 1	Realisasi TB 1	Skor
	1	PROG DAN PERALIHAN MEDIA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (MIDAL)	Peningkatan layanan dan proses pemenuhan permintaan	Jumlah pemenuhan permintaan dan yang diterima dan akses di tahun kumulatif berdasarkan pemenuhan dan yang total > 100%	-	20%	20%	100%	100%	100%	100%	200
Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fakt The Last	Target Fakt	Target Fakt The Depan	Realisasi TB 1	Realisasi TB 2	Realisasi TB 1	Realisasi TB 1	Skor
	1	100% PROGRAM PENGELOLAAN DAN DAU SISTEM INFORMASI PERALIHAN MEDIA (MIDAL)	Peningkatan layanan informasi publik yang terintegrasi	Jumlah layanan informasi publik yang terintegrasi dengan layanan informasi publik yang total > 100%	-	1%	2%					200

LHE Nomor 3

Berita Acara triwulanan pada SIMONEVA

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBUNAN I TAHUN 2023**

Pada hari ini Jumat tanggal 28 April 2023 bertempat di Ruang Rapat Code Utara Lt 3 telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program	: 49
Jumlah Kegiatan	: 13
Jumlah Sub Kegiatan	: 44
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 3.863.413.347,00
Capaian Realisasi Fisik	: 87,65
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 2
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 47,88
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 10

REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Penentuan target berdasarkan cut off point berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BKPM 2. Melakukan plotting anggaran dengan baik.	1. Penyajian angka realisasi target sudah menggunakan angka forecasting pada penyusunan LKIP namun sudah diupdate dengan nilai riil realisasi investasi riil resmi BKPM atas rekomendasi inspektorat. 2. Plotting anggaran sudah disusun menyesuaikan kebutuhan yang telah dihitung dengan memperhatikan target fisik dan target keuangan yang akan dicapai.	1. Perencanaan	1. Indikator sasaran nilai realisasi investasi, indikator program jumlah investor baru, Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur, Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data, sudah memenuhi target. 2. Indikator sasaran nilai RB dan Indikator Program Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat masih menggunakan data tahun 2022, untuk SAKIP sudah dilakukan desk dengan inspektorat dan kekurangan data sudah ditindaklanjuti dengan sangat baik. 3. Semua faktor penghambat sudah dilakukan rencana dan implementasi tindak lanjut.	1. Pertahankan kinerja 2. Updating realisasi Indikator sasaran nilai RB dan Indikator Program Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat setelah ada rilis nilai resmi dari Inspektorat.
1) beberapa output realisasi fisiknya sudah 100% tetapi realisasi keuangannya masih nol, mohon merevisi sesuai yang sebenarnya 2) untuk sub kegiatan yang realisasi fisik 100% tetapi realisasi keuangan kurang dari 100% agar dijadikan evaluasi dalam perhitungan anggaran untuk tahun berikutnya	Sudah direalisasikan di TW dan tahun selanjutnya	2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	1. Pelaksanaan fisik kegiatan DPMPTSP s.d Maret 2023 tercapai realisasi fisik 32,37% dan mengalami deviasi -0,52% 2. Ada 2 sub kegiatan yg mengalami deviasi >5% 3. Dalam pengisian realisasi keluaran masih ada yang tidak sinkron dengan keterangan perkembangan pelaksanaan fisiknya	1. Dalam mengisi keterangan perkembangan pelaksanaan fisik agar lebih jelas dan sinkron dengan realisasi fisik (jika belum tercapai sesuai target, maka di keterangannya tidak diisi sudah terlaksana) 2. Jika ada deviasi dijelasnya di keterangan hambatan apa yang menyebabkan deviasi pada sub kegiatan tersebut
		3. Serapan Keuangan	Realisasi Penyerapan Anggaran terhadap pagu dalam satu tahun, sampai dengan TB I sebesar 15,97%	1. Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan tata laksana. 2. Lebih memperhatikan dalam penatausahaan belanja sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan nominal pada SPM yang diajukan. 3. Lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, dari pelaksanaan, peng-SPln, dan pelaporan. 4. Meminimalisir pengajuan SPM dengan surat keterlambatan, paling lambat tiga hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga secara lengkap dan benar melalui PPTK, agar segera diajukan SPP dan SPM.
Pengadaan Langsung TT Nahen yang akan menjadi Pekerjaan Rutin, mohon untuk dipersiapkan jauh jauh hari agar dapat diproses lebih cepet	Sudah direalisasikan di TW I dan tahun selanjutnya.	4. Progress Pengadaan	Pada TW I, Terdapat satu paket tender dengan tatakala waktu pemilihan Maret - Maret namun belum dilimpahkan ke BPBJ.	1. Jika terdapat paket pengadaan barang jasa yang telah terakomodir di Katalog Elektronik Kota Yogyakarta, mohon proses pengadaan diprioritaskan melalui metode e-purchasing. 2. Jika etalase produk yang dibutuhkan belum ada pada katalog elektronik Kota Yogyakarta, CPD dapat mengajukan penambahan etalase baru melalui surat permohonan yang dikirimkan melalui Setda Kota Yogyakarta. 3. Apabila di Triwulan II Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK 4. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ

<p>Telah mengisikan pengukuran kinerja pada simoneva dengan data yang lengkap dan benar. Pertahankan dan tingkatkan kinerja ke depan.</p>	<p>Kinerja akan dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya.</p>	<p>5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja</p>	<p>Rencana aksi perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja telah diisi pada simoneva dengan data yang lengkap dan benar</p>	<p>Telah mengisikan rencana aksi perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja pada simoneva dengan data yang lengkap dan benar. Pertahankan dan tingkatkan kinerja ke depan.</p>
<p>1. Tindaklanjut terhadap rekomendasi/saran hasil evaluasi, baik Evaluasi AKIP maupun evaluasi RB agar didokumentasikan, baik uraian progress-nya maupun bukti dukungnya, sebagai salah satu data pendukung untuk Evaluasi AKIP & Evaluasi RB Tahun 2022 yang akan dilaksanakan di 2023. 2. Terkait dengan SIERA yg tahun 2022 sdh ditutup (karena sdh berganti menu mjd tahun 2023). Agar bagi OPD yang blm selesai entry di SIERA maka membuat laporan secara manual yang dikirimkan ke Dinas Perindustrian Koperasi UKM (sesuai surat Edaran ttg permintaan realisasi P3DN untuk laporan dinas koperasi). Namun kondisi ini jika masih memungkinkan karena adanya batasan waktu (koordinasi dengan Dinas Perindustrian Koperasi UKM 3. Agar di lakukan perbaikan dalam dokumen MIT serta di lakukan update tanda tangan</p>	<p>Sudah direalisasikan di TW I dan tahun selanjutnya. Pencermatan target pada cascading untuk Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal telah dilakukan mengingat perubahan ketegasan belanja modal aset yang dikembalikan ke Keminfo.</p>	<p>6. Pengawasan</p>	<p>1 Evaluasi SAKIP Tahun 2022 sedang dalam proses 2. TL hasil evaluasi PMPRB agar mulai dipersiapkan dan didokumentasikan baik uraian progress-nya maupun bukti dukungnya</p>	<p>1. Dokumentasi terkait tindaklanjut catatan penilaian SAKIP dan evaluasi kinerja agar ditingkatkan 2. Agar menindaklanjuti rekomendasi dalam LHE RB Tahun 2022</p>

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

<p>Patricia Anggit Sri Harsono, S.E. Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan</p>

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Agustin Wijayanti	Bappeda	
Andriyanto	BPKAD	
Silvia S	Bag Adalbang	
Adi Widya Eko Pambudi, S.T.	BLP	
Kristi Yuliani	Bag Organisasi	
Lina Nur Aeri	Inspektorat	

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBUNAL II TAHUN 2023**

Pada hari ini Kamis tanggal 20 Juli 2023 bertempat di Peserta Luring : Bappeda, Lantai 3 Ruang Code Utara; Daring: Zoom Meeting <https://bit.ly/DESKII23> telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, dengan hasil pencerminan sebagai berikut ini :

Jumlah Program	: 49
Jumlah Kegiatan	: 13
Jumlah Sub Kegiatan	: 44
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 7.950.840.611,00
Capaian Realisasi Fisik	: 100,29
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 2
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 70,14
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 13

REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Pertahankan kinerja 2. Updating realisasi indikator sasaran nilai RB dan Indikator Program Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat setelah ada nilai resmi dari Inspektorat.	Kinerja telah dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk update realisasi indikator sasaran nilai RB dan SAKIP telah diupdate di TW II.	1. Perencanaan	1. Program pengembangan iklim penanaman modal terealisasi 117 investor baru dari target 119 investor baru dikarenakan minimnya informasi investasi sehingga masyarakat khususnya investor sulit mengembangkan usahanya.	1. Perwal Juknis tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan iklim penanaman modal. 2. Permohonan penambahan bandwidth server terkait dengan peningkatan pelayanan berbasis internet dikordinasikan dengan Diskominfo. 3. Mohon untuk menyusun Kajian potensi perpajakan.
1. Dalam mengisi keterangan perkembangan pelaksanaan fisik agar lebih jelas dan sinkron dengan realisasi fisik (jika belum tercapai sesuai target, maka di keterangkannya tidak diisi sudah terlaksana) 2. Jika ada deviasi di jelaskannya di keterangan hambatan apa yang menyebabkan deviasi pada sub kegiatan tersebut	1. Tatacara pengisian realisasi fisik sudah disosialisasikan melalui rapat dengan petugas urusan dan telah dilaksanakan pada pelaporan TW II. 2. Keterangan penyebab deviasi telah dituliskan tetapi terbatas karakter huruf pada SIM Pelaporan.	2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	1) Pelaksanaan fisik kegiatan DPMPTS Juni 2023 tercapai realisasi fisik 62,60% dan mengalami deviasi fisik -4,93% 2) Ada 2 sub kegiatan yg mengalami deviasi di atas 5% yaitu 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2. PengolahanPenyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Agar melakukan percepatan pelaksanaan fisik khususnya sub kegiatan yang mengalami deviasi di atas 5%. Misalnya untuk PengolahanPenyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, agar segera berkoordinasi dengan Kominfo
1. Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan tata kala. 2. Lebih memperhatikan dalam penatausahaan belanja sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan nominal pada SPM yang diajukan. 3. Lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, dari pelaksanaan, peng-SPlan, dan pelaporan. 4. Meminimalisir pengajuan SPM dengan surat keterlambatan, paling lambat tiga hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga secara lengkap dan benar melalui PPTK, agar segera diajukan SPP dan SPM.	Sudah direalisasikan di TWW dan tahun selanjutnya.	3. Serapan Keuangan	Realisasi Penyerapan Anggaran terhadap pagu dalam satu tahun, sampai dengan TB II sebesar 46,37%	1. Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan tata kala. 2. Lebih memperhatikan dalam penatausahaan belanja sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan nominal pada SPM yang diajukan. 3. Lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, dari pelaksanaan, peng-SPlan, dan pelaporan. 4. Meminimalisir pengajuan SPM dengan surat keterlambatan, paling lambat tiga hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga secara lengkap dan benar melalui PPTK, agar segera diajukan SPP dan SPM.
1. Jika terdapat paket pengadaan barang jasa yang telah terakomodir di Katalog Elektronik Kota Yogyakarta, mohon proses pengadaan diprioritaskan melalui metode e-purchasing. 2. Jika etalase produk yang dibutuhkan belum ada pada katalog elektronik Kota Yogyakarta, OPD dapat mengajukan penambahan etalase baru melalui surat permohonan yang dikirimkan melalui Setda Kota Yogyakarta. 3. Apabila di Triwulan II Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke RPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang	Sudah direalisasikan di TWW dan tahun selanjutnya.	4. Progress Pengadaan	Tidak ada paket tender yang terumumkan dalam RUP untuk TW II Tahun Anggaran 2023.	1. Untuk Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rutin dapat diakomodir melalui e-purchasing (e-catalogue). 2. Dimohon pada OPD untuk menyampaikan kepada Penyedia agar mendaftarkan produknya di Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. Pada TW III, OPD dimohon mencermati dalam menentukan metode pemilihan pada SIRUP khususnya untuk metode pemilihan Penunjukan Langsung yang hanya dapat digunakan dalam keadaan tertentu.

menggunakan jenis kontrak SPK 4. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ				
Telah mengisikan rencana aksi perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja pada simoneva dengan data yang lengkap dan benar. Pertahankan dan tingkatkan kinerja ke depan.	Kinerja akan dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya.	5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja	Pada aspek pengukuran kinerja eselon II sudah lengkap. Sedangkan pada aspek pengukuran kinerja eselon III, beberapa belum dilengkapi dengan dilengkapi dengan faktor pendorong dan uraian permasalahan.	Mohon dilengkapi isian pengukuran kinerja pada eselon III
1. Dokumentasi terkait tindak lanjut catatan penilaian SAKIP dan evaluasi kinerja agar ditingkatkan 2. Agar menindaklanjuti rekomendasi dalam LHE R8 Tahun 2022	Kinerja akan dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya dan rekomendasi dalam LHE R8 Tahun 2022 sudah direalisasikan di TWW dan tahun selanjutnya.	6. Pengawasan	- Penghitungan indikator program "Persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur" dan "Persentase tindak lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan" sudah dihitung berdasarkan akumulasi. - SPIP: KK Manual PT dan PCT sudah diisi, KK Strupra masih progress memasukkan bukti dukung ke gdrive - DPMPTSP sudah mengirinkan Lap realisasi P3DN	1. Rekomendasi Evaluasi SAKIP 23: a)Melakukan publikasi terhadap dokumen perencanaan kinerja baik mumi maupun perubahan, dalam hal ini adalah Dokumen Renja Perubahan Tahun 2022. b)Meningkatkan penyajian capaian kinerja program pada LKIP berdasarkan pada data kinerja akumulasi dalam satu tahun evaluasi. c)Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. d)Meningkatkan capaian kinerja outcome sesuai target yang ditetapkan. e)Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada tahun berjalan. 2. Saran terkait Manajemen Risiko: a.Menyusun Dokumen Identifikasi dan Penilaian risiko pada tingkat program. b.Melakukan pengisian Dokumen Manajemen Risiko secara lebih cermat sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pedoman Manajemen Risiko. c.Menguraikan target waktu pelaksanaan pengendalian secara spesifik. d.Mengidentifikasi risiko kemitraan dan risiko fraud dalam pada tingkat strategis. e.Menjadikan nilai risiko residu tahun 2022 sebagai acuan dalam penilaian risiko yang sama pada tahun 2023. 3. Terkait SPIP, Asesor PM agar segera mengerjakan SPIP via Aplikasi km batas waktunya sd. tanggal 23 Juli 2023. Tim Jaminan Kualitas (Inspektorat) agar sgr diberikan link spreadsheet KK Manual SPIP, utk secara paralel dilakukan PK

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui


Perwakilan Perangkat Daerah

Patricia Anggit Sri Harsono, S.E. Penelaah Teknis Kebijakan

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Agustin Wijayanti, S.Si., M.Ec.Dev	Bappeda	
Andriyanto	BPKAD	
Silvia S	Bag Adalbang	
Putri Kurnia Permata Sari, ST.	BLP	
Kristi Yuliani	Bag Organisasi	

1/25/24, 2:13 PM

Desk Timbal Balik Berita Acara

Swi C. Nugraha	inspeltonst	
----------------	-------------	---

BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN III TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Oktober 2023 bertempat di Peserta Luring : Bappeda, Lantai 1 Ruang Sekretariat; Daring: Username: 818 819 0375 ; Password: - telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program	: 49
Jumlah Kegiatan	: 13
Jumlah Sub Kegiatan	: 44
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 11.074.044.691,00
Capaian Realisasi Fisik	: 99,40
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 5
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 76,20
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 14

REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Perwal Juknis tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan iklim penanaman modal. 2. Permohonan penambahan bandwidth server terkait dengan peningkatan pelayanan berbasis internet dikordinasikan dengan Diskominfo. 3. Mohon untuk menyusun Kajian potensi perkotaan.	1. Perwal Juknis tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan iklim penanaman modal. 2. Permohonan penambahan bandwidth server terkait dengan peningkatan pelayanan berbasis internet telah dikordinasikan dengan Diskominfo dengan membuat surat rekomendasi dari DPMPTSP; progress selanjutnya menunggu info dari Diskominfo. 3. Kajian potensi perkotaan sedang dikordinasikan untuk menjadi output kajian di tahun selanjutnya.	1. Perencanaan	1. Realisasi nilai investasi berdasarkan pada data triwulan II. 2. Terdapat KBLI yang belum sinkron antara OSS dan sistem GISTARU yang berdampak pada pelaporan LKPM. 3. Ketidakhahaman pemohon berkaitan dengan persyaratan perizinan dan non perizinan.	1. Penentuan target investasi berdasarkan data rilis BKPM. 2. Mohon target investasi dibreakdown per triwulan. 3. Mensosialisasikan klinik rumah swadaya dan memindaklanjuti progress SCP perizinan dan non perizinan.
Agar melakukan percepatan pelaksanaan fisik khususnya sub kegiatan yang mengalami deviasi di atas 5%. Misalnya untuk Pengolahan/penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, agar segera berkoordinasi dengan Kominfo	Sudah dilakukan rekomendasi dengan Diskominfo.	2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	1) Pelaksanaan fisik kegiatan DPMPTSP september 2023 tercapai realisasi fisik 83,47% dan mengalami deviasi fisik -7,95% 2) Ada 5 sub kegiatan yg mengalami deviasi di atas 5% 3) untuk sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/kota belum ada penjelasan mengapa sub kegiatan tersebut terhambat	1. Agar mengisi kolom hambatan realisasi fisik yang masih kosong 2. Untuk sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal target fisik TW III di SIMPEL 79% sedangkan realisasi fisik 100%, ini berarti untuk sub kegiatan ini selesai di TW III. Akan tetapi jika di TW/IV masih ada pelaksanaan fisik dan pengeluaran keuangan agar tidak mengimpit 100% di TW III.
1. Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan tata kala. 2. Lebih memperhatikan dalam penatausahaan belanja sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan nominal pada SPM yang diajukan. 3. Lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, dari pelaksanaan, peng-SPTan, dan pelaporan. 4. Meminimalisir pengajuan SPM dengan surat keterlambatan, paling lambat tiga hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga secara lengkap dan benar melalui PPTK, agar segera diajukan SPP dan SPM.	Sudah dilaksanakan pada TW selanjutnya.	3. Serapan Keuangan	Serapan SPP s/d Tribulan Tiga mencapai 65,09 %, sedangkan serapan SP2D mencapai 67,16%.	1. Lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah disesuaikan dengan tata kala, mulai dari tahap pelaksanaan, peng-sptan dan pelaporan. 2. Berkaitan dengan pihak ketiga, agar setiap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan untuk segera diajukan SPP dan SPM 3. Akan segera diadakan sosialisasi langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun, diharapkan bisa menjadikan pencermatan bersama agar serapan keuangan tahun 2023 sesuai dengan target yang akan kita capai.
1. Untuk Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rutin dapat diskomodir melalui e-purchasing (e-catalogue). 2. Dimohon pada OPD untuk menyampaikan kepada Penyedia agar mendaftarkan produknya di Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. Pada TW III, OPD dimohon mencermati dalam menentukan metode pemilihan pada SIRUP khususnya untuk metode	Sudah dikordinasikan dengan pengampu di DPMPTSP dan sudah dilaksanakan pada TW selanjutnya.	4. Progress Pengadaan	DPMPTSP pada TW III, terdapat tender yang diproses melalui BPBI dengan proses yang sudah selesai. Sedangkan untuk Pengadaan Langsung dan E-Purchasing, jika melihat dari SIRUP DPMPTSP tidak terdapat proses pengadaan dengan metode ini di TW III.	Pada TW IV jika terdapat paket pengadaan yang dilaksanakan melalui BPBI, Mohon segera dilakukan pelimpahan agar dapat segera diproses dan untuk pengadaan yang bersifat rutin ataupun tersedia di e-katalog, dapat diutamakan dilakukan melalui e-katalog apabila belum terdapat etalase pada e-katalog kota Jogja, dapat mengajukan pembuatan etalase agar dapat kami proses

perlihatkan Penunjukan Lintang yang hanya dapat digunakan dalam keadaan tertentu.				
Mohon dilengkapi isian pengukuran kinerja pada eselon III	Sudah dilaksanakan pada TW selanjutnya.	5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja	Form pengukuran kinerja sudah lengkap	1. Untuk menyusun form pengukuran kinerja eselon IV secara manual. 2. Apabila terdapat pergantian nomenklatur atau mutasi pejabat struktural dan baru dilantik agar melakukan penyesuaian dengan membuat Revisi Perjanjian Kinerja.
<p>1. Rekomendasi Evaluasi SAKIP 23: a)Melakukan publikasi terhadap dokumen perencanaan kinerja baik mumi maupun perubahan, dalam hal ini adalah Dokumen Renja Perubahan Tahun 2022. b)Meningkatkan penyajian capaian kinerja program pada LKIP berdasarkan pada data kinerja akumulasi dalam satu tahun evaluasi. c)Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. d)Meningkatkan capaian kinerja outcome sesuai target yang ditetapkan. e)Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada tahun berjalan. 2. Saran terkait Manajemen Risiko: a.Menyusun Dokumen Identifikasi dan Penilaian risiko pada tingkat program. b.Melakukan pengisian Dokumen Manajemen Risiko secara lebih cermat sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pedoman Manajemen Risiko. c.Menguraikan target waktu pelaksanaan pengendalian secara spesifik. d.Mengidentifikasi risiko kemitraan dan risiko fraud dalam pada tingkat strategis. e.Menjadikan nilai risiko residu tahun 2022 sebagai acuan dalam penilaian risiko yang sama pada tahun 2023. 3. Terkait SPIP, Asesor PM agar segera mengerjakan SPIP via Aplikasi krn batas waktunya sd. tanggal 21 Juli 2023. Tim Penjamin Kualitas (Inspektorat) agar sgr diberikan link spreadsheet KK Manual SPIP, utk secara paralel dilakukan PK</p>	<p>Progres tindak lanjut SAKIP, RB dan SPIP telah dilaksanakan pada TW selanjutnya. Telah dilakukan koordinasi rutin bersama PPTK dan petugas urusan sebagai upaya pencapaian kinerja agar sesuai dengan target triwulan tahun berjalan.</p>	6. Pengawasan	<p>1. DPMPTSP telah menyampaikan BA hasil pemantauan TLHE AKIP Tahun 2023. 2. Money Renaksi R6 semester 1-3 tahun 2023 telah dilaksanakan dan masih dalam proses penyusunan laporan namun berdasarkan Permenpan 9 Tahun 2023 untuk evaluasi RB diamanatkan dilaksanakan tiap tribulas sekali. 3. Laporan P3DN Semester 1 DPMPTSP telah disampaikan tanggal 22 Juni 2023 dengan batas waktu pengumpulan 21 Juni 2023. 4. DPMPTSP sudah melakukan pencermatan terkait rekomendasi evaluasi MR.</p>	<p>1. Agar mempersiapkan bukti dukung dan self assesment atas renaksi RB setiap triwulan. 2. Agar laporan realisasi P3DN dapat disampaikan secara tepat waktu. 3. Agar melakukan tindak lanjut hasil evaluasi MR Tahun 2023 dan agar menyampaikan laporan MR Semester 1 Tahun 2023 kepada Walikota dengan tembusan Inspektorat. 4. Agar menyusun MR atas program penunjang urusan pemerintahan terkait risiko terkait pengelolaan keuangan, aset dan SDM dan keterbukaan informasi dan penanganan aduan.</p>

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah


Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Agustih Wijayanti, S.Si., M.Ec.Dev	Bappeda	
Andriyanto	BPKAD	

1/25/24, 2:14 PM

Patricia Anggit Sri Harsomo, S.E.
Penelaah Teknis Kebijakan

Desk Timbal Balik Berita Acara

Sihva Sihombing	Bag. Adalbang	
Putri Kurnia Permmata Sari, S.T.	BLP	
Kristi Yuliani	Bag. Organisasi	
Lina Nur A.	Inspektorat	

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

Pada hari ini Senin tanggal 08 Januari 2024 bertempat di Peserta Luring - Bappeka, Lantai 3 Ruang Code Selatan; Daring: <https://bit.ly/jadwalkdeskTBTW> telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, dengan hasil pencerminan sebagai berikut ini :

Jumlah Program	: 49
Jumlah Kegiatan	: 13
Jumlah Sub Kegiatan	: 44
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 12.963.306.683,00
Capaian Realisasi Fisik	: 50,00
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 0
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 96,36
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 30%	: 1

REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Penentuan target investasi berdasarkan data rilis BKPM. 2. Mohon target investasi dibreakdown per triwulan. 3. Mensosialisasikan klinik rumah swadaya dan merindai lanjut progress SOP perizinan dan non perizinan.	Target investasi telah dibreakdown per triwulan dan publikasi terkait klinik rumah swadaya dan merindai lanjut progress SOP perizinan dan non perizinan telah dibuat dan didistribusikan melalui media sosial hingga kementerian.	1. Perencanaan	1. Target sasaran dan indikator program sudah disesuaikan dengan Kepwal review renstra. Capaian sasaran dan indikator program sudah tercapai. 2. Kendala perundangan perbaikan sistem ketika terjadi permasalahan karena kebutuhan untuk berkoordinasi dengan Kominfo selaku pengelola sistem informasi. 3. Sudah ada tindak lanjut untuk kunjungan pada perusahaan yang mendapatkan sanksi otomatis. 4. Ada 2 lembaga yang dibentuk oleh KemenpanRB bisa masuk tenan, Taspem dan PUN 5. Pelayanan KK ditarik kembali ke Dukcapil 6. Sim BG, AKPR dan Amdel (belum terintegrasi) pada OSS	1. Potensi TBEG dan parkir area Jogja selain bisa dikerja samakan dengan melibatkan pihak swasta atau Public Private Partnership (PPP). 2. Koordinasi dengan Dekcapil untuk kemudahan masyarakat mengakses pelayanan KK. 3. Tingkatkan kinerja di tahun 2024, persiapkan tata kala perencanaan.
1. Agar mengisi kolom hambatan realisasi fisik yang masih kosong. 2. Untuk sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal target fisik TW III di SIMPEL 79% sedangkan realisasi fisik 100%, ini berarti untuk sub kegiatan ini selesai di TW III. Akan tetapi jika di TW IV masih ada pelaksanaan fisik dan pengeluaran keuangan agar tidak menginput 100% di TW III.	Pengisian hambatan di realisasi fisik telah diisi dan pengisian di simpelaporan telah disesuaikan dan diperbaiki sesuai dengan target dan tata kala.	2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	Pelaksanaan Fisik kegiatan DPMPST s/d Desember 2023 sudah tercapai realisasi fisik 100%	Capaian fisik hingga TW IV sudah sangat bagus. Agar dipertahankan
1. Lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah disesuaikan dengan tata kala, mulai dari tahap pelaksanaan, peng-ajian dan pelaporan. 2. Berkaitan dengan pihak ketiga, agar setiap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan untuk segera diajukan SPP dan SPM. 3. Akan segera dilakukan sosialisasi langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun, diharapkan bisa menjadikan pencerminan bersama agar serapan keuangan tahun 2023 sesuai dengan target yang akan kita capai.	Sudah dilaksanakan pada TW selanjutnya.	3. Serapan Keuangan	Realisasi SP2D untuk DINAS Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s/d Tribunal IV telah tercapai 96,68%	1. Pelaksanaan kegiatan agar disesuaikan dengan tata kala. 2. Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan lebih meningkatkan ketelitian dan kecermatan, terutama penempatan sumber dana pada saat pengajuan SPP dan SPM. 3. Berkaitan dengan pihak ketiga, untuk pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, agar segera diajukan SPP dan SPM.
Pada TW IV jika terdapat paket pengadaan yang dilaksanakan melalui BPPB, Mohon segera dilakukan pelimpahan agar dapat segera diproses dan untuk pengadaan yang bersifat rutin ataupun tersedia di e-katalog, dapat diutamakan dilakukan melalui e-katalog apabila belum terdapat etalase pada e-katalog kota Jogja, dapat mengajukan pembuatan etalase agar dapat kami proses.	Sudah dilaksanakan pada TW selanjutnya.	4. Progress Pengadaan	Pada TW IV, DPMPSTP tidak terdapat paket Tender dan Pengadaan Langsung yang diimpahkan ke BPPB.	- Memprioritaskan Pengadaan Langsung Elektronik (E-Pengadaan Langsung) untuk dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) secara transaksional dan pencatatan. - Pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya yang sifatnya rutin dan terdapat pada etalase katalog lokal Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan metode pengadaan E-Purchasing. - Mendorong Penyedia yang menjadi mitranya untuk mendaftar menjadi Penyedia Jasa pada katalog lokal Kota Yogyakarta dengan berkoordinasi pada Bagian Pengadaan

				Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta; - Melakukan perencanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 serta mengumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui https://sirup.lkpp.go.id sebelum tanggal 31 Maret 2024; -Mohon dalam penginputan SIRUP, dapat memperhatikan dalam pengisian Jenis Pengadaan, Metode Pemilihan, serta Tatacara jadwal pemilihan penyedia, jadwal pelaksanaan kontrak, hingga pemanfaatan barang/jasa. -jika terdapat paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilimpahkan ke BPBJ, diharapkan agar CPD segera menyiapkan dokumen pengadaan dan segera dilimpahkan ke BPBJ agar proses pengadaan berjalan sesuai dengan tatakala.
1. Untuk menyusun form pengukuran kinerja eselon IV secara manual. 2. Apabila terdapat pergantian nomenklatur atau mutasi pejabat struktural dan baru dilantik agar melakukan penyesuaian dengan membuat Revisi Perjanjian Kinerja.	Form pengukuran kinerja eselon IV telah disusun secara manual.	5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja	Sudah mengisi Pengukuran Kinerja TW IV	- Format & tambahkan substansi penyusunan LKIP (seperti analisis PUG, capaian RB diberi catatan merupakan capaian sampai TW III, dan analisis efisiensi) sesuai dengan sosialisasi dari Bagor pada 3 Januari kemarin dapat diakses melalui https://s.id/LKIP_PD_2023 . - Kami tunggu pengumpulan softfile LKIP max. 12 Januari untuk direvisi/koreksi oleh Bagian Organisasi terlebih dahulu, sebelum dikumpulkan LKIP fisiknya max. tanggal 31 Jan 2024. - Perjanjian Kinerja Eselon II - IV Tahun 2023 final mohon discan dan dikumpulkan melalui https://s.id/sakip2023yk . - Untuk menyusun pengukuran kinerja eselon IV secara manual dari TW I-IV
1. Agar mempersiapkan bukti dukung dan self assesment atas renaksi RB setiap triwulan. 2. Agar laporan realisasi P3DN dapat disampaikan secara tepat waktu. 3. Agar melakukan tindak lanjut hasil evaluasi MR Tahun 2023 dan agar menyampaikan laporan MR Semester 1 Tahun 2023 kepada Walikota dengan tembusan Inspektorat. 4. Agar menyusun MR atas program penunjang urusan pemerintahan terkait risiko terkait pengelolaan keuangan, aset dan SDM dan keterbukaan informasi dan penanganan aduan.	Bukti dukung dan self assesment atas renaksi RB setiap triwulan telah dipersiapkan dan tindak lanjut hasil evaluasi MR Tahun 2023 juga sudah disusun, saat ini sedang dalam proses penyempurnaan penyusunan MR Tahun 2024	6. Pengawasan	1. Tindak lanjut desk TB TW sebelumnya belum di isi/dilengkapi 2. Data dukung capaian sasaran, program dan kegiatan perlu disiapkan dengan memadai. 3. Bulan Februari 2024 akan dilaksanakan Ev Sakip tahap I akan dilaksanakan tgl 5 Feb 24 dan Monitoring P3DN. 4. Capaian Maturitas SPIP Kota Yk meningkat shg perlu dukungan PD dalam meningkatkan Maturitas SPIP tahun 2024 5. Setiap triwulan akan dilaksanakan penilaian RB sesuai Permintaan 9 Tn 2023 6. Penilaian ZI akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pada TW I akan dilaksanakan sosialisasi Pembangunan ZI 7. Inspektorat akan memonitor Laporan Pelaksanaan MR 2023 dan Dokumen MR Tahun 2024 (bagian dr Maturitas SPIP Kota Yk)	1. Melengkapi dokumen desk TB 2. Menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung LKIP 2023 baik dokumen perencanaan, pengukuran maupun evaluasi serta memperhatikan hasil evaluasi LKIP tahun sebelumnya. 3. Mengirimkan Laporan Realisasi P3DN ke Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM 4. Menyusun Dokumen MR Tahun 2024 5. Menyusun Laporan Pelaksanaan MR Tahun 2023 6. Melaksanakan pembangunan ZI sesuai rencana kerja dan mendokumentasikan pelaks pembangunan ZI tahun 2023 dan 2024 tahun berjalan utk persiapan penilaian pd tahun 2024. 7. Mendokumentasikan seluruh pelaksanaan SPIP untuk mendukung peningkatan maturitas SPIP Kota Yk

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

Patricia Anggit Sri Hansono, S.E. Penelaah Teknis Kebijakan

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Agustn Wijayanti, S.Si., M.Ec.Dev	Bappeda	
Andriyanto	BPKAD	
Silva Sihombing, S.E.	Bag Adalbang	
Adi Widya Eka Pambudi, S.T.	BLP	

1/25/24, 2:15 PM

Desk Timbal Balik Berta Acara

Anggarani Krans, S.E.	Bag Organisasi	
Mel	Inspektorat	

LHE Nomor 4

**Dilaksanakan koordinasi rutin setiap triwulan
sebagai bentuk evaluasi atas capaian yang
telah dicapai**



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU**

Welas Mengembangkan Daya Saing Masyarakat Berkeadilan

Jl. Kanari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55185 Telp. (0274) 56241, 51888, 56283 Fax (0274) 56241
 e-mail: danptsp@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122786001 HOTLINE EMAIL: apb@jogjakota.go.id
 WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Nomor : 005/553 Yogyakarta, 4 April 2023
 Sifat : Biasa Kepada
 Lampiran : - Yth. Terhempir
 Hal : Rapat Koordinasi

di-
 YOGYAKARTA

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 April 2023
 Jam : 09:00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Wahyu Tununan
 Acara : Koordinasi dan Evaluasi Capaian Target Renstra (Sasaran OPD, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan) sesuai Peraturan Walikota No.35 Tahun 2022
 Penyelenggara : Sub Bagian PTF
 Pimpinan : Patricia Anggit SH

Demikian atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

KAPAL DINAS

 BUDI SANSYOSA, S.STP., M.Si.
 N.P. 197390141903011004

Daftar yang Diundang :

1. Ka Dinas PMPTSP
2. Sekretaris Dinas PMPTSP
3. Ka. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian DPMPPTSP
4. Koordinator PTSP 1
5. Koordinator PTSP 2
6. Koordinator PM 1
7. Koordinator PM 2
8. Patricia Anggit Sri Hanono
9. Hafidz Zein Muttajin
10. Dian Mutiara Hapsari
11. Dwi Wulandari
12. Dhianus Bayu
13. Puntawati Puspaningtyan
14. Fachrudin Nurlatif
15. Triwi Anjani
16. Mira Setyaningrum
17. Monica Evadne
18. Karika Arum
19. Khairunisa Puspitasari
20. Reza Pahlevi



SEGORO AMARTO
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJU NGAYOGYAKARTA
 KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN



SEGORO AMARTO
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJU NGAYOGYAKARTA
 KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
e-mail: dpmpptsp@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari,Tanggal : Rabu, 5 April 2023
Jam : 09:00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Wahyu Tumurun
Acara : Koordinasi dan Evaluasi Capaian Target Renstra (Sasaran OPD, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan) sesuai Peraturan Walikota No.35 Tahun 2022

NO	NAMA	INSTANSI/UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	ANANSBOGA TIRTAGUTAMA, S.T, M.Eng	DPMPPTSP	1.
2.	DIAN MUTIARA HAPSARI	DPMPPTSP	2.
3.	PATRICIA ANGGIT SRI HARSONO, S.E.	DPMPPTSP	3.
4.	KHAIRUNISA PUSPITASARI, S.E.I.	DPMPPTSP	4.
5.	R. NIKO WIRI PANGGIA SWURYANICUHIRI	DPMPPTSP	5.
6.	TIWI ANJANI	DPMPPTSP	6.
7.	MIRA SETYANINGRUM, S.E.	DPMPPTSP	7.
8.	FACHRUDIN NURLATIF, S.H.	DPMPPTSP	8.
9.	HAFIDZ ZEIN MUTTAQIN, S.H.	DPMPPTSP	9.
10.	KARTIKA ARUM KUSUMA, S.Psi.	DPMPPTSP	10.
11.	Dra. WIWIN GIRI DORIAWANI, M.M.	DPMPPTSP	11.
12.	DHIMAS BAYUSUSETYO, S.Si.	DPMPPTSP	12.
13.	SYAMSU EFFENDIE, S.H.	DPMPPTSP	13.
14.	NITYA RAHARIANTA, S.Sos., M.M.	DPMPPTSP	14.
15.	MUHAMMADREZAPAHLEVLAM IBrk	DPMPPTSP	15.
16.	NUR SIGIT EDI PUTRANTA, S.I.P.	DPMPPTSP	16.
17.	HANIEF RM	DPMPPTSP	17.

Yogyakarta, 5 April 2023
PPTK

ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T.,
M.Eng.
NIP. 197604072005011010



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
e-mail: dpmpptsp@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

NOTULEN

- Sidang/Rapat : Koordinasi dan Evaluasi Capaian Target Renstra (Sasaran OPD, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan) sesuai Peraturan Walikota No.35 Tahun 2022
- Hari/Tanggal : Rabu, 5 April 2023
- Waktu Panggilan : 09:00 WIB
- Waktu Sidang/Rapat : 09:00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Wahyu Tumurun
- Acara : 1. Pembukaan
2. Review Target Renstra Tahun 2023
3. Koordinasi dan Evaluasi Capaian Target Renstra (Sasaran OPD, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan)
4. Penutup
- Pimpinan Sidang/Rapat
- Ketua : Patricia Anggit SH
- Sekretaris :
- Pencatat : HAFIDZ ZEIN MUTTAQIN, S.H.
- Peserta Sidang/Rapat : 1. ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T., M.Eng. (DPMPTSP)
2. DIAN MUTIARA HAPSARI (DPMPTSP)
3. PATRICIA ANGGIT SRI HARSONO, S.E. (DPMPTSP)
4. KHAIRUNISA PUSPITASARI, S.E.I. (DPMPTSP)
5. PUNTOWATI PUSPANINGTYAS WURYANTO PUTRI, S.H. (DPMPTSP)
6. TIWI ANJANI (DPMPTSP)
7. MIRA SETYANINGRUM, S.E. (DPMPTSP)
8. FACHRUDIN NURLATIF, S.H. (DPMPTSP)
9. HAFIDZ ZEIN MUTTAQIN, S.H. (DPMPTSP)
10. KARTIKA ARUM KUSUMA, S.Psi. (DPMPTSP)
11. Dra. WIWIN GIRI DORIAWANI, M.M. (DPMPTSP)
12. DHIMAS BAYUSUSETYO, S.Si. (DPMPTSP)
13. SYAMSU EFFENDIE, S.H. (DPMPTSP)
14. NITYA RAHARJANTA, S.Sos., M.M. (DPMPTSP)
15. MUHAMMAD REZA PAHLEVI, A.Md.Bns. (DPMPTSP)
16. NUR SIGIT EDI PUTRANTA, S.LP. (DPMPTSP)
17. HANIEF RM (DPMPTSP)
- Kegiatan Sidang/Rapat : 1. Rapat dibuka oleh Patricia Anggit Sri Harsono, S.E. selaku Analis PEP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Rapat selanjutnya disampaikan oleh pemimpin rapat dan staf PEP dengan paparan Review Renstra Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra tahun 2023 (Sasaran OPD, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan)
3. Sesi pencermatan dan diskusi dibuka untuk membahas Review Renstra Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra tahun 2023 (Sasaran OPD,



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan)

1. Kata Pembukaan : Setelah hadir semua, pemimpin rapat membuka rapat dengan berdoa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta.
2. Pembahasan :
 1. Pemimpin rapat menyampaikan bahwa:
 - Target Renstra yang telah ditetapkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah nilai investasi sebesar 319.966.195.786
 - Capaian realisasi investasi tahun 2022 sebesar Rp 428.457.147.957. Hal ini disebabkan karena capaian realisasi investasi TW I tahun 2022 didukung oleh penambahan modal tetap Hotel New Saphir sebesar 68M dan dimana yang dilaporkan adalah realisasi investasi tahun sebelumnya karena Hotel New Saphir belum pernah LKPM. Selain itu PT Java Orient Properti sebesar 75M untuk nilai pematangan tanah, untuk proyek ini belum bisa dipastikan akan ada tambahan realisasi investasi karena gagal investasi, rencana proyek ini sebesar 300M
 - Rata-rata capaian realisasi per-triwulan (dengan mengecualikan Hotel New Saphir dan PT Java Orient Properti) sebesar RP 65M
 - Peraturan di 2023 terkait pelaporan realisasi investasi untuk pelaporan realisasi investasi tahun 2023 melalui LKPM yang bisa dilaporkan hanyalah penambahan modal pada periode tahun 2023 saja. Tidak dapat mengakomodir tambahan modal di tahun sebelumnya
 2. Pemimpin rapat menyampaikan bahwa Target pada Renstra Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022 pada tujuan dan sasaran DPMPTSP terkait "Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu" pada tahun 2023 sebesar 81,75 poin. Sedangkan hasil penilaian di tahun 2022 sebesar 60,68 predikat B. Hal ini dikarenakan banyaknya bukti dukung yang tidak diterima pada penilaian periode tersebut. Hasil ini membutuhkan pencermatan terkait naik turunnya target.
 3. Pemimpin rapat yang mengajak masing-masing koordinator kelompok substansi untuk melakukan pencermatan formula dan capaian target renstra tahun 2023 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 4. Pemimpin rapat memfasilitasi sesi diskusi selama forum rapat berlangsung.
 5. Pemimpin rapat menyampaikan bahwa akan dilakukan pemantauan berkala di tiap triwulan pada setiap capaian Indikator Program di tahun 2023
 6. Pemimpin rapat menyampaikan bahwa masing-masing kelompok substansi dan sub bagian untuk mengisi data capaian Indikator Program tiap triwulan pada *google sheet* yang telah disediakan sebagai dasar evaluasi dan pengukuran kinerja secara berkala
3. Keputusan :
 1. Disepakati bersama bahwa Sasaran nilai realisasi investasi tidak mengalami perubahan terkait target nilai investasi tahun 2023 masih merujuk Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
 2. Disepakati bersama bahwa Sasaran "Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu" masih tetap merujuk pada Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
 3. Menyepakati untuk mengisi data capaian Indikator Program yang dibutuhkan



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

untuk evaluasi dan pengukuran kinerja setiap triwulan pada *google sheet* yang telah disediakan dengan batas waktu paling lambat tanggal 14 pada setiap awal triwulan.

4. Apabila mengalami kendala dapat menghubungi atau datang langsung ke sub bagian PEP



PIMPINAN SIDANG/RAPAT
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T., M.Eng.
NIP. 197604072005011010





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU**

Wijaya Dacinidatanyu panyuwiryaning Dalemkandhi Kasuganing Ngayogyakarta

Jl. Kerasi No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 56186 Telp. (0274) 56241, 51586, 56282 Fax (0274) 56241
 e-mail : dampta@jogjakota.go.id HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : uwb@jogjakota.go.id
 WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Nomor : 000.1.5/2428 Yogyakarta, 12 Desember 2023
 Sifat : Biasa Kepada
 Lampiran : - Yth. Terlampir
 Hal : Koordinasi

di-
YOGYAKARTA

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
 Jam : 09:00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Kawang DPMPPTSP
 Acara : Rapat Koordinasi Capaian Sasaran OPD dan Capaian Sasaran Program Tahun 2023
 Penyelenggara : Sub Bag PEP
 Pimpinan : Patricia Anggit Sei Harsono, S.E

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

 
KEPALA DINAS
ELDI SASTYOSA, S.STP., M.Si.
 NIP. 197209141993031004

Daftar yang Diundang :

1. Ka Dinas PMPTSP
2. Sekretaris Dinas PMPTSP
3. Ka. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian DPMPPTSP
4. Koordinator PTSP 1
5. Koordinator PTSP 2
6. Koordinator PM 1
7. Koordinator PM 2
8. Patricia Anggit Sri Harsono
9. Hafidz Zein Muttaqin
10. Dian Mutiara Hapsari
11. Mira Setyaningrum
12. Purnawati Puspaningtyas
13. Monica Evalde
14. Hanief Rosihan Masduki
15. Kartika Arum
16. Fachrudin Nurlatif
17. Tiwi Anjani
18. Dwi Wulandari
19. Khairunnisa Puspitasari
20. Dhimas Bayu
21. M. Reza Fahlevi
22. Staff terkait



SEGORO AMARTO
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJLINE NGAYOGYAKARTA
 KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KERESAMAHAN



SEGORO AMARTO
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJLINE NGAYOGYAKARTA
 KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KERESAMAHAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

www.pentanamanmodal.pelayanan.jogjakota.go.id

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
e-mail: dpmptsp@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

NOTULEN

- Sidang/Rapat : Rapat Koordinasi Capaian Sasaran OPD dan Capaian Sasaran Program Tahun 2023
- Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
- Waktu Panggilan : 09:00 WIB
- Waktu Sidang/Rapat : 09:00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Kawung DPMPTSP
- Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan Koordinasi Capaian Sasaran OPD dan Capaian Sasaran Program Tahun 2023
3. Penutup
- Pimpinan Sidang/Rapat
- Ketua : Patricia Anggit Sri Harsono, S.E
- Sekretaris :
- Pencatat : HAFIDZ ZEIN MUTTAQIN, S.H.
- Peserta Sidang/Rapat : 1. DIAN MUTIARA HAPSARI (DPMPTSP)
2. KHAIRUNISA PUSPITASARI, S.E.I. (DPMPTSP)
3. PUNTOWATI PUSPANINGTYAS WURYANTO PUTRI, S.H. (DPMPTSP)
4. HAFIDZ ZEIN MUTTAQIN, S.H. (DPMPTSP)
5. DWI WULANDARI, S.E. (DPMPTSP)
6. FACHRUDIN NURLATIF, S.H. (DPMPTSP)
7. NITYA RAHARJANTA, S.Sos., M.M. (DPMPTSP)
8. NUR SIGIT EDI PUTRANTA, S.I.P. (DPMPTSP)
9. MIRA SETYANINGRUM, S.E. (DPMPTSP)
10. TIWI ANJANI (DPMPTSP)
11. Dra. WIWIN GIRI DORIAWANI, M.M. (DPMPTSP)
12. MUHAMMAD REZA PAHLEVI, A.Md.Bns. (DPMPTSP)
13. DHIMAS BAYUSUSETYO, S.Si. (DPMPTSP)
14. ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T., M.Eng. (DPMPTSP)
15. PATRICIA ANGGIT SRI HARSONO, S.E. (DPMPTSP)
16. MONICA EVADNE ISTI, S.E. (DPMPTSP)
17. EVI (DPMPTSP)
18. IKA MEY W (DPMPTSP)
19. BUDI SANTOSA (DPMPTSP)
- Kegiatan Sidang/Rapat : 1. Rapat dibuka oleh Patricia Anggit Sri Harsono, S.E. selaku Analis PEP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Rapat selanjutnya disampaikan oleh pemimpin rapat dan staf PEP dengan paparan Capaian Sasaran OPD dan Capaian Sasaran Program Tahun 2023, serta persiapan penyusunan LKIP 2023
3. Sesi pencermatan dan diskusi dibuka untuk Koordinasi Capaian Sasaran



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

OPD dan Capaian Sasaran Program Tahun 2023, serta persiapan penyusunan LKIP 2023

4. Penutup

1. Kata Pembukaan : Setelah hadir semua, pemimpin rapat membuka rapat dengan berdoa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta.
2. Pembahasan : 1. Pemimpin rapat memaparkan Berita Acara Desk Timbal Balik TW III untuk mengetahui progres tindak lanjut rekomendasi dari Hasil Desk Timbal Balik TW III.
2. Pemimpin rapat menyampaikan bahwa diperlukan adanya breakdown target investasi berdasarkan Triwulan dan mohon bantuan dari PM II.
3. Pemimpin rapat menanyakan progres Video Promosi Klinik Rumah Swadaya apakah sudah dibuat dan bagaimana distribusinya?
4. Staf PM I menjawab bahwa Video Promosi telah dibuat dan siap untuk didistribusikan ke setiap Kemantren yang kemudian dapat disebarluaskan oleh Kemantren ke masyarakat.
5. Pemimpin Rapat menyampaikan untuk semua petugas urusan untuk menambahkan pengisian hambatan realisasi fisik pada SIM Pelaporan.
6. Pemimpin Rapat menyampaikan untuk petugas urusan Umpeg dan keuangan untuk menghitung sisa anggaran SPPD agar dapat dilaporkan ke Kepala Dinas.
7. Pemimpin rapat memfasilitasi sesi diskusi selama forum rapat berlangsung.
8. Staf PTSP I menyampaikan bahwa realisasi fisik kemungkinan tidak bisa mencapai 100% karena diperkirakan jumlah pemohon yang melakukan konsultasi di loket PTSP tidak mencapai target.
9. Dari hasil diskusi disepakati untuk menambahkan data pengunjung loket PPID dan loket konsultasi APK karena pelayanan pada loket tersebut terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Apabila target fisik tidak dapat tercapai maka target keuangan tidak boleh diatas target fisik.
10. Pemimpin rapat yang mengajak masing-masing koordinator kelompok substansi dan tim untuk melakukan pencermatan LAKIP 2022.
11. Pemimpin rapat menyampaikan bahwa dari masing-masing kelompok substansi untuk mengumpulkan bahan untuk penyusunan LKIP diantaranya faktor pendorong dan penghambat, permasalahan yang timbul, solusi yang telah dilaksanakan serta tambahan bukti dukung yang dapat disertakan diantaranya yaitu realisasi investasi Nasional dan DIY dibandingkan dengan realisasi investasi Kota Yogyakarta. Dikumpulkan maksimal tanggal 29 Desember 2023.
12. Pemimpin rapat menyampaikan untuk Realisasi Investasi Kota Yogyakarta pada TW IV menggunakan nilai dari forecast serta dimohon untuk PM II membantu menyediakan data investasi per-sektor, serta kategori investasi PMA dan PMDN dari TW I hingga TW III karena untuk TW IV sulit untuk memilah data dari forecast.
13. Pemimpin rapat menyampaikan bahwa cutoff untuk forecast realisasi investasi pada tanggal 25 Januari 2025.
14. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan dapat menghubungi Sub bag PEP melalui telepon, whatsapp, atau datang langsung ke sekretariat.
3. Keputusan : 1. Menyepakati diperlukan adanya breakdown target investasi berdasarkan Triwulan dan mohon bantuan dari PM II.
2. Menambahkan bahwa Video Promosi telah dibuat dan siap untuk didistribusikan ke setiap Kemantren yang kemudian dapat disebarluaskan oleh Kemantren ke masyarakat



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

3. Disepakati bersama untuk pengisian hambatan realisasi fisik pada SIM Pelaporan.
4. Disepakati bersama bahwa data pengunjung loket PPID dan loket konsultasi APK untuk ikut dihitung sebagai masyarakat yang konsultasi karena pelayanan pada loket tersebut terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Apabila target fisik tidak dapat tercapai maka target keuangan tidak boleh diatas target fisik.
5. Menambahkan bahwa dari masing-masing kelompok substansi untuk mengumpulkan bahan untuk penyusunan LKIP diantaranya faktor pendorong dan penghambat, permasalahan yang timbul, solusi yang telah dilaksanakan serta tambahan bukti dukung yang dapat disertakan diantaranya yaitu realisasi investasi Nasional dan DIY dibandingkan dengan realisasi investasi Kota Yogyakarta. Dikumpulkan maksimal pada tanggal 29 Desember 2023.
6. Menyetujui bahwa untuk Realisasi Investasi Kota Yogyakarta pada TW IV menggunakan nilai dari forecast, PM II untuk membantu menyediakan data investasi per-sektor, serta kategori investasi PMA dan PMDN dari TW I hingga TW III karena untuk TW IV sulit untuk memilah data dari forecast.
7. Menyetujui bahwa cutoff forecast realisasi investasi pada tanggal 25 Januari 2025
8. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan dapat menghubungi Sub bag PEP melalui telepon, whatsapp, atau datang langsung ke sekretariat.



PIMPINAN SIDANG/RAPAT
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T., M.Eng.
NIP. 197604072005011010



LHE Nomor 5

Dilaksanakan rapat koordinasi rutin setiap bulan yang mengundang masing-masing PPTK dan petugas urusan untuk melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rencana pencapaian target setiap triwulan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU**

Kota Yogyakarta

Jl. Keran No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55185 Telp. (0274) 595241, 931665, 902982 Fax (0274) 595241
 e-mail: dpmpptsp@yogyakarta.go.id HOTLINE SMS: 08122790091 HOTLINE EMAIL: zark@yogyakarta.go.id
 WEBSITE: www.yogyakarta.go.id

Nomor : 005/674 Yogyakarta, 27 April 2023
 Sifat : Biasa Kopeda
 Lampiran : - Yth. Terlampir
 Hal : Rapat Koordinasi

di-
 YOGYAKARTA

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 3 Mei 2023
 Jam : 09:00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Wahya Tumurun
 Acara : Koordinasi dan Evaluasi Capaian TW I berdasarkan hasil Desk TW I & Progres Capaian Fisik Keuangan TW II
 Penyelenggara : Sub Bag PEP
 Pempinan : Patricia Anggit Sri Harsono

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS


 ERIKI SASTIYOSA, S.STP., M.Si.
 NIP. 97309141993031004

Daftar yang Diundang :

1. Ka Dinas PMPTSP
2. Sekretaris Dinas PMPTSP
3. Ka. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian DPMPPTSP
4. Koordinator PTSP 1
5. Koordinator PTSP 2
6. Koordinator PM 1
7. Koordinator PM 2
8. Patricia Anggit Sri Harsono
9. Hafidz Zain Muttajin
10. Dian Mutiara Hapsari
11. Fachrudin Nurlatif
12. Tiwi Anjani
13. Octavia Widani
14. Murya Agus Kumawati
15. Kartika Arum
16. Dwi Walandari
17. Estiningsih
18. Dhimas Bayu
19. Pinastika Larasati
20. Monica Eradna
21. Hanief Roudhotul Mubdi
22. Mira Setyaningrum
23. Ulvi Rana Nurmalia Madyawati



SEGORO AMARTO
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWI MAJLINE NGAYOGYAKARTA
 KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULUAN – KEBERSAMAAN



SEGORO AMARTO
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWI MAJLINE NGAYOGYAKARTA
 KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULUAN – KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU**

ꦏꦺꦩꦤꦢꦶꦫꦶꦤ꧀ꦠꦺꦤꦤꦩꦺꦢꦏꦺꦩꦧꦸꦥꦺꦭꦪꦤꦠꦺꦫꦠꦱꦠꦸꦩꦶꦤꦠꦸ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
 e-mail: dpmptsp@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
 WEBSITE: www.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari,Tanggal : Rabu, 3 Mei 2023
 Jam : 09:00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Wahyu Tumurun
 Acara : Koordinasi dan Evaluasi Capaian TW I berdasarkan hasil Desk TW I & Progres
 Capaian Fisik Keuangan TW II

NO	NAMA	INSTANSI/UNIT KERJA	TANDA TANGAN	
1.	PATRICIA ANGGIT SRIHARSONO, S.E.	DPMPTSP	1.	
2.	FACHRUDIN NURLATIF, S.H.	DPMPTSP		2.
3.	NUR SIGIT EDI PUTRANTA, S.I.P.	DPMPTSP	3.	
4.	OCTARIA WIDANI, S.E.	DPMPTSP		4.
5.	TIWI ANJANI	DPMPTSP	5.	
6.	PINASTIKA LARASATI, S.E	DPMPTSP		6.
7.	DIAN MUTIARA HAPSARI	DPMPTSP	7.	
8.	ULHRANANURMALAMADYAWATI,SM	DPMPTSP		8.
9.	ESTININGSIH	DPMPTSP	9.	
10.	MIRA SETYANINGRUM, S.E.	DPMPTSP		10.
11.	HANIEF ROUHAN MASHADI, S.E.	DPMPTSP	11.	
12.	DHIMAS BAYUSUSETYO, S.Si.	DPMPTSP		12.
13.	NITYA RAHARJANTA, S.Sos., M.M.	DPMPTSP	13.	
14.	Dra. WIWIN GIRI DORIAWANI, M.M.	DPMPTSP		14.
15.	ANANSBOGATIRTAGUTAMA,ST,MEng	DPMPTSP	15.	
16.	DWI WULANDARI, S.E.	DPMPTSP		16.
17.	KARTIKA ARUM KUSUMA, S.Psi.	DPMPTSP	17.	
18.	MONICA EVADNE ISTI, S.E.	DPMPTSP		18.
19.	HAFIDZ ZEIN MUTTAQIN, S.H.	DPMPTSP	19.	
20.	MURYA AGUS KUSNAWAN	DPMPTSP		20.

Yogyakarta, 3 Mei 2023
 PPTK

ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T.,
 M.Eng.



SEGORO AMARTO
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
 KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

NIP. 197604072005011010



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Wahana Investasi dan Pengembangan Wilayah Kota Yogyakarta

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
e-mail: dpmpptsp@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

NOTULEN

Sidang/Rapat : Koordinasi dan Evaluasi Capaian TW I berdasarkan hasil Desk TW I & Progres Capaian Fisik Keuangan TW II
Hari/Tanggal : Rabu, 3 Mei 2023
Waktu Panggilan : 09:00 WIB
Waktu Sidang/Rapat : 09:00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Wahyu Tumurun
Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan Koordinasi dan Evaluasi Capaian TW I berdasarkan hasil Desk TW I serta Progress Capaian Fisik Keuangan TW II
3. Penutup

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua : Patricia Anggit Sri Harsono

Sekretaris :

Pencatat : HAFIDZ ZEIN MUTTAQIN, S.H.

Peserta Sidang/Rapat : 1. PATRICIA ANGGIT SRI HARSONO, S.E. (DPMPTSP)

2. FACHRUDIN NURLATIF, S.H. (DPMPTSP)

3. NUR SIGIT EDI PUTRANTA, S.I.P. (DPMPTSP)

4. OCTARIA WIDANI, S.E. (DPMPTSP)

5. TIWI ANJANI (DPMPTSP)

6. PINASTIKA LARASATI, S.E (DPMPTSP)

7. DIAN MUTIARA HAPSARI (DPMPTSP)

8. ULFI RANA NURMALA MADYAWATI, S.M. (DPMPTSP)

9. ESTININGSIH (DPMPTSP)

10. MIRA SETYANINGRUM, S.E. (DPMPTSP)

11. HANIEF ROUHAN MASHADI, S.E. (DPMPTSP)

12. DHIMAS BAYUSUSETYO, S.Si. (DPMPTSP)

13. NITYA RAHARJANTA, S.Sos., M.M. (DPMPTSP)

14. Dra. WIWIN GIRI DORIAWANI, M.M. (DPMPTSP)

15. ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T., M.Eng. (DPMPTSP)

16. DWI WULANDARI, S.E. (DPMPTSP)

17. KARTIKA ARUM KUSUMA, S.Psi. (DPMPTSP)

18. MONICA EVADNE ISTI, S.E. (DPMPTSP)

19. HAFIDZ ZEIN MUTTAQIN, S.H. (DPMPTSP)

20. MURYA AGUS KUSNAWAN (DPMPTSP)

Kegiatan Sidang/Rapat : 1. Rapat dibuka oleh Patricia Anggit Sri Harsono, S.E. selaku Analis PEP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Rapat selanjutnya disampaikan oleh pemimpin rapat dan staf PEP dengan paparan Koordinasi dan Evaluasi Capaian TW I berdasarkan hasil Desk TW I serta Progress Capaian Fisik Keuangan TW II.
3. Sesi pencermatan dan diskusi dibuka untuk membahas Koordinasi dan



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

Evaluasi Capaian TW I berdasarkan hasil desk TW I serta Progress
Capaian Fisik Keuangan TW II.

1. Kata Pembukaan : Setelah hadir semua, pemimpin rapat membuka rapat dengan berdoa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta.
2. Pembahasan :
 1. Pemimpin rapat menyampaikan apresiasi terhadap capaian hasil desk Timbal Balik Triwulan I DPMPTSP.
 2. Pemimpin rapat menyampaikan bahwa pengisian SIM Pelaporan harus dilakukan secara teliti dan alasan yang diinputkan harus jelas.
 3. Pemimpin rapat menyampaikan bahwa PIC capaian program untuk dapat mengisi kolom kekurangan berisi perhitungan atau keterangan tambahan.
 4. Pemimpin rapat menyampaikan bahwa PIC capaian program diharapkan untuk upload bukti dukung isian per triwulan di google drive yang telah disediakan.
 5. Pemimpin rapat menyampaikan bahwa akan ada pemberian bintang penghargaan di setiap Triwulan.
 6. Pemimpin rapat menyampaikan bahwa peraih bintang penghargaan TW I diraih oleh PEP sebagai Juara 1, Keuangan sebagai Juara 2 dan PM I sebagai Juara 3.
 7. Pemimpin rapat menyampaikan bahwa untuk selanjutnya SPJ discan dan disimpan di *google drive* untuk kepentingan penilaian agar tidak perlu membongkar file keuangan.
 8. Pemimpin rapat memfasilitasi sesi diskusi selama forum rapat berlangsung.
 9. Pemimpin rapat menyampaikan bahwa usulan dari Pak Boga yaitu disiapkan komputer server yang dapat diakses beberapa komputer lain sebagai penyimpanan data.
 10. Pemimpin rapat menyampaikan bahwa usulan dari Pak Nitya yaitu foto snack dan makanan ditambahkan dalam berkas SPJ.
3. Keputusan :
 1. Disepakati bersama untuk tetap mempertahankan kinerja.
 2. Menyetujui untuk Pengisian SIM Pelaporan harus dilakukan secara teliti dan mengisi alasan dengan jelas.
 3. Menyetujui bahwa PIC capaian program untuk dapat mengisi kolom kekurangan berisi perhitungan atau keterangan tambahan.
 4. Menyetujui bahwa akan ada pemberian penghargaan di setiap Triwulan.
 5. Menyetujui bahwa SPJ akan discan dan disimpan di *google drive* untuk kepentingan penilaian.
 6. Menyetujui bahwa akan disiapkan komputer server sebagai pusat penyimpanan data yang bisa diakses beberapa komputer.
 7. Menyetujui untuk menambahkan foto snack dan makanan dalam berkas SPJ.
 8. Apabila mengalami kendala dapat menghubungi melalui *whatsapp* atau datang langsung ke sub bagian PEP.



PIMPINAN SIDANG/RAPAT
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T., M.Eng.
NIP. 197604072005011010



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU**

www.pusatpelayanankota.yogyakarta.go.id

Jl. Kerat No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp: (0274) 555241, 515885, 562882 Fax: (0274) 555241
 e-mail: dpmpptsp@yogyakarta.go.id HOTLINE SMS: 08122799001 HOTLINE EMAIL: uwb@yogyakarta.go.id
 WEBSITE: www.yogyakarta.go.id

Nomor : 000.1.5/2141 Yogyakarta, 6 November 2023
 Sifat : Biasa Kepada
 Lampiran :- Yth. Terlampir
 Hal : Koordinasi

di-
 YOGYAKARTA

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 November 2023
 Jam : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Wahyu Tumuran
 Acara : Rapat evaluasi dan koordinasi realisasi fisik-realisasi keuangan s/d bulan Oktober 2023 serta rencana realisasi fisik-realisasi keuangan TW III
 Penyelenggara : Sub Bag PEP
 Pimpinan : Patricia Anggit Sri Harsono, S.E

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS


 PATRICIA ANGGIT SRI HARSONO, S.STP., M.Si
 NIP. 197309141993031004

Daftar yang Diundang :

1. Ka Dinas PMPTSP
2. Sekretaris Dinas PMPTSP
3. Ka. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian DPMPPTSP
4. Koordinator PTSP 1
5. Koordinator PTSP 2
6. Koordinator PM 1
7. Koordinator PM 2
8. Patricia Anggit Sri Harsono
9. Hafidz Zein Muttaqin
10. Dian Mutiara Hapsari
11. Fachrudin Nurlahf
12. Ulfi Rana Nurmala
13. Mira Setyaningrum
14. Tiwi Anjani
15. Pinastika Larasati
16. Monica Evadne
17. Harief Roshan Mahadi
18. Dwi Wulandari
19. Kartika Arum
20. Murya Agus Kusuman
21. Khairunnisa Puspitasari
22. Octaria Wilani



SEGORO AMARTO
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
 KEMANDIRIAN – KEDISPLINAN – KEPEDULIAN – KERESAMAAN



SEGORO AMARTO
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
 KEMANDIRIAN – KEDISPLINAN – KEPEDULIAN – KERESAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Wakil Gubernur dan Wakil Bupati

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
e-mail: dpmpptsp@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Kamis, 9 November 2023
Jam : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Wahyu Tumurun
Acara : Rapat evaluasi dan koordinasi realisasi fisik-realalisasi keuangan s/d bulan Oktober 2023 serta rencana realisasi fisik-realalisasi keuangan TW III

NO	NAMA	INSTANSI/UNIT KERJA	TANDA TANGAN	
1.	DIAN MUTIARA HAPSARI	DPMPPTSP	1.	
2.	MONICA EVADNE ISTI, S.E.	DPMPPTSP		2.
3.	PATRICIA ANGGIT SRI HARSONO, S.E.	DPMPPTSP	3.	
4.	ULHRANANURMALAMADYAWAITSM	DPMPPTSP		4.
5.	HANIEF ROUHAN MASHADI, S.E.	DPMPPTSP	5.	
6.	HAFIDZ ZEIN MUTTAQIN, S.H.	DPMPPTSP		6.
7.	MIRA SETYANINGRUM, S.E.	DPMPPTSP	7.	
8.	ANANSBOGATIRTAGUTAMA, S.T., M.Eng.	DPMPPTSP		8.
9.	KARTIKA ARUM KUSUMA, S.Psi.	DPMPPTSP	9.	
10.	NUR SIGIT EDI PUTRANTA, S.I.P.	DPMPPTSP		10.
11.	ESTININGSIH	DPMPPTSP	11.	
12.	KHAIRUNISA PUSPITASARI, S.E.I.	DPMPPTSP		12.
13.	DWI WULANDARI, S.E.	DPMPPTSP	13.	
14.	TIWI ANJANI	DPMPPTSP		14.
15.	OCTARIA WIDANI, S.E.	DPMPPTSP	15.	
16.	PINASTIKA LARASATI, S.E.	DPMPPTSP		16.
17.	NITYA RAHARJANTA, S.Sos., M.M.	DPMPPTSP	17.	
18.	MURYA AGUS KUSNAWAN	DPMPPTSP		18.
19.	BUDI SANTOSA	DPMPPTSP	19.	
20.	Dra. WIWIN GIRI DORIAWANI, M.M.	DPMPPTSP		20.

Yogyakarta, 9 November 2023
PPTK

ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T.,
M.Eng.



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

NIP. 197604072005011010



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

www.pemerintahkota.yogyakarta.go.id

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
e-mail: dpmptsp@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

NOTULEN

Sidang/Rapat : Rapat evaluasi dan koordinasi realisasi fisik-realisasi keuangan s/d bulan Oktober 2023 serta rencana realisasi fisik-realisasi keuangan TW III
Hari/Tanggal : Kamis, 9 November 2023
Waktu Panggilan : 13:00 WIB
Waktu Sidang/Rapat : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Wahyu Tumurun
Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan Evaluasi dan Koordinasi realisasi fisik-realisasi keuangan sd bulan Oktober 2023 serta rencana realisasi fisik-realisasi keuangan TW III
3. Penutup

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua : Patricia Anggit Sri Harsono, S.E

Sekretaris :

Pencatat : HAFIDZ ZEIN MUTTAQIN, S.H.

Peserta Sidang/Rapat

1. DIAN MUTIARA HAPSARI (DPMPTSP)
2. MONICA EVADNE ISTI, S.E. (DPMPTSP)
3. PATRICIA ANGGIT SRI HARSONO, S.E. (DPMPTSP)
4. ULFI RANA NURMALA MADYAWATI, S.M. (DPMPTSP)
5. HANIEF ROUHAN MASHADI, S.E. (DPMPTSP)
6. HAFIDZ ZEIN MUTTAQIN, S.H. (DPMPTSP)
7. MIRA SETYANINGRUM, S.E. (DPMPTSP)
8. ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T., M.Eng. (DPMPTSP)
9. KARTIKA ARUM KUSUMA, S.Psi. (DPMPTSP)
10. NUR SIGIT EDI PUTRANTA, S.I.P. (DPMPTSP)
11. ESTININGSIH (DPMPTSP)
12. KHAIRUNISA PUSPITASARI, S.E.I. (DPMPTSP)
13. DWI WULANDARI, S.E. (DPMPTSP)
14. TIWI ANJANI (DPMPTSP)
15. OCTARIA WIDANI, S.E. (DPMPTSP)
16. PINASTIKA LARASATI, S.E (DPMPTSP)
17. NITYA RAHARJANTA, S.Sos., M.M. (DPMPTSP)
18. MURYA AGUS KUSNAWAN (DPMPTSP)
19. BUDI SANTOSA (DPMPTSP)
20. Dra. WIWIN GIRI DORIAWANI, M.M. (DPMPTSP)

- Kegiatan Sidang/Rapat :
1. Rapat dibuka oleh Patricia Anggit Sri Harsono, S.E. selaku Analis PEP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Yogyakarta.
 2. Rapat selanjutnya disampaikan oleh pemimpin rapat dan staf PEP dengan paparan Evaluasi dan Koordinasi realisasi fisik-realisasi keuangan sd bulan Oktober 2023 serta rencana realisasi fisik-realisasi keuangan TW III
 3. Sesi pencermatan dan diskusi dibuka untuk Evaluasi dan Koordinasi



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

realisasi fisik-realisasi keuangan sd bulan Oktober 2023 serta rencana realisasi fisik-realisasi keuangan TW III

4. Penutup

1. Kata Pembukaan : Setelah hadir semua, pemimpin rapat membuka rapat dengan berdoa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta.
2. Pembahasan :
 1. Pemimpin rapat membahas terkait realisasi fisik dan realisasi keuangan pada bulan Oktober
 2. Pemimpin rapat yang mengajak masing-masing koordinator kelompok substansi dan tim untuk melakukan pencermatan pelaksanaan kegiatan bulan Oktober pada SIM Pelaporan
 3. Pemimpin rapat memfasilitasi sesi diskusi selama forum rapat berlangsung.
 4. Pemimpin rapat menyampaikan untuk PTSP I ada target output yang diubah di perubahan menjadi 300 namun pada bulan oktober sudah melebihi dari 300.
 5. Staf PTSP I menyampaikan bahwa output tersebut dikarenakan Dinas Perdagangan sedang gencar untuk TDG sehingga target lebih dari 300
 6. Pemimpin rapat menyampaikan bahwa untuk gaji dan tunjangan mengikuti arahan BPKAD
 7. Pemimpin rapat menanyakan progress dari Umpeg terkait rapat dan fotocopy, pemeliharaan gedung, dan penataan interior mpp
 8. Staf Umpeg menyampaikan bahwa rapat dan fotocopy memang ada yang belum terlaksana, untuk pemeliharaan gedung penataan kelistrikan akan dilakukan pembayaran secara sekaligus, dan penataan interior MPP belum dimulai.
 9. Pemimpin rapat menanyakan terkait deviasi dari PM I
 10. Staf PM I menyampaikan bahwa makan minum sosialisasi, video profil, makan minum rapat belum selesai. Untuk buku saku tinggal mencetak dan kajian masih dalam proses perbaikan.
 11. Pemimpin rapat menanyakan penyebab PM II ada deviasi positif
 12. Staf PM II menyampaikan bahwa deviasi positif disebabkan karena pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan melebihi dari target dan pengawasan telah dilakukan pada 60 kegiatan usaha dan 47 kali kunjungan usaha.
 13. Staf PM II menyampaikan bahwa sisa anggaran untuk PM II yaitu bimtek kurang 1 kali dan selisih honor narasumber, honor pengarah dan sisa BBM.
 14. Pemimpin rapat menanyakan hambatan realisasi fisik dan keuangan PTSP II
 15. Staf PTSP II menyampaikan bahwa rapat mundur dari tatakala sesuai kebutuhan dan gaji PJLOP dibayarkan awal bulan berikutnya.
 16. Pemimpin rapat menyampaikan bahwa untuk perjalanan dinas masih ada Rakornas, Studi banding peta potensi dan kunjungan ke ANRI.
 17. Pemimpin rapat menyampaikan untuk menghitung penggunaan dana Perjalanan dinas untuk disesuaikan dengan anggaran yang ada di Akhir Tahun
 18. Pemimpin rapat menyampaikan bahwa anggaran 2023 untuk perbuahan anggaran mohon mengikuti surat edaran langkah-langkah akhir tahun.
 19. Pemimpin rapat menyampaikan untuk memaksimalkan serapan anggaran agar insentif fiskal yang diterima bisa maksimal dan dapat digunakan untuk sumber dana pembiayaan daerah.
 20. Pemimpin rapat menyampaikan untuk bagian keuangan dapat membantu mengawal PPTK dan petugas urusan dalam realisasi anggaran tahun 2023.
 21. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan dapat menghubungi Sub bag PEP melalui telepon, whatsapp, atau datang langsung ke sekretariat.
3. Keputusan :
 1. Menyetujui hasil rapat evaluasi dan koordinasi realisasi fisik-realisasi



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

keuangan sd bulan Oktober 2023 serta rencana realisasi fisik-realisasi keuangan TW III

2. Disepakati bersama untuk melaksanakan kegiatan sesuai tatakala sehingga realisasi fisik dan keuangan tidak mengalami deviasi.
3. Menyetakati untuk menghitung kebutuhan perjalanan dinas agar dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersisa.
4. Menyetakati bahwa anggaran 2023 untuk perbuahan anggaran mohon mengikuti surat edaran langkah-langkah akhir tahun.
5. Menyetakati untuk bagian keuangan dapat membantu mengawal PPTK dan petugas urusan dalam realisasi anggaran tahun 2023.
6. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan dapat menghubungi Sub bag PEP melalui telepon, whatsapp, atau datang langsung ke sekretariat.



PIMPINAN SIDANG/RAPAT
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T., M.Eng.
NIP. 197604072005011010



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

Lampiran 6
Lampiran SK Penghargaan dan Reward



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦏꦺꦥꦸꦠꦱꦤ꧀ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦥꦺꦤꦤꦩꦠꦤ꧀ꦥꦺꦭꦪꦤꦠꦺꦫꦠꦸꦱꦠꦸꦩꦶꦤꦠꦸ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55185 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
E-MAIL: dpmpstsp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 37/KEP/DPMPSTSP/2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI PNS DAN NON PNS

DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa sistem pengendalian manajemen penting untuk diterapkan dengan manusia merupakan sumber daya organisasi yang harus dilakukan pengelolaan dengan baik untuk dapat mewujudkan visi, misi, strategi dan tujuan organisasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
 - bahwa untuk memberikan penghargaan dan sanksi kepada pegawai maka perlu ditetapkan pedoman penghargaan dan sanksi dengan keputusan Kepala Dinas
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang pedoman Analisis Jabatan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI PNS DAN NON PNS DI KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Keputusan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Memberlakukan Keputusan Pemberian Penghargaan dan sanksi kepada pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KETIGA : Keputusan Pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai sebagai dasar dan acuan dalam melaksanakan penilaian atas kegiatan pegawai sesuai dengan tupoksinya dan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan untuk mengukur dan menentukan kinerja dari pegawai dimaksud untuk dapat ditentukan dalam pemberian penghargaan atau sanksi yang diberikan melalui orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin dan kerjasama didalam melaksanakan tugas dan kegiatan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Desember 2022



LAMPIRAN : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU STU
PINTU KOTA YOGYAKARTA
Nomor : 37/KEP/DPMPSTP/2022
Tanggal : 1 Desember 2022

TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
SANKSI BAGI PEGAWAI PNS DAN NON PNS
DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
YOGYAKARTA

Pemberian Penghargaan dan Sanksi

Kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) Kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023. Pegawai sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil atau Kontrak, yang memiliki tugas dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pegawai Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berdasarkan hasil penilaian yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai pegawai terbaik akan memperoleh penghargaan (Reward) berupa Piagam Penghargaan dan ditetapkan sebagai Pegawai Terbaik.

Penilaian Kinerja sebagai petugas terbaik dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal I, Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal II, Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I, Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II dan Kasubag Umum Kepegawaian. Unsur yang dinilai, diantaranya adalah:

- a. Orientasi Pelayanan
- b. Integritas
- c. Komitmen
- d. Disiplin
- e. Kerjasama

Hukuman untuk pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah berupa teguran dan peringatan tertulis dari Kepala Dinas dan hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat.

Kriteria dan Point Penilaian PNS

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
A	Orientasi Pelayanan	0 s.d 100	
1	Menciptakan Inovasi	0 s.d 100	
2	Menyelesaikan Pekerjaan/Laporan Tepat Waktu	0 s.d 100	
B	Integritas	0 s.d 100	
1	Kejujuran	0 s.d 100	
2	Moral	0 s.d 100	
C	Komitmen	0 s.d 100	
1	Kepatuhan	0 s.d 100	
2	Menyelesaikan Tugas/Perintah	0 s.d 100	
D	Disiplin	0 s.d 100	
1	Capaian Kedisiplinan	0 s.d 100	
2	Tindak Korupsi Waktu	0 s.d 100	
E	Kerjasama	0 s.d 100	
1	Bekerja dengan Tim	0 s.d 100	
2	Bekerja individu	0 s.d 100	
	Total	0 s.d 100	

Keterangan Poin Penilaian:

0 s.d 50 bernilai Buruk

51 s.d 60 bernilai Sedang

61 s.d 75 bernilai Cukup

76 s.d 90 bernilai Baik

91 s.d 100 bernilai Sangat Baik

Kriteria dan Point Penilaian NON PNS/KONTRAK

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
A	Integritas	0 s.d 100	
1	Kejujuran	0 s.d 100	
2	Moral	0 s.d 100	
B	Komitmen	0 s.d 100	
1	Kepatuhan	0 s.d 100	
2	Menyelesaikan Tugas/Perintah	0 s.d 100	
C	Kerjasama	0 s.d 100	
1	Bekerja dengan Tim	0 s.d 100	
2	Bekerja Individu	0 s.d 100	
	Total	0 s.d 100	

Keterangan Poin Penilaian:

- 0 s.d 50 bernilai Buruk
- 51 s.d 60 bernilai Sedang
- 61 s.d 75 bernilai Cukup
- 76 s.d 90 bernilai Baik
- 91 s.d 100 bernilai Sangat Baik

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN BELAYAKAN TERPADU SATU PINTU





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PIAGAM PENGHARGAAN

NO: 400.14.11/11/2024

DIBERIKAN KEPADA:

Patricia Anggit Sri Harsono, S.E.

Atas Capaian Prestasinya Sebagai:

PEGAWAI TERFAVORIT

*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2023*

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Kepala Dinas



Budi Santosa, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PIAGAM PENGHARGAAN

NO: 400.14.11/09/2024

DIBERIKAN KEPADA:

Puntowati Puspaningtyas Wuryanto Putri, S.H.

NIP 198804122020122009

Atas Capaian Prestasinya Sebagai:

PEGAWAI TELADAN KATEGORI PNS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2023

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Kepala Dinas



Budi Santosa, S.STP., M.Si.

NIP.197209141993031004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PIAGAM PENGHARGAAN

NO: 400.14.11/10/2024

DIBERIKAN KEPADA:

Sri Rahayu Pangestuti

Atas Capaian Prestasinya Sebagai:

PEGAWAI TELADAN KATEGORI NON PNS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Tahun Anggaran 2023

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Kepala Dinas



Budi Santosa, S.STP., M.Si.

NIP. 197209141993031004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PIAGAM PENGHARGAAN

NO: 400.14.11/03/2024

DIBERIKAN KEPADA:

Nur Sigit Edi Putranta, S.I.P.

PPTK

*Atas terserapnya anggaran triwulanan secara maksimal pada:
**Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***

*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2023*

JUARA III

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Kepala Dinas



Budi Santosa, S.STP., M.Si.

NIP.197209141993031004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PIAGAM PENGHARGAAN

NO: 400.14.11/02/2024

DIBERIKAN KEPADA:

Anans Boga Tirta Gutama, S.T., M. Eng.

PPTK

Atas terserapnya anggaran triwulanan secara maksimal pada:

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Tahun Anggaran 2023

JUARA II

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Kepala Dinas



Budi Santosa, S.STP., M.Si.

NIP. 197209141993031004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PIAGAM PENGHARGAAN

NO: 400.14.11/01/2024

DIBERIKAN KEPADA:

Anans Boga Tirta Gutama, S.T., M. Eng.

PPTK

Atas terserapnya anggaran triwulanan secara maksimal pada:

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Tahun Anggaran 2023

JUARA I

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Kepala Dinas



Budi Santosa, S.STP., M.Si.

NIP. 197209141993031004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PIAGAM PENGHARGAAN

NO: 400.14.11/08/2024

DIBERIKAN KEPADA:

Anans Boga Tirta Gutama, S.T., M. Eng.

PPTK

Atas terserapnya anggaran program secara maksimal pada:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Tahun Anggaran 2023

JUARA HARAPAN II

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Kepala Dinas



Budi Santosa, S.STP., M.Si.

NIP. 197209141993031004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PIAGAM PENGHARGAAN

NO: 400.14.11/07/2024

DIBERIKAN KEPADA:

Nitya Raharjanta, S.Sos., M.M.
PPTK

Atas terserapnya anggaran program secara maksimal pada:

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Tahun Anggaran 2023

JUARA HARAPAN I

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Kepala Dinas



Budi Santosa, S.STP., M.Si.

NIP. 197209141993031004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PIAGAM PENGHARGAAN

NO: 400.14.11/06/2024

DIBERIKAN KEPADA:

Dra. Wiwin Giri Doriawani, M.M.

PPTK

Atas terserapnya anggaran program secara maksimal pada:

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2023*

JUARA III

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Kepala Dinas



Budi Santosa, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PIAGAM PENGHARGAAN

NO: 400.14.11/05/2024

DIBERIKAN KEPADA:

Syamsu Effendie, S.H.

PPTK

Atas terserapnya anggaran program secara maksimal pada:

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Tahun Anggaran 2023

JUARA II

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Kepala Dinas



Budi Santosa, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PIAGAM PENGHARGAAN

NO: 400.14.11/04/2024

DIBERIKAN KEPADA:

Nur Sigit Edi Putranta, S.I.P.

PPTK

Atas terserapnya anggaran program secara maksimal pada:

Program Pelayanan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Tahun Anggaran 2023

JUARA I

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Kepala Dinas



Budi Santosa, S.STP., M.Si.

NIP. 197209141993031004

Lampiran 7
Realisasi APBD TA 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2022

Halaman : 1

kode rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Size Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
6.	BELANJA DAERAH	17.943.366.483,00	13.491.296.285,00	473.019.398,00	96,36
6.1.	BELANJA OPERASI	11.758.774.633,00	11.300.164.235,00	458.610.398,00	96,10
6.1.01	Belanja Pegawai	4.935.151.000,00	4.576.306.775,00	358.844.225,00	92,71
6.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.423.503.000,00	2.144.207.240,00	279.295.760,00	90,55
6.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.714.820.611,00	1.581.258.400,00	129.562.211,00	92,44
6.1.01.01.01.0000	Belanja Gaji Pokok PNS	1.671.820.611,00	1.575.320.400,00	91.500.438,00	94,47
6.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PPPK	42.999.775,00	5.933.000,00	37.066.775,00	13,80
6.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	167.719.901,00	138.138.533,00	29.581.368,00	82,39
6.1.01.01.02.0000	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	163.758.733,00	137.467.813,00	26.290.920,00	94,93
6.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.961.168,00	800.720,00	3.160.448,00	13,91
6.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	57.543.500,00	43.870.000,00	11.773.500,00	76,41
6.1.01.01.03.0000	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	24.888.750,00	43.408.000,00	8.499.250,00	82,80
6.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	2.654.750,00	800.000,00	2.284.750,00	13,94
6.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	41.913.000,00	37.800.000,00	4.113.000,00	90,64
6.1.01.01.04.0000	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	41.913.000,00	37.800.000,00	4.203.000,00	89,88
6.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	90.103.000,00	74.405.000,00	16.498.000,00	81,82
6.1.01.01.04.0001.0000	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	90.103.000,00	74.405.000,00	16.498.000,00	81,82
6.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Bersih ASN	122.031.941,00	90.300.480,00	31.944.461,00	73,81
6.1.01.01.06.0000	Belanja Tunjangan Bersih PNS	117.879.734,00	89.311.120,00	28.356.914,00	75,94
6.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Bersih PPPK	4.152.207,00	1.079.360,00	3.072.543,00	13,94
6.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	26.891.207,00	24.287.378,00	2.483.829,00	90,75
6.1.01.01.07.0000	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26.508.904,00	24.307.378,00	2.240.525,00	91,97
6.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	382.303,00	-	343.303,00	-
6.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	135.213,00	26.114,00	90.099,00	22,47
6.1.01.01.08.0000	Belanja Pembulatan Gaji PNS	132.951,00	25.940,00	85.011,00	23,38
6.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.262,00	174,00	5.088,00	3,31
6.1.01.01.09	Belanja Asuransi Kesehatan ASN	171.094.951,00	135.815.880,00	35.279.071,00	79,35
6.1.01.01.09.0000	Belanja Asuransi Kesehatan PNS	161.226.471,00	125.261.921,00	31.824.552,00	81,34
6.1.01.01.09.0001	Belanja Asuransi Kesehatan PPPK	9.868.480,00	413.959,00	5.454.519,00	7,18
6.1.01.01.10	Belanja Asuransi Kesehatan Karyawan ASN	4.526.607,00	3.267.884,00	1.258.723,00	72,19
6.1.01.01.10.0000	Belanja Asuransi Kesehatan Karyawan PNS	4.408.967,00	3.253.374,00	1.155.393,00	73,79
6.1.01.01.10.0001	Belanja Asuransi Kesehatan Karyawan PPPK	117.640,00	14.510,00	103.330,00	12,10
6.1.01.01.11	Belanja Asuransi Kesehatan Karyawan ASN	13.500.194,00	9.904.831,00	3.777.363,00	72,18
6.1.01.01.11.0000	Belanja Asuransi Kesehatan Karyawan PNS	13.217.236,00	9.760.141,00	3.467.243,00	73,79
6.1.01.01.11.0001	Belanja Asuransi Kesehatan Karyawan PPPK	282.958,00	42.716,00	310.120,00	12,10

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.12	Belanja Bahan Sediaan Perenta Tabungas Pemukiman Rakit ASN	9.718.487,00		9.718.487,00	
5.1.01.01.12.001	Belanja Bahan Sediaan Perenta Tabungas Pemukiman Rakit ASN	9.718.487,00		9.718.487,00	
5.1.01.01.12.002	Belanja Bahan Sediaan Perenta Tabungas Pemukiman Rakit ASN	18.188,00		18.188,00	
5.1.01.01	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.514.648.000,00	2.432.993.535,00	87.554.465,00	96,72
5.1.01.01.46	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Besaran Kerja ASN	482.753.000,00	454.985.423,00	24.767.577,00	96,14
5.1.01.01.46.001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Besaran Kerja ASN	479.254.000,00	457.750.863,00	21.503.137,00	96,11
5.1.01.01.46.002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Besaran Kerja ASN	4.501.000,00	1.234.560,00	3.266.440,00	27,18
5.1.01.01.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Kerja ASN	82.467.000,00	82.533.605,00	1.933.394,00	97,79
5.1.01.01.02.001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Kerja ASN	82.467.000,00	82.533.605,00	1.933.394,00	97,79
5.1.01.01.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelengkapan Profesi ASN	717.779.000,00	695.081.132,00	18.697.868,00	97,40
5.1.01.01.04.001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelengkapan Profesi ASN	717.779.000,00	695.081.132,00	18.697.868,00	97,40
5.1.01.01.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.025.847.000,00	988.493.771,00	37.353.229,00	96,38
5.1.01.01.05.001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.018.893.000,00	985.540.921,00	33.252.079,00	96,83
5.1.01.01.05.002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	6.754.000,00	1.852.470,00	4.901.530,00	27,43
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	6.822.623.633,00	6.723.863.460,00	98.760.173,00	98,55
5.1.01.01	Belanja Barang	1.802.766.156,00	1.767.372.804,00	35.393.352,00	98,05
5.1.01.01.40	Belanja Barang Tidak Materi	1.802.766.156,00	1.767.372.804,00	35.393.352,00	98,05
5.1.01.01.40.004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	227.402.500,00	201.470.000,00	24.932.400,00	88,44
5.1.01.01.40.003	Belanja Satu-Gedung-Satu (Belanja Alat Angkut)	15.000.800,00	11.500.000,00	1.500.000,00	90,00
5.1.01.01.40.004	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	85.802.234,00	85.802.234,00	-	100,00
5.1.01.01.40.005	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	46.724.500,00	46.724.500,00	-	100,00
5.1.01.01.40.006	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Cover	217.887.700,00	214.303.820,00	1.583.880,00	99,27
5.1.01.01.40.007	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.800.900,00	4.800.900,00	-	100,00
5.1.01.01.40.008	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	192.832.500,00	185.762.049,00	7.070.451,00	96,42
5.1.01.01.40.009	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	113.556.700,00	111.712.923,00	1.843.777,00	98,34
5.1.01.01.40.010	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	51.995.000,00	51.995.000,00	-	100,00
5.1.01.01.40.011	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.987.000,00	5.987.000,00	-	100,00
5.1.01.01.40.012	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	117.508.000,00	117.508.000,00	-	100,00
5.1.01.01.40.013	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.169.000,00	11.169.000,00	90.000,00	99,21
5.1.01.01.40.014	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	203.000.000,00	202.618.326,00	3.811.774,00	99,57
5.1.01.01.40.015	Belanja Makanan dan Minuman Lembaran Tahun	7.337.000,00	7.336.000,00	1.000,00	99,99

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.2018	Belanja Makanan dan Minuman	21.257.000,00	21.257.000,00	-	100,00
5.1.02.01	Aktivitas Lapangan				
5.1.02.01.01	Belanja Jasa	3.311.893.265,00	3.277.790.613,00	34.102.652,00	98,37
5.1.02.01.01	Belanja Jasa Kantor	2.749.813.261,00	2.726.541.601,00	23.271.660,00	99,19
5.1.02.01.01.2003	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	129.223.863,00	135.018.000,00	4.794.137,00	96,98
5.1.02.01.01.2004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	6.019.013,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.2016	Belanja Jasa Tenaga Pengerjaan Pekerjaan dan Satwa Umum	9.795.000,00	9.795.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.2019	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.255.394.000,00	1.265.394.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.2020	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	608.636.516,00	599.323.200,00	9.313.316,00	98,46
5.1.02.01.01.2010	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	450.117.613,00	450.156.000,00	38.887,00	99,97
5.1.02.01.01.2015	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	33.250.000,00	32.585.000,00	665.000,00	98,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Jasa Pembinaan/Pengendalian Hamadan Fungsia	33.115.000,00	32.088.000,00	1.027.000,00	96,90
5.1.02.01.01.0001	Belanja Jasa Nelayan/Rekreasi/Industri Perikanan	166.750.000,00	166.750.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.2009	Belanja Tagihan Telepon	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.2002	Belanja Lapangan Kerja/Surat Kabar/Majalah	3.240.136,00	2.980.398,00	259.738,00	91,97
5.1.02.01.01.0007	Belanja Pembayaran Pajak/Retribusi Perumahan	16.475.000,00	16.962.400,00	4.472.600,00	60,71
5.1.02.01.01	Belanja Sewa Perakitan dan Meubel	179.000.000,00	178.677.500,00	322.500,00	99,82
5.1.02.01.01.0026	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.1000	Belanja Sewa Perakitan Umum	170.000.000,00	169.672.500,00	327.500,00	99,81
5.1.02.01.01	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	94.500.000,00	5.500.000,00	92,50
5.1.02.01.01.2001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	92.500.000,00	7.500.000,00	92,50
5.1.02.01.01	Belanja Sewa Asort Tenda Lahan	99.000.000,00	97.302.600,00	1.697.400,00	98,20
5.1.02.01.01.2007	Belanja Sewa Tanaman	99.000.000,00	97.302.600,00	1.697.400,00	98,20
5.1.02.01.01	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	65.000.000,00	64.482.000,00	518.000,00	99,20
5.1.02.01.01.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur/Jasa Desain Arsitektural	65.000.000,00	64.482.000,00	518.000,00	99,20
5.1.02.01.01	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	120.000.000,00	118.289.915,00	1.710.085,00	98,57
5.1.02.01.01.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Layanan Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	120.000.000,00	118.289.915,00	1.710.085,00	98,57
5.1.02.01	Belanja Pemeliharaan	1.415.754.312,00	1.388.468.144,00	27.286.168,00	98,07
5.1.02.01.02	Belanja Pemeliharaan Perakitan dan Meubel	167.150.000,00	165.895.500,00	1.254.500,00	99,84
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.000.000,00	9.918.900,00	81.100,00	99,79
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	54.700.000,00	54.054.400,00	645.600,00	99,92
5.1.02.01.02.0005	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.800.000,00	9.803.200,00	3.800,00	97,99

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	200.000,00	200.000,00	-	100,00
5.1.02.01.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00
5.1.02.01.02.0121	Kantor Alat Kantor Lainnya				
5.1.02.01.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga-Alat Persewaan	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00
5.1.02.01.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.02.0411	Unit Personal Computer				
5.1.02.01.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer Periferal	45.700.000,00	45.700.000,00	-	100,00
5.1.02.01.02.0411	Komputer-Periferal Komputer Lainnya				
5.1.02.03.00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.248.614.212,00	1.221.581.644,00	27.032.568,00	97,83
5.1.02.03.00.001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.248.614.212,00	1.221.581.644,00	27.032.568,00	97,83
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	292.200.000,00	290.031.897,00	2.168.103,00	99,26
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	292.200.000,00	290.031.897,00	2.168.103,00	99,26
5.1.02.04.01.0000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	292.200.000,00	290.031.897,00	2.168.103,00	99,26
B.B.	BELANJA MODAL	1.204.532.050,00	1.191.131.050,00	13.400.000,00	98,89
5.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.204.532.050,00	1.191.131.050,00	13.400.000,00	98,89
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.235.000,00	4.235.000,00	-	100,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Berat	4.235.000,00	4.235.000,00	-	100,00
5.2.02.01.02.0005	Belanja Modal Pompa	4.235.000,00	4.235.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.572.350,00	2.572.350,00	-	100,00
5.2.02.01.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel	2.572.350,00	2.572.350,00	-	100,00
5.2.02.01.03.01.0001	Belanja Modal Perakas Bengkel Listrik	2.077.310,00	2.077.310,00	-	100,00
5.2.02.01.03.01.0001	Belanja Modal Alat Bengkel	495.000,00	495.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.01.0001	Bekas dan Lainnya				
5.2.02.01.03.01.0001	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	443.284.700,00	438.904.700,00	4.380.000,00	99,01
5.2.02.01.03.01.0001	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	443.284.700,00	438.904.700,00	4.380.000,00	99,01
5.2.02.01.03.01.0001	Belanja Modal Mebel	131.267.000,00	131.267.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.01.0001	Belanja Modal Alat Persewaan	144.520.000,00	140.000.000,00	4.520.000,00	96,94
5.2.02.01.03.01.0001	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	167.517.700,00	167.517.700,00	-	100,00
5.2.02.01.03.01.0001	Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	23.825.000,00	23.825.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.01.0001	Belanja Modal Alat Studio	16.125.000,00	16.125.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.01.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.100.000,00	15.100.000,00	-	100,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	15.100.000,00	15.100.000,00	-	100,00
5.2.02.07.01.0000	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya				
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	711.720.000,00	702.700.000,00	9.020.000,00	98,71

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Saldo Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
1.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	407.200.000,00	404.830.000,00	2.400.000,00	99,41
1.2.02.10.01.001	Belanja Modal Personal Computer	407.200.000,00	404.830.000,00	2.400.000,00	99,41
1.2.02.14.02	Belanja Modal Perawatan Komputer	304.620.000,00	297.900.000,00	6.620.000,00	97,83
1.2.02.14.02.001	Belanja Modal Perawatan Komputer Lainnya	304.620.000,00	297.900.000,00	6.620.000,00	97,83
1.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	3.795.000,00	3.795.000,00	-	100,00
1.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3.795.000,00	3.795.000,00	-	100,00
1.2.02.18.01.001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	3.795.000,00	3.795.000,00	-	100,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.963.306.883,00)	(11.491.296.245,00)	(1.472.010.638,00)	96,36



 Kepala OPD/PTSP

 NUDI SANTOHA, S.STE., M.Si

 NIP. 19720914194111034

Lampiran 8
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran DPMPTSP
Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Urusan Pemerintahan : 2.18
 Unit Organisasi : 2.18.01

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Penyerapan Anggaran 2023	Bertambah / Berkurang (Rp)	PERSEN	ALASAN
5.	BELANJA	12.963.306.683,00	12.490.830.785,00	472.475.898,00	96%	
2.18.01.2.18.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	10.121.701.413,00	9.670.526.900,00	451.174.513,00	96%	
2.18.01.2.18.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.258.000,00	2.258.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	694.000,00	694.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.564.000,00	1.564.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.860.000,00	2.860.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.01.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	514.000,00	514.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.346.000,00	2.346.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.798.750,00	2.798.750,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.01.03.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	554.750,00	554.750,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.01.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.244.000,00	2.244.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.520.750,00	32.520.750,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.01.04.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	652.750,00	652.750,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.01.04.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.496.000,00	1.496.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.01.04.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.372.000,00	30.372.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.798.750,00	2.798.750,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.01.05.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	554.750,00	554.750,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.01.05.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.244.000,00	2.244.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.425.250,00	2.425.250,00	-	100%	

2.18.01.2.18.01.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	861.250,00	861.250,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.564.000,00	1.564.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.078.000,00	2.078.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.01.07.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	514.000,00	514.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.564.000,00	1.564.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.936.151.000,00	4.576.300.775,00	359.850.225,00	93%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.671.820.838,00	1.579.320.400,00	92.500.438,00	94%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	42.999.775,00	5.933.000,00	37.066.775,00	14%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	161.758.733,00	137.407.913,00	24.350.820,00	85%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.019.958,00	830.620,00	5.189.338,00	14%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	54.868.750,00	45.450.000,00	9.438.750,00	83%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0002.	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	2.654.750,00	370.000,00	2.284.750,00	14%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	41.951.000,00	37.620.000,00	4.331.000,00	90%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	90.569.000,00	74.105.000,00	16.464.000,00	82%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	117.878.034,00	89.511.120,00	28.366.914,00	76%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.155.908,00	579.360,00	3.577.548,00	14%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.508.904,00	24.367.379,00	2.141.525,00	92%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	340.293,00	-	340.293,00	0%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	110.951,00	25.940,00	85.011,00	23%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.262,00	174,00	5.088,00	3%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001.	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS	166.226.473,00	135.201.921,00	31.024.552,00	81%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002.	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.768.078,00	413.968,00	5.354.110,00	7%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001.	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.408.967,00	3.253.374,00	1.155.593,00	74%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002.	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	117.640,00	14.240,00	103.400,00	12%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001.	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	13.227.255,00	9.760.113,00	3.467.143,00	74%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002.	Belanja iuran Jaminan Kematian PPPK	352.938,00	42.718,00	310.220,00	12%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.12.0001.	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	9.720.094,00	-	9.720.094,00	0%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.01.12.0002.	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	18.388,00	-	18.388,00	0%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	679.254.000,00	657.750.863,00	21.503.137,00	97%

Catatan : Ada 3 pegawai pensiun, 1 pegawai mutasi ke instansi lain, dan penambahan 1 pegawai P3K masuk ke DPMPSTP

1.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.501.000,00	1.234.560,00	3.266.440,00	27%
1.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	87.467.000,00	85.533.609,00	1.933.391,00	98%
1.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	717.779.000,00	699.081.132,00	18.697.868,00	97%
1.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.018.893.000,00	986.640.901,00	32.252.099,00	97%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.01.5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	6.754.000,00	1.852.470,00	4.901.530,00	27%
1.18.01.2.18.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.506.500,00	2.506.500,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	262.500,00	262.500,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.244.000,00	2.244.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.267.000,00	3.267.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	275.000,00	275.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.992.000,00	2.992.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.753.000,00	1.753.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	235.000,00	235.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.518.000,00	1.518.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.836.000,00	1.836.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	340.000,00	340.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.496.000,00	1.496.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.894.000,00	2.894.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	650.000,00	650.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.244.000,00	2.244.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.544.000,00	2.544.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.02.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.244.000,00	2.244.000,00	-	100%
2.18.01.2.18.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.791.500,00	5.791.500,00	2.000,00	100%

2.18.01.2.18.01.01.2.03.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	183.500,00	183.500,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.03.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.610.000,00	5.608.000,00	2.000,00	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.854.750,00	5.783.250,00	71.500,00	99%	
2.18.01.2.18.01.01.2.03.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	244.750,00	241.250,00	3.500,00	99%	
2.18.01.2.18.01.01.2.03.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.610.000,00	5.542.000,00	68.000,00	99%	
2.18.01.2.18.01.01.2.03.03.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3.546.000,00	3.470.000,00	76.000,00	98%	
2.18.01.2.18.01.01.2.03.03.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	61.000,00	61.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.03.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.485.000,00	3.409.000,00	76.000,00	96%	
2.18.01.2.18.01.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.729.750,00	3.695.500,00	34.250,00	99%	
2.18.01.2.18.01.01.2.03.05.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	244.750,00	244.500,00	250,00	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.03.05.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.485.000,00	3.451.000,00	34.000,00	99%	
2.18.01.2.18.01.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.525.750,00	3.477.000,00	48.750,00	99%	
2.18.01.2.18.01.01.2.03.06.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	40.750,00	-	40.750,00	0%	Catatan : Belanja menyesuaikan kebutuhan
2.18.01.2.18.01.01.2.03.06.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.485.000,00	3.477.000,00	8.000,00	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3.536.000,00	3.367.000,00	169.000,00	95%	
2.18.01.2.18.01.01.2.03.07.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	51.000,00	44.000,00	7.000,00	86%	Catatan : Sisa negosiasi
2.18.01.2.18.01.01.2.03.07.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.485.000,00	3.323.000,00	162.000,00	95%	
2.18.01.2.18.01.01.2.05.05.	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	6.344.250,00	6.259.250,00	85.000,00	99%	
2.18.01.2.18.01.01.2.05.05.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	734.250,00	734.250,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.05.05.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.610.000,00	5.525.000,00	85.000,00	98%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.059.000,00	52.969.000,00	90.000,00	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	48.669.000,00	48.669.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	90.000,00	-	90.000,00	0%	Catatan : Tidak dibelanjakan tahun ini, dikarenakan harga pasar lebih tinggi dari SHBJ
2.18.01.2.18.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	397.411.236,00	394.360.785,00	3.050.451,00	99%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.382.236,00	30.382.236,00	-	100%	

2.18.01.2.18.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	45.724.500,00	45.724.500,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	188.532.500,00	185.482.049,00	3.050.451,00	98%	Catatan : Sisa negosiasi pengadaan barang e-catalogue
2.18.01.2.18.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.326.000,00	3.326.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.147.000,00	5.147.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.299.000,00	11.299.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.02.5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.02.5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.02.5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	38.500.000,00	38.500.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	127.536.700,00	125.652.923,00	1.883.777,00	99%	Catatan : Sisa negosiasi pengadaan barang e-catalogue
2.18.01.2.18.01.01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	113.596.700,00	111.712.923,00	1.883.777,00	98%	Catatan : Sisa negosiasi pengadaan barang e-catalogue
2.18.01.2.18.01.01.2.06.03.5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	840.000,00	840.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.03.5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.100.000,00	13.100.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	115.729.450,00	115.580.350,00	149.100,00	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	115.729.450,00	115.580.350,00	149.100,00	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.240.106,00	2.980.000,00	260.106,00	92%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.240.106,00	2.980.000,00	260.106,00	92%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.469.000,00	328.297.123,00	2.171.877,00	99%	Catatan : Sisa negosiasi
2.18.01.2.18.01.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.932.000,00	30.929.226,00	2.774,00	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.337.000,00	7.336.000,00	1.000,00	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	292.200.000,00	290.031.897,00	2.168.103,00	99%	Catatan : Pembatalan 1 agenda perjalanan dinas
2.18.01.2.18.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	355.749.700,00	351.924.700,00	3.825.000,00	99%	
2.18.01.2.18.01.01.2.07.05.5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	133.267.000,00	131.542.000,00	1.725.000,00	99%	
2.18.01.2.18.01.01.2.07.05.5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	97.500.000,00	96.500.000,00	1.000.000,00	99%	
2.18.01.2.18.01.01.2.07.05.5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	92.962.700,00	91.862.700,00	1.100.000,00	98%	Catatan : Sisa negosiasi pengadaan barang e-catalogue
2.18.01.2.18.01.01.2.07.05.5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	13.125.000,00	13.125.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.07.05.5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	15.100.000,00	15.100.000,00	-	100%	

2.18.01.2.18.01.01.2.07.05.5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	3.795.000,00	3.795.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	797.182.350,00	787.607.350,00	9.575.000,00	99%	
2.18.01.2.18.01.01.2.07.06.5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	4.235.000,00	4.235.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.07.06.5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	2.077.350,00	2.077.350,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.07.06.5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	495.000,00	495.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.07.06.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	44.000.000,00	43.500.000,00	500.000,00	99%	
2.18.01.2.18.01.01.2.07.06.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	62.455.000,00	62.400.000,00	55.000,00	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.07.06.5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.07.06.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.07.06.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	407.200.000,00	404.800.000,00	2.400.000,00	99%	Catatan : Sisa negosiasi pengadaan barang e-catalogue
2.18.01.2.18.01.01.2.07.06.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	266.020.000,00	259.400.000,00	6.620.000,00	98%	Catatan : Sisa negosiasi pengadaan barang e-catalogue
2.18.01.2.18.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.123.404.159,00	1.111.981.800,00	11.422.359,00	99%	
2.18.01.2.18.01.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	608.686.546,00	599.323.200,00	9.363.346,00	98%	Catatan : Sisa negosiasi pengadaan jasa melalui e-catalogue
2.18.01.2.18.01.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	415.717.613,00	415.356.000,00	361.613,00	100%	Catatan : Sisa negosiasi pengadaan jasa melalui e-catalogue
2.18.01.2.18.01.01.2.08.04.5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanah	99.000.000,00	97.302.600,00	1.697.400,00	98%	Catatan : Sisa negosiasi
2.18.01.2.18.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	245.253.000,00	216.062.750,00	29.190.250,00	88%	Catatan : Adanya perubahan standar harga bbm, menyesuaikan standar terbaru dan penghematan BBM untuk kendaraan dinas.
2.18.01.2.18.01.01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	171.278.000,00	148.798.550,00	22.479.450,00	87%	Catatan : Adanya perubahan standar harga bbm, menyesuaikan standar terbaru dan penghematan BBM untuk kendaraan dinas.
2.18.01.2.18.01.01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak Beadab Perizinan	14.875.000,00	8.406.800,00	6.468.400,00	57%	Catatan : Sesuai tarif STNK roda 2 dan 4
2.18.01.2.18.01.01.2.09.01.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	49.300.000,00	49.254.400,00	45.600,00	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.800.000,00	9.603.200,00	196.800,00	98%	

2.18.01.2.18.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.000.000,00	6.995.800,00	4.200,00	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak Beaduan Perizinan	1.600.000,00	1.595.600,00	4.200,00	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.766.500,00	189.101.400,00	1.665.100,00	99%	
2.18.01.2.18.01.01.2.09.06.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42.816.500,00	42.672.500,00	144.000,00	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.09.06.5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.000.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	90%	Catatan : Terdapat sisa negosiasi pada aki/genset.
2.18.01.2.18.01.01.2.09.06.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	34.800.000,00	34.800.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.000.000,00	9.978.900,00	21.100,00	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0045.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	200.000,00	200.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	41.200.000,00	41.200.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.323.379.212,00	1.295.828.644,00	27.550.568,00	98%	
2.18.01.2.18.01.01.2.09.09.5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	9.765.000,00	9.765.000,00	-	100%	
2.18.01.2.18.01.01.2.09.09.5.1.02.02.06.0002.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	65.000.000,00	64.482.000,00	518.000,00	99%	
2.18.01.2.18.01.01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.248.614.212,00	1.221.581.644,00	27.032.568,00	98%	Catatan : Sisa negosiasi
2.18.2.18.01.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.248.698.770,00	1.236.430.385,00	12.267.785,00	99%	
2.18.2.18.01.02.2.01.01.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	629.322.250,00	627.591.165,00	1.731.085,00	100%	
2.18.2.18.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.900.000,00	13.900.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.349.250,00	2.349.250,00	-	100%	

2.18.2.18.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Suvenir/Cendera Mata	69.500.000,00	69.500.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	255.425.000,00	255.404.000,00	21.000,00	100%	
2.18.2.18.01.02.2.01.01.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.02.2.01.01.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	119.148.000,00	119.148.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.02.2.01.01.5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.02.2.01.01.5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelisan dan Bantuan Teknik	120.000.000,00	118.289.915,00	1.710.085,00	99%	Catatan : Sisa negosiasi
2.18.2.18.01.02.2.02.02.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	619.376.520,00	608.839.820,00	10.536.700,00	98%	
2.18.2.18.01.02.2.02.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	28.114.520,00	28.000.320,00	114.200,00	100%	
2.18.2.18.01.02.2.02.02.5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Suvenir/Cendera Mata	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.196.000,00	75.601.000,00	2.595.000,00	97%	Catatan : Sisa negosiasi
2.18.2.18.01.02.2.02.02.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.02.2.02.02.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	110.316.000,00	110.316.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.02.2.02.02.5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Film dan Perotretan	166.750.000,00	166.750.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.02.2.02.02.5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	100.000.000,00	99.672.500,00	327.500,00	100%	
2.18.2.18.01.02.2.02.02.5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	92.500.000,00	7.500.000,00	93%	Catatan : Sisa negosiasi
2.18.2.18.01.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	787.182.750,00	787.182.750,00	-	100%	
2.18.2.18.01.04.2.01.01.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	560.456.750,00	560.456.750,00	-	100%	
2.18.2.18.01.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	912.750,00	912.750,00	-	100%	
2.18.2.18.01.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.460.000,00	13.460.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.04.2.01.01.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	546.084.000,00	546.084.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.04.2.01.02.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	124.088.000,00	124.088.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.04.2.01.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	48.296.000,00	48.296.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.04.2.01.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.970.000,00	11.970.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.04.2.01.02.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	63.822.000,00	63.822.000,00	-	100%	

2.18.2.18.01.04.2.01.03.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	102.638.000,00	102.638.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.04.2.01.03.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	420.000,00	420.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.04.2.01.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.230.000,00	9.230.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.04.2.01.03.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	92.988.000,00	92.988.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	606.504.000,00	599.170.400,00	7.333.600,00	99%	
2.18.2.18.01.05.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	430.130.000,00	423.784.400,00	6.345.600,00	99%	
2.18.2.18.01.05.2.01.02.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.828.000,00	3.417.000,00	411.000,00	89%	Catatan : Harga bbm yang fluktuatif tahun 2023.
2.18.2.18.01.05.2.01.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.600.000,00	17.600.600,00	-	100%	
2.18.2.18.01.05.2.01.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.550.000,00	8.815.400,00	1.734.600,00	84%	Catatan : Terdapat salah rekening TU dan sisa negosiasi banner.
2.18.2.18.01.05.2.01.02.5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSувенир/Cendera Mata	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.05.2.01.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	197.560.000,00	197.560.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.05.2.01.02.5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.072.000,00	6.072.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.05.2.01.02.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	87.200.000,00	83.000.000,00	4.200.000,00	95%	Catatan : Narasumber DPRD 1 x tidak hadir dan penyesuaian honor narasumber yang hadir.
2.18.2.18.01.05.2.01.02.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	79.320.000,00	79.320.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.05.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	176.374.000,00	175.386.000,00	988.000,00	99%	
2.18.2.18.01.05.2.01.03.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.570.000,00	8.582.000,00	988.000,00	90%	Catatan : Harga bbm yang fluktuatif tahun 2023.
2.18.2.18.01.05.2.01.03.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.05.2.01.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.640.000,00	15.640.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.05.2.01.03.5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.180.000,00	15.180.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.05.2.01.03.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.05.2.01.03.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	127.644.000,00	127.644.000,00	-	100%	
2.18.2.18.01.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	199.219.750,00	197.519.750,00	1.700.000,00	99%	
2.18.2.18.01.06.2.01.01.	PengolahanPenyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	199.219.750,00	197.519.750,00	1.700.000,00	99%	

2 18 2 18 01 06 2 01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1.007.750,00	1.007.750,00	-	100%	
2 18 2 18 01 05 2 01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.147.000,00	36.139.000,00	8.000,00	100%	
2 18 2 18 01 06 2 01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	95.700.000,00	95.700.000,00	-	100%	
2 18 2 18 01 06 2 01 01 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	33.250.000,00	32.585.000,00	665.000,00	98%	Catatan : Sisa negosiasi
2 18 2 18 01 06 2 01 01 5 1 02 02 01 0052	Belanja Jasa Pembersihan/Pengendalian Hama dan Penyakit Tumbuhan/Fumigasi	33.115.000,00	32.088.000,00	1.027.000,00	97%	Catatan : Sisa negosiasi
	JUMLAH	12.963.306.683,00	12.490.830.785,00			

Yogyakarta, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Yogyakarta

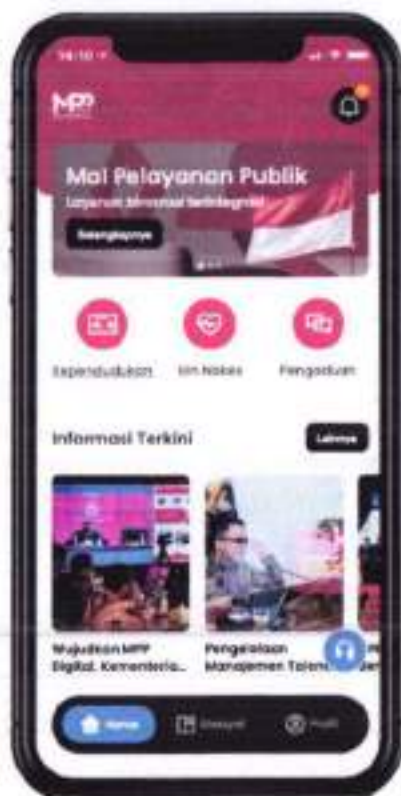


Budi Santosa, STP, M.Si
NIP. 19720914 199303 1 004

Lampiran 9
Penghargaan yang diterima

PRESTASI TAHUN 2023

MPP DIGITAL



- Proyek Percontohan penyelenggaraan MPP Digital oleh Menteri PAN-RB.
- SoftLaunching oleh Wakil Presiden RI tanggal 20 Juni 2023

PENILAIAN KINERJA PTSP DAN PPB KEMENVES - BKPM



Nomor: 1478/SA/2023
Date: Jakarta, 23 November 2023
Lampiran: 1
Hal: Informasi hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Persewaan Perumahan Bersubsidi (PPB) Kota Yogyakarta Tahun 2023

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
Dit.

Sehubungan dengan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta No. 100/L.1.10214 tanggal 14 November 2023 perihal: Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Persewaan Perumahan Bersubsidi, dengan ini kami menyampaikan informasi hasil Penilaian Kinerja Persewaan Kota Yogyakarta pada Tahun 2023 sesuai hasil verifikasi dan validasi sebagai berikut:

No.	Nama Daerah	Peringkat	Nilai Akhir	Kategori
1.	Kota Yogyakarta	22 dari 93 Kota	86,096	Sangat Baik

- Tahun 2023 Peringkat 12 dari 93 Kabupaten/Kota nilai 86,096 Kategori : Sangat Baik
- Tahun 2022 Peringkat 15 dari 93 Kabupaten/Kota nilai 84,992 Kategori : Sangat Baik

PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN RI



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
SARAH ELK TAHUN 2023

TENTANG
HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2023

KOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kategori A Zona Hijau nilai 96,13 (Kualitas Tertinggi)

PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK DIY



DPMPPTSP sebagai Badan Publik Informatif Kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY

LANJUT >

PRESTASI TAHUN 2023

MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN MPP



MENTERI
PERTANJANGAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPERINTAHAN TENTANG HASIL
DAN BENCANA MONITORING DAN EVALUASI
MONITORING 2023

MENTERI
PERTANJANGAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI
PERTANJANGAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Kota Yogyakarta
Sangat Baik

- Kota Yogyakarta mendapat kategori Sangat Baik untuk hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP yang diselenggarakan oleh Menteri PAN-RB

GENDER CHAMPION KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



- Juara III Gender Champion 2023 Kategori Organisasi Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK



DPMPTSP meraih peringkat IX Tata Kelola Pemerintahan Terbaik pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta dengan nilai 88,200

LOMBA VIDEO KREATIVITAS HUT KORPRI KE-52



DPMPTSP meraih juara 3 Kategori A pada lomba video kreativitas HUT KORPRI ke-52

LANJUT >

PRESTASI TAHUN 2023

LIGA SEPAK BOLA ISTIMEWA DPMPTSP SE- DIY



- DPMPTSP Kota Yogyakarta meraih juara IV

SUPORTER TERBAIK PADA LIGA SEPAK BOLA ISTIMEWA DPMPTSP SE- DIY



- DPMPTSP Kota Yogyakarta meraih juara 2 kategori suporter pada liga sepak bola istimewa DPMPTSP se-DIY

PENGHARGAAN MENTERI KESEHATAN



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KEDIRYATAAN JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 2-3 Gedung 4-5 Salekha C/102
Telp. (021) 520781 (Lini Pagi)



B. Tempat Kerja penerima Penghargaan

A. Tempat Kerja penerima Penghargaan Menteri Kesehatan

No	Nama Instansi	Alamat	Provinsi	Daerah
19	PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Jl. Gatot Subroto No. 1, Jakarta Selatan	Jakarta	Jakarta
20	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk	Jl. Setiabudi No. 225, Jakarta Selatan	Jakarta	Jakarta
21	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jl. H.R. Rasuna Said No. 11, Jakarta Selatan	Jakarta	Jakarta
22	PT. Bank Central Asia Tbk	Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta Selatan	Jakarta	Jakarta

DPMPTSP Kota Yogyakarta meraih peringkat 21 untuk tempat kerja penerima penghargaan menteri kesehatan

LANJUT >

Lampiran 10
SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INTERNAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang terdiri:

- a. SOP Pengendalian Surat Masuk Melalui Pemberian Langsung dan E-mail;
- b. SOP Pengendalian Surat Masuk Melalui Jogja Smart Service (JSS) E-Office;
- c. SOP Pengendalian Surat Keluar Melalui Pengiriman E-mail;
- d. SOP Pengendalian Surat Keluar Melalui Jogja Smart Service (JSS) E-Office;
- e. SOP Pengadaan Barang & Jasa;
- f. SOP Pengadaan Verifikasi Barang Masuk;
- g. SOP Pengendalian Barang;
- h. SOP Pemeliharaan Barang;
- i. SOP Pengendalian Tata Graha;
- j. SOP Prosedur Presesnsi Elektronik;
- k. SOP Apel Pagi;
- l. SOP Pemberian Cuti Pegawai;
- m. SOP Penilaian Kerja Pegawai;

- n. SOP Pengajuan SPMGU;
- o. SOP Pengajuan SPPGU;
- p. SOP Pengelolaan dan Penatausahaan Anggaran Belanja (Pengeluaran);
- q. SOP Penatausahaan dan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan OPD;
- r. SOP Pengumpulan Data Kinerja;
- s. SOP Penyusunan Laporan Kinerja;
- t. SOP Rencana Kerja Anggaran;
- u. SOP Legalisir Dokumen Perizinan.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal seperti disebut dalam DIKTUM Kesatu terdapat dalam lampiran I sampai dengan II yang tidak terpisah dengan Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal ini merupakan pedoman bagi pelaksana dan sarana komunikasi antara pelaksana dan pengawas, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan /atau kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 22/KEP/DPMP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 18 November 2022

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA,**



BUDI SANTOSA, S.TP., M.Si
NIP 19720914 199303 1 004



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN I.C.1. : PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 35/KEP/DPMPTSP/2022
TANGGAL : 18 November 2022



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA**

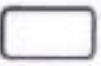
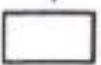
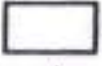
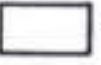



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA**

Nomor SOP	35/KEP/DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan	3 November 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	18 November 2022
Disahkan Oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Yogyakarta
Nama SOP	Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala DPMPTSP (S1/S2)2. Sekretaris DPMPTSP (S1/S2)3. PPTK (S1/S2)4. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (KS PEP) (S1/S2)5. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) (S1/D4)6. Pengadministrasi Perencanaan dan Program (S1/D3)
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Laporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Printer, Scanner2. Alat tulis kantor3. Peralatan kantor4. Ruang Rapat5. Meja, Kursi6. Internet
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan	Data kinerja merupakan sarana/bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		KEPALA DPMPTSP	SEKRETARIS DPMPTSP	PPTK	KOORDINATOR SUB KELOMPOK PEP	ANALIS PEP	PENGADMINISTRASI	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Memerintahkan pengumpulan data dalam rangka pengukuran kinerja							Nota Dinas	5 Menit	Nota Dinas	
2	Melakukan koordinasi dengan PPTK dalam rangka pengukuran kinerja DPMPTSP melalui pemerhatian data-data yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja dan koordinasi pengumpulan data kinerja							Hasil Koordinasi	90 Menit	Hasil Koordinasi pengumpulan data yang dibutuhkan untuk LAKIP	
3	Melakukan inventarisir terhadap data yang digunakan untuk pengukuran kinerja dan mengumpulkan data kinerja							Data dan Dokumen	3 Hari	Data dan Dokumen yang dibutuhkan untuk LAKIP	
4	Melaksanakan koordinasi dan pemerhatian data-data yang telah dikumpulkan							Hasil Koordinasi	3 Hari @120 Menit	Hasil Koordinasi pemerhatian data dan dokumen	
5	Menganalisis dan mengevaluasi data serta informasi kinerja yang terkumpul							Dokumen	2 Hari @120 Menit	Dokumen hasil analisa	
6	Merekap data yang telah disampaikan untuk digunakan dalam pengukuran kinerja							Dokumen	60 Menit	Rekap Data Kinerja	

Mengetahui,
 Pjt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Yogyakarta



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
 NIP 19720914 199303 1 004

LAMPIRAN I.C.2. : PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 35/KEP/DPMPTSP/2022
TANGGAL : 18 November 2022



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA**

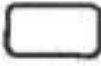
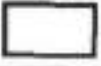
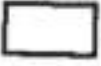
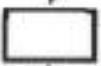
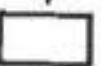

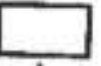



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA**

Nomor SOP	35/KEP/DPMPPTSP/2022
Tanggal Pembuatan	3 November 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	18 November 2022
Disahkan Oleh	Plt. Kepala DPMPPTSP Kota Yogyakarta
Nama SOP	Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala DPMPPTSP (S1/S2)2. Sekretaris DPMPPTSP (S1/S2)3. PPTK (S1/S2)4. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (KS PEP) (S1/S2)5. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) (S1/D4)6. Pengadministrasi Perencanaan dan Program (S1/D3)
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pengumpulan Data Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Printer, Scanner2. Alat tulis kantor3. Peralatan kantor4. Ruang Rapat5. Meja, Kursi6. Internet
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan	Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		KEPALA DPMPPTSP	SEKRETARIS DPMPPTSP	KOORDINATOR SUB KELOMPOK PEP	ANALIS PEP	PENGADMINISTRASI	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Memerintahkan penyusunan LAKIP						Nota Dinas	5 Menit	Nota Dinas	
2	Melakukan koordinasi dengan Koordinator Sub Kelompok PEP dalam menyusun Laporan Kinerja DPMPPTSP						Hasil Koordinasi	90 Menit	Hasil Koordinasi pengumpulan data yang dibutuhkan untuk LAKIP	
3	Melaksanakan koordinasi dan pencermatan data-data yang telah dikumpulkan						Data dan Dokumen	3 Hari @120 Menit	Hasil Koordinasi pencermatan data dan dokumen	
4	Menganalisis dan mengevaluasi data serta informasi kinerja yang terkumpul						Hasil Koordinasi	2 Hari @120 Menit	Dokumen hasil analisa	
5	Membuat draft LAKIP						Dokumen	5 Hari @120 Menit	Draft LAKIP	
6	Mengoreksi draft LAKIP						Dokumen	90 Menit	Draft LAKIP	
7	Melaksanakan rapat Finalisasi LAKIP						Dokumen	120 Menit	Draft LAKIP	
										

8	Menyampaikan dokumen LAKIP kepada Kepala Dinas untuk persetujuan						Dokumen	60 Menit	Dokumen LAKIP
9	Melaksanakan penandatanganan dokumen LAKIP						Dokumen	60 Menit	Dokumen LAKIP
10	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran						Dokumen	60 Menit	Dokumen LAKIP
11	Menggandakan dokumen LAKIP						Dokumen	60 Menit	Dokumen LAKIP
12	Mengirimkan dokumen LAKIP						Dokumen	60 Menit	Dokumen LAKIP

Mengetahui,

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Yogyakarta



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.

NIP 19720914 199303 1 004